

**EFEKTIVITAS PEGAWAI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM MENUNJANG  
KEBERDAYAAN DI TPI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PRIGI DESA  
TASIKMADU, KABUPATEN TRENGGALEK, PROPINSI JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

**RIZKY NUR MAULIDYA**

**NIM. 0810840031**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2012**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PEGAWAI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM MENUNJANG  
KEBERDAYAAN DI TPI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PRIGI DESA  
TASIKMADU, KABUPATEN TRENGGALEK, PROPINSI JAWA TIMUR**

Oleh :

**RIZKY NUR MAULIDYA**

**NIM. 0810840031**

telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 5 September 2012  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dosen Penguji I**

**Dr. Ir. Ismadi, MS**

**NIP. 19490515 197802 1 001**

**Tanggal:**

**Dosen Penguji II**

**Dr. Ir. Anthon Efani, MP**

**NIP. 196507171 199103 1 006**

**Tanggal :**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP**

**NIP. 19660604 199002 2 002**

**Tanggal:**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP**

**NIP. 19610417 199003 1 001**

**Tanggal :**

**MMengetahui,**

**Ketua Jurusan SEPK**

**Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP**

**NIP. 19610417 199003 1 001**

**Tanggal:**

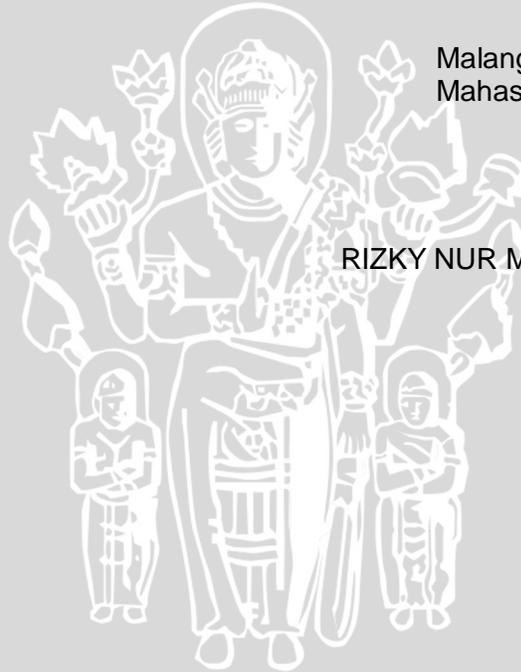
## PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Malang, 12 Agustus 2012  
Mahasiswa,

RIZKY NUR MAULIDYA



## UCAPAN TERIMAKASIH

Sehubungan dengan selesainya laporan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing dan memberikan banyak masukan berharga dengan sabar mulai dari proses penyusunan proposal skripsi di tengah kesibukan Beliau yang sangat padat.
2. Bapak Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi hingga penulisan laporan ini.
3. Ibu dan Bapak ku yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
4. Kedua kakak ku yang selalu memberikan dukungan.
5. Rendy Irawan PSP'08 yang selalu bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi.
6. Teman-teman SEPK'08 dan SEPK'09 yang selalu memberikan dukungan dan selalu bersedia untuk bertukar informasi dan diskusi
7. Teman-teman kost Griya Puri Watu Gong.
8. Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta Nelayan dan Pedagang ikan di Prigi atas waktu, bantuan dan informasinya dalam penelitian ini, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Malang, 11 September 2012

Penulis

## RINGKASAN

**RIZKY NUR MAULIDYA**, Efektivitas Pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Menunjang Keberdayaan Di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur (di bawah bimbingan Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP dan Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP)

---

---

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada bulan Maret-Juni 2012.

Penelitian ini secara umum, bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pegawai TPI Prigi dalam menunjang keberdayaan di TPI Prigi. Secara khusus, beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pegawai TPI terhadap tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang sudah dilakukan oleh pegawai TPI, efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan di TPI, faktor pendukung dan penghambat pegawai TPI dalam melaksanakan tupoksi, menyusun strategi peningkatan efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan di TPI Prigi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.kualitatif. Menurut Sugiyono (2008), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah FGD (Focus Group Discussion) melakukan diskusi dengan peserta terbatas yang berasal dari kelompok tertentu dengan topik bahasan tertentu pula, wawancara dengan informan, studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder.

Pemahaman pegawai TPI terhadap tupoksi termasuk baik. Mayoritas pegawai TPI telah memahami istilah tupoksi, hanya saja ada beberapa konsep tupoksi terutama tupoksi Kepala Bidang Perkreditan. Perkreditan dimana 50% responden yang jawabannya benar. Demikian juga Tujuan Tupoksi dan Tupoksi Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana masing-masing 28,6% dan 21,4% responden menyatakan salah. Sedangkan untuk istilah tugas pokok dan fungsi, tugas pokok pegawai TPI, fungsi pegawai TPI, fungsi tugas pokok kepala TPI, tugas pokok Kepala Bidang Keuangan, tugas pokok Kepala Bidang urusan teknik lelang, tugas pokok Kepala Bidang keamanan, informan menjawab dengan benar.

Pelaksanaan tupoksi pegawai TPI belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi, seperti nelayan dan bakul yang masi enggan dalam membayar retribusi dan masih maraknya pencurian ikan yang meresahkan nelayan. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, masih adanya permainan harga antara pembeli dengan pegawai TPI.

Tingkat efektivitas pegawai TPI Prigi termasuk belum efektif. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut konsumen dari TPI Prigi belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak TPI. Namun Pihak TPI merasa sudah sangat optimal dalam memberikan pelayanan. Dalam melakukan pekerjaan pegawai TPI selalu penuh semangat. Kompensasi/honor yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan membuat pegawai TPI mencari tambahan penghasilan dengan lembur atau membantu nelayan di saat sela-sela aktifitas kerja. Pegawai TPI Prigi belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan kerja yang dapat membantu meningkatkan efektifitas pegawai.

Faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan pelelangan ikan. Faktor penunjang pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Prigi adalah adanya pranti hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelelangan ikan di Kabupaten Trenggalek, potensi sumber daya ikan (SDI) yang besar dapat meningkatkan produksi pemasaran di TPI Prigi, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya Faktor penghambat, yaitu: pihak nelayan dan pedagang masi enggan dalam memebayar retribusi, masih maraknya kasus pencurian ikan, pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif, manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang belum efektif..

Strategi peningkatan efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan. Berdasarkan analisis tersebut di dapatkan strategi yang cocok untuk TPI Prigi yaitu strategi agresif. Dengan kata lain, TPI Prigi memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth oriented strategy).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkann ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi dengan judul “Efektifitas Pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Menunjang Keberdayaan Di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Desa Tasikamdu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur”. Di dalam laporan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi pemahaman pegawai TPI Prigi terhadap tupoksi pegawai TPI, Pelaksanaan tupoksi pegawai TPI, Efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan, Faktor pendukung dan penghambat pegawai TPI dalam menjalankan tupoksi, Strategi peningkatan efektivitas dalam menunjang keberdayaan di TPI Prigi.

Sangat penulis sadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan penulis untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurang-tepatan sehngga saran sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, Juli 2012

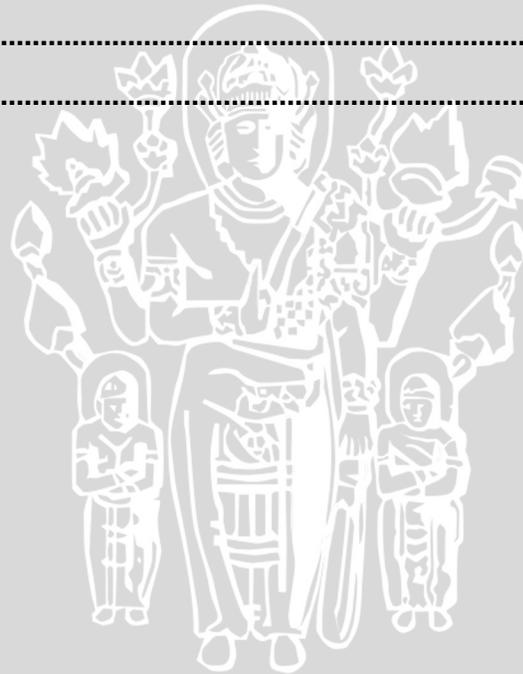
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Pengertian TPI .....	7
2.1.1.1 Konsep TPI.....	9
2.1.1.2 Tupoksi TPI.....	12
2.1.2 Konsep Efektivitas .....	15
2.1.3 Konsep Keberdayaan.....	18
2.2 Kerangka Berfikir .....	20
2.3 Definisi Operasional.....	23
<b>3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
3.2 Jenis Penelitian .....	24
3.3 Fokus Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.4.1 Jenis Data.....	26

3.4.2 Sumber Data .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.6 Metode Analisis Data .....	30
3.7 Keabsahan Data .....	40
<b>4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Letak Geografis dan Topografi Desa Tasikmadu .....	43
4.2 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	44
4.3 Keadaan Umum Perikanan.....	46
4.3.1 Kegiatan Usaha Perikanan .....	46
4.3.2 Musim Penangkapan Ikan .....	47
4.3.3 Jumlah Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap .....	48
4.3.4 Produksi Perikanan .....	48
4.3.5 Pemasaran Ikan .....	50
4.3.6 Lembaga Perikanan .....	52
4.4 Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi.....	57
<b>5. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
5.1 Proses Pelelangan Ikan di TPI Prigi .....	61
5.1.1 Pra Pelelangan.....	63
5.1.2 Proses Pelelangan .....	64
5.1.3 Pasca Pelelangan .....	65
5.2 Gambaran Pemahaman Pegawai TPI Prigi mengenai Konsep Tupoksi .....	67
5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai TPI dalam Pelaksanaan Pelelangan.....	75
5.4 Efektifitas Pegawai TPI Dalam Menjalankan Tupoksi .....	80
5.4.1 Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja selama bekerja.....	81
5.4.2 Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja di Luar Pekerjaan.....	86
5.4.3 Sumber Utama Kinerja yang Tidak Efektif.....	91
5.5 Faktor Pendukung dan Penghambat .....	98

5.1 Faktor Pendukung.....	98
5.2 Faktor Penghambat.....	99
5.6 Strategi Peningkatan Efektivitas Pegawai TPI .....	100
5.6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal .....	100
5.6.2 Bagan Matrik SWOT .....	105
5.6.3 Implementasi Strategi .....	112
<b>6. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>113</b>
6.1 Kesimpulan .....	113
6.2. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>118</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.Beberapa faktor untuk mengetahui tingkat kinerja yang tidak efektif .....	17
2.Sumber utama kinerja yang tidak efektif.....	18
3.Tabel faktor kekuatan (strenghts) .....	34
4.Tabel faktor kelemahan (weakness).....	35
5.Tabel faktor peluang (opportunities) .....	35
6.Tabel faktor ancaman (threats).....	35
7.Tabel Matriks IFAS .....	36
8.Tabel Matriks EFAS .....	37
9. Matrik SWOT.....	38
10. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	45
11. Jumlah nelayan menurut alat tangkap PPN Prigi tahun 2007-2011 .....	48
12. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2007-2011 .....	49
13. Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2011 .....	50
14. Daerah Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2011 .....	51
15. Pengolahan Produksi Hasil Tangkap Tahun 2011 .....	52
16. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	54
17. Jenis-jenis Ikan Yang Dilelang Di TPI Prigi Pada Tahun 2011 .....	59
18. Perkembangan Retribusi TPI Prigi Selama Tahun 2010-2011 .....	60
19.Pemahan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai TPI.....	72
20.Faktor Organisasi Tingkat Kinerja Selama Bekerja.....	82
21.Faktor Individu Tingkat Kinerja Selama Bekerja.....	84
22.Faktor Sosial Tingkat Kinerja Selama Bekerja .....	85
23.Faktor Organisasi Tingkat Kinerja Di Luar Pekerjaan .....	87
24.Faktor Individu Tingkat Kinerja Di Luar Pekerjaan .....	89

25.Faktor Sosial Tingkat Kinerja Di Luar Pekerjaan..... 90

26.Faktor Individu Sumber Utama Kinerja Yang Tidak Efektif ..... 92

27.Faktor Organisasi Sumber Utama Kinerja Yang Tidak Efektif ..... 94

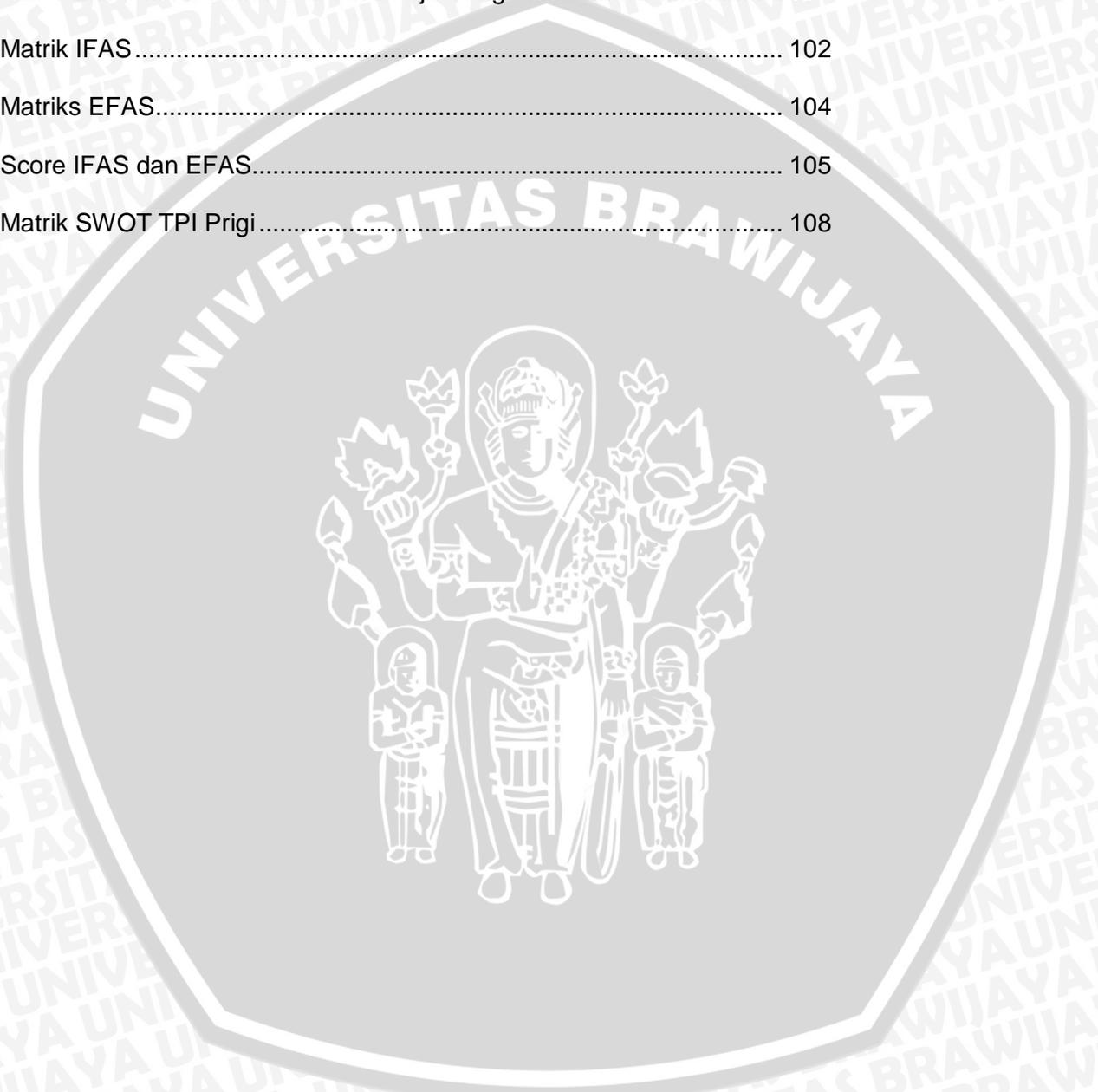
28.Faktor Eksternal Sumber Utama Kinerja Yang Tidak Efektif ..... 96

29. Matrik IFAS..... 102

30. Matriks EFAS..... 104

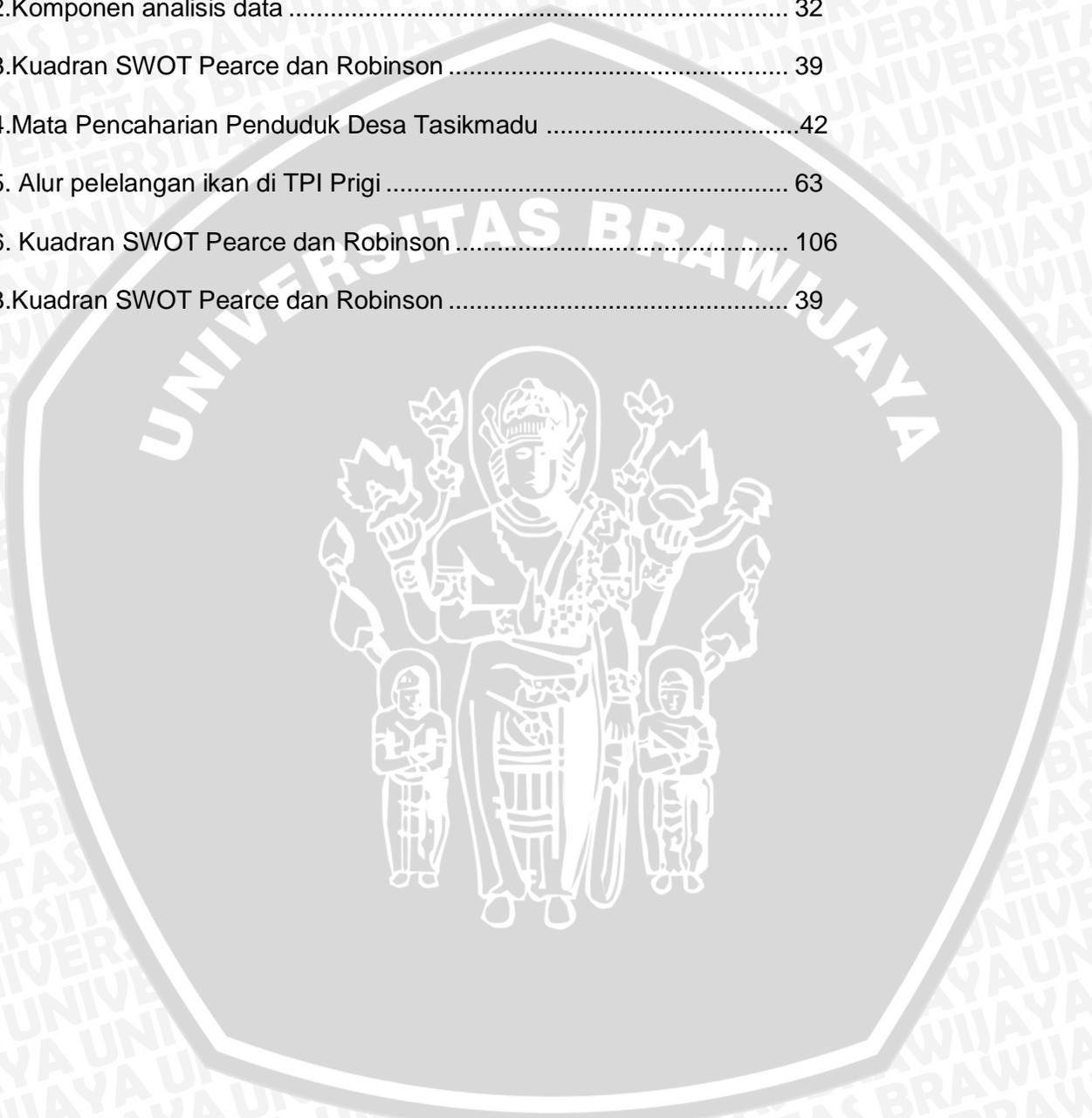
31. Score IFAS dan EFAS..... 105

32. Matrik SWOT TPI Prigi..... 108



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan kerangka berfikir.....	22
2. Komponen analisis data .....	32
3. Kuadran SWOT Pearce dan Robinson .....	39
4. Mata Pencarian Penduduk Desa Tasikmadu .....	42
5. Alur pelelangan ikan di TPI Prigi .....	63
6. Kuadran SWOT Pearce dan Robinson .....	106
3. Kuadran SWOT Pearce dan Robinson .....	39



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1.Kuisisioner .....	118
2. PROLOG .....	125
3. Pemahaman keberdayaan dan tupoksi.....	128
4.Gedung TPI Prigi.....	130
5.Aktivitas pelelangan ikan .....	131
6. Fasilitas TPI Prigi .....	132
7. Reduksi data .....	133
8.Transkrip wawancara .....	139
9.Denah desa Tasikmadu Prigi.....	142



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan dan kelautan baik dalam skala global maupun dalam skala lokal telah mengalami banyak perubahan. Dalam skala global, dua perubahan utama telah terjadi sejak akhir Perang Dunia II. Pertama, perubahan dari pertumbuhan produksi global yang cepat ke pertumbuhan yang stagnan. Kedua, terjadinya ekstensi yurisdiksi oleh negara-negara pantai. Selain itu, beberapa perkembangan penting juga telah terjadi seiring dengan kedua perubahan tersebut. Perubahan tersebut selain dipicu oleh faktor biologi, dimana hampir 75% stok sumberdaya global telah mengalami *biological overfishing* (FAO, 2000), juga dipicu oleh perubahan sosio ekonomi-kelembagaan serta politik yang memaksa beberapa negara pantai melakukan *turning the tide* terhadap kebijakan perikanan dan kelautan mereka (Fauzi, 2005).

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal itu dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum melakukan sebuah perbuatan secara efektif.

Pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan, hasil ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan Unit Kegiatan Ekonomi terpenting di pelabuhan yang merupakan faktor penggerak dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Menurut Susilo dalam Rokhani (2009), TPI dibangun pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1971 di Puger (Jember) dan Panarukan (Situbondo). TPI dibangun pada pusat-pusat pendaratan ikan (PPI) dan pada sentra-sentra budidaya. Salah satu fungsi utama TPI adalah

menyelenggarakan pemasaran atau pelelangan hasil tangkapan nelayan. Dalam proses pelelangan tersebut TPI akan mampu mengangkat daya tawar (bargaining position) nelayan ketika berhadapan dengan pedagang, dengan terciptanya harga dan sistem pembayaran yang layak tanpa merugikan pedagang.

TPI Prigi dibangun sejak tahun 1976, pembangunan TPI dilaksanakan oleh DKP Propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan TPI di Prigi Watulimo pada tahun 1976 diserahkan penyelenggaraannya kepada Koperasi Unit Desa Mina Tani Sempurna (KUD MTS) sampai tahun 2000. Pada tahun 2000 sampai tahun 2003 pengelolaan TPI Prigi dikelola oleh Koperasi Sinati dan KBN. Sinati adalah koperasi yang merupakan manifest dari para juragan atau pemilik alat tangkap purse seine, sedangkan KBN adalah Koperasi Bakul Nelayan. Mulai tahun 2003 sampai sekarang TPI Prigi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kabupaten Trenggalek. Adapun fungsi dari TPI Prigi menurut keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2003 Bab II, Pasal 3 adalah : menjamin kelestarian sumberdaya alam, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, mememberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat nelayan, peningkatan kontribusi PAD Pendapatan Asli Daerah), pusat data eksplorasi dan sumberdaya laut lainnya ( Rokhani, 2009).

Bila dilihat tujuan awal dibangunnya TPI, maka yang terlihat pihak yang diuntungkan adalah nelayan. Hal ini karena di TPI diharapkan melalui sistem pelelangan menempatkan nelayan berada pada posisi yang tidak dieksploitasi lagi oleh pedagang. Dengan adanya penjualan dengan sistem lelang, pendapatan yang diterima nelayan akan lebih besar dan secara kontan. Posisi TPI membela kepentingan nelayan dalam melakukan pelayanan. Pengelolaan dana retribusi juga digunakan untuk kesejahteraan dan pembinaan nelayan.

Kenyataannya ternyata jauh dari harapan yang ada. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, masih adanya permainan harga antara pembeli dengan pengelola TPI. Selain itu keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak

dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, banyak pihak-pihak yang tidak berhak mengambil ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis merugikan pihak nelayan. Pengelolaan retribusi yang dipandang kurang transparan juga disayangkan oleh nelayan.

Definisi dari efektivitas adalah pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Indikatornya adalah dilihat dari produk yang telah dihasilkan, kualitas dari pekerjaan dan tercapainya tujuan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelola TPI belum efektif. Untuk menjaga kepercayaan dari para pengguna jasa TPI maka pegawai TPI harus memperbaiki diri dengan meningkatkan efektivitas kepegawaian TPI sehingga dapat terciptanya keberdayaan.

Dari beberapa alasan diatas, maka perlu diadakannya penelitian mengenai Efektivitas Pegawai TPI Dalam Menunjang Keberdayaan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pemahaman pengelola TPI dalam tupoksi pengelolaan TPI?
2. Apa yang sudah dilakukan oleh pengelola TPI terkait dengan tugas dan fungsinya?
3. Bagaimana efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur?
4. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelola TPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
5. Bagaimana strategi peningkatan efektivitas pengelola TPI dalam menunjang pelaksanaan keberdayaan pengelola TPI di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau data empiris tentang efektivitas pengelola TPI dalam menunjang keberdayaan pengelola TPI di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis data atau informasi empiris tentang beberapa hal berikut :

1. Pemahaman pegawai TPI terhadap tupoksi sebagai pegawai TPI.
2. Tugas dan fungsi yang sudah dilakukan oleh pegawai TPI.
3. Efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan di TPI Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.
4. Faktor pendukung dan penghambat pegawai TPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Menyusun strategi peningkatan efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan pengelola TPI di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat tersebut berguna bagi :

1. Masyarakat Perikanan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran untuk nelayan agar mengetahui fungsi dan tujuan dari Tempat Pelelangan Ikan

2. Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

3. Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memahami tentang kondisi pengelolaan di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, dan serta diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Wikipedia, 2006).

Menurut Abdullah dan Hariyanto (2004), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan sarana penting dan menjadi kunci dalam pengembangan perikanan tangkap, dengan misi utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pusat data produksi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). TPI merupakan urat nadi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap yang ikut menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan usaha dan kesejahteraan nelayan (Wiyono, 2005).

Adanya TPI diharapkan mengurangi atau menghilangkan monopoli pihak-pihak tertentu. Kehidupan nelayan yang tidak didukung oleh kemampuan dana, mengakibatkan mereka tetap terjerat pengijon. Kebutuhan dan kehidupan nelayan ditentukan para pengijon, mulai dari sarana penangkapan ikan hingga kebutuhan rumah tangga disediakan oleh pengijon secara kredit, dan harus dibayar oleh nelayan dari hasil ikan yang diperoleh dalam beberapa angsuran (Sawitri, 1997).

TPI kalau ditinjau dari manajemen operasi, maka TPI merupakan tempat penjual jasa pelayanan antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan

mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagang ikan atau pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan. Nelayan ingin menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga sebaik mungkin, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu, diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai, sehingga masing-masing pihak tidak merasa di rugikan (Manullang, 2009).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), selain merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga menjadi tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya TPI adalah menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Disamping itu, secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar (Manullang, 2009).

Menurut Widayati (2008), Volume dan nilai produksi yang dilelang di suatu TPI akan mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh :

- a. Jumlah dan kualitas karyawan TPI. Jumlah dan kualitas karyawan TPI pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan proses dan pelayanan lelang agar dapat berjalan lancar, sehingga ikan sampai di konsumen masih dalam kualitas yang baik. Oleh karenanya faktor yang menentukan banyaknya karyawan TPI adalah volume produksi ikan yang dilelang.
- b. Jumlah dan kapasitas bakul. Banyaknya bakul akan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis komoditas ikan yang dilelang di suatu TPI. Apabila jenis ikan yang dilelang adalah komoditas ekspor dan dalam jumlah yang besar, maka bakul yang terlibat lelang adalah bakul dengan modal besar. Sebaliknya jika komoditas ikan yang dilelang konsumsi lokal dan jumlahnya sedikit, maka bakul yang terlibat akan terbatas

dan modal kecil. Jumlah dan kapasitas bakul tersebut diharapkan akan mampu membentuk harga ikan yang optimal.

- c. Kelengkapan fasilitas penanganan hasil tangkapan selama proses lelang, seperti *handling space*, ketersediaan air bersih, fasilitas pendingin dan sebagainya. Kelengkapan fasilitas dari suatu TPI akan mampu mempertahankan mutu ikan, sehingga harga ikan akan dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini akan merangsang nelayan untuk melelangkan hasil tangkapannya di TPI tersebut.

Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pengelolaan TPI yang baik serta professional akan memotivasi para nelayan untuk menambah dan mengembangkan usahanya di bidang perikanan.

### **2.1.2. Konsep Pengelolaan TPI**

Menurut UU No 31/2004 tentang perikanan, pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Sedangkan menurut Rencana Strategis (RENSTRA) Dep. KP 2005-2009 untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, ada beberapa kegiatan pokok yang akan dilakukan, antara lain pengembangan sarana dan prasarana perikanan, pengembangan sistem rantai dingin hasil laut dan ikan, intensifikasi pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan pasar ikan higienis. Dengan langkah-langkah strategis tersebut di harapkan tingkat kemakmuran nelayan tidak tertinggal oleh para pedagang (Rokhani, 2009).

Upaya pemanfaatan potensi pesisir dan lautan sebagai motor andalan dalam memutar roda perekonomian daerah pasca penetapan UU Otonomi Daerah sudah banyak dilakukan di seluruh wilayah pesisir, hal serupa juga telah disuarakan oleh pemerintah daerah. Dasar Hukum :

1. Undang-undang RI No. 9Th. 1985 tentang perikanan.
2. Kep.Ment Kelautan dan Perikanan No. KEP 10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan

Selain itu dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 maka pemerintah daerah berhak mengelola 4 mil $\times$ 65 km panjang pantainya (Helmi, 2008).

Dalam kegiatannya, penanggung jawab pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada Dinas Perikanan dan kalautan atau organisasi nelayan dalam bentuk koperasi di tingkat daerah.

Setiap kegiatan yang dilakukan di TPI oleh Pemerintah Daerah ditarik iuran bernama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, biaya ini dipungut atas pembayaran pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Obyek dari retribusi adalah Tempat Pelelangan Ikan dan subyek dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

Besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah sebesar 5% dari nilai lelang, dengan perincian sebagai berikut:

1. 3% dipungut dari nelayan
2. 2% dipungut dari bakul (pemenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan).

(Wikipedia, 2006)

Pada dasarnya sistem dari Pelelangan Ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawaran tertinggi (Susilowati dkk, 2005).

Dalam aspek pelelangan, yang lebih penting adalah sistem pelelangannya. Tujuan sesungguhnya daripada sistem pelelangan di daerah produksi adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual ikan hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan nelayan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Pelelangan ikan diselenggarakan oleh penyelenggara lelang secara terbuka diantara penjual dan pembeli yang dilakukan di tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak baik untuk nelayan maupun pedagang. Keuntungan bagi nelayan menurut IKIP, (1986) dalam Amin (2005) adalah :

- Nelayan dapat menjual dengan harga terbaik
- Dalam pelelangan ikan berlaku sistem bersaing, dimana harga ditentukan atas penawaran dan permintaan sehingga nelayan mempunyai bargaining position yang bagus terhadap pedagang atau tengkulak
- Pelelangan ikan dapat digunakan sebagai stabilator harga, dalam arti kalau harga turun dan dianggap merugikan nelayan, penyelenggara pelelangan dapat ikut membeli ikan untuk mempertahankan harga
- Ikan dapat cepat terjual
- Nelayan tidak perlu menjajakan sendiri hasil produksinya yang akan membutuhkan tenaga dan waktu lebih
- Nelayan tidak perlu menjajakan sendiri hasil produksinya yang akan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih

Sedangkan untuk pedagang/tengkulak keuntungannya antara lain : mereka mendapatkan ikan dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar, lebih cepat mencari barang sebagai dagangan, dan dapat menyediakan barang secara kontinyu.

Secara sederhana, aliran kegiatan dalam TPI dimulai dengan pengangkutan ikan ke TPI, dilanjutkan dengan berbagai aktivitas lainnya seperti pertimbangan, pemberian es, pengepakan sampai kepada distribusi atau pengangkutan ke pasar atau industri pengolahan.

Hasil tangkapan yang dibongkar dari kapal ikan, mengalami serangkaian proses seperti sortasi, pencucian, penimbangan, penjualan dan pengepakan di mana pasar atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Setelah itu, ikan dikeringkan sebagian untuk konsumsi lokal dalam bentuk segar, sebagian lainnya ke tempat pembukuan ikan untuk diawetkan.

Apabila letak gedung TPI atau daerahnya tidak tepat, kelengkapan fasilitas seperti sistem tatanannya secara tidak baik, maka kelancaran operasi di gedung TPI itu tidak mungkin berlangsung. Terlebih lagi penanganan ikan yang tidak tepat seperti seperti itu, sering

menimbulkan pengaruh merusak kesegaran dan harga ikan. Dalam merancang suatu pelabuhan, sebuah rencana yang tepat untuk gedung. Dalam merancang suatu pelabuhan, sebuah rencana yang tepat untuk gedung pelelangan merupakan faktor yang meningkatkan “Nilai Ekonomi”, untuk pelabuhan itu. Jadi jelaslah bahwa gedung pelelangan merupakan bagian inti dari seluruh sarana darat di pelabuhan perikanan (Pedoman pengelolaan pelabuhan perikanan, 2002).

### **2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan**

Adapun fungsi dari TPI Prigi menurut keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2003 Bab II, Pasal 3 adalah : menjamin kelestarian sumberdaya alam, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, memberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat nelayan, peningkatan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah), pusat data eksplorasi perikanan dan sumberdaya laut lainnya (Rokhani, 2009).

Fungsi/peranan TPI secara umum dalam suatu wilayah/lokasi pangkalan pendaratan ikan adalah sebagai : Pusat pendaratan ikan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengumpulan data statistik perikanan, pengembangan kegiatan nelayan dalam pemasaran hasil produksinya, pertemuan penawaran dan permintaan ikan, pembinaan kesejahteraan nelayan serta peningkatan pendapatan daerah (Kep. Bupati Trenggalek No. 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek).

Menurut petunjuk Operasional, fungsi TPI antara lain adalah:

- a. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.
- b. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
- c. Mempermudah pengumpulan data statistik.

Tugas dari pengelola TPI yang sesungguhnya adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan di TPI untuk mencapai tujuan yang diharapkan antara lain:

1. Meningkatkan animo masyarakat nelayan untuk melakukan transaksi jual beli di TPI.
2. Meningkatkan jumlah pedagang pengumpul atau grosir yang menangani hasil tangkapan.
3. Meningkatkan fungsi dan peranan KUD sebagai organisasi ekonomi dan mampu bertindak sebagai penyangga pemasaran.

Manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI antara lain adalah:

- a. Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen.
- b. Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.
- c. Adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi (bea) lelang.
- d. Pengembangan Koperasi Unit Desa

Maksud dan tujuan diadakannya TPI adalah :

1. Memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan lelang
2. Mengusahakan stabilitas harga ikan
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
4. Meningkatkan pendapatan daerah.

(Helmi, 2008).

Menurut Manullang (2009), adanya struktur organisasi pada lingkungan kerja dapat memberikan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta kedudukan masing-masing pelaksana, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pekerjaan yang dapat menghambat kelancaran pencapaian tujuan.

Struktur organisasi penyelenggara atau pelaksana pelelangan ikan di TPI pada umumnya terdiri dari:

1. Pimpinan Pelelangan, tugasnya antara lain adalah memimpin dan mengkoordinir kegiatan pelelangan ikan sehari-hari.

2. Juru tulis atau tenaga administrasi pelelangan ikan, tugasnya antara lain membuat catatan dan laporan kegiatan pelelangan meliputi jumlah kapal, produksi ikan, nilai produksi dan bea lelang serta melaksanakan kegiatan tata usaha pelelangan termasuk surat-menyurat.
3. Juru Lelang, tugasnya antara lain adalah melaksanakan tata pelelangan secara terbuka, mengumumkan pemenang lelang dan mencatat dalam buku catatan khusus mengenai pemilik ikan, pedagang atau pembeli pemenang lelang, jumlah dan jenis ikan yang dilelang serta besarnya nilai lelang.
4. Juru timbang, tugasnya adalah melaksanakan penimbangan ikan yang masuk TPI dan memberi label atau nota yang berisi mengenai nama pemilik ikan, jenis dan berat ikan yang telah ditimbang.
5. Kasir (Bendahara Khusus), tugasnya adalah menagih atau menerima uang lelang secara tunai kepada atau dari pedagang atau pembeli yang melaksanakan pelelangan, jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam karcis lelang. Tugas lainnya adalah menyetorkan hasil pungutan bea lelang kepada Pemda Tingkat I dan Pemda tingkat II. Penyetoran tersebut langsung diberikan kepada pemegang kas Pemda setempat. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik bendaharawan khusus, juru tulis atau administrasi, juru lelang maupun juru timbang bertanggungjawab kepada pimpinan pelelangan ikan.

#### **2.1.4. Konsep Efektivitas**

Konsep efektivitas merupakan salah satu kajian yang sangat penting, karena secara umum konsep efektivitas merupakan konsep untuk mengukur produktivitas. Efektivitas sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dengan pengertian efisiensi. Efisiensi

mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas adalah pencapaian suatu tujuan.

Efektivitas menurut Effendy (1989) adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitasnya adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Susanto (1975) efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya tertumpu pada pencapaian tujuan. Usaha pencapaian tujuan agar dikatakan efektif sangat terkait erat dengan kinerja pekerja atau orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sulistiyani (2003), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.

Kinerja menurut William, Castetter (1981) sebagaimana yang dikutip oleh Sedarmayanti (2009), menyatakan bahwa beberapa organisasi untuk mengetahui tingkat kinerja (personil yang tidak efektif) dan sumber utama kinerja yang tidak efektif adalah dengan memperhatikan atau menilai beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1. Beberapa Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja (Pegawai yang tidak efektif)

Faktor Organisasi	Faktor Individu	Faktor Sosial
<p><b>A. SELAMA BEKERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlambatan</li> <li>▪ Kehadiran</li> <li>▪ Pelatihan</li> <li>▪ Penurunan produktivitas</li> <li>▪ Perombakan rencana atau jadwal</li> <li>▪ Peningkatan tanggung jawab kepengawasan</li> <li>▪ Kekeliruan dan ketidakefisienan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaruh karier</li> <li>▪ Pengaruh kemampuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketidakpuasan klien</li> <li>▪ Hubungan masyarakat</li> <li>▪ Kredibilitas dan abilitas sistem untuk memberikan pelayanan efektif</li> </ul>
<p><b>B. DI LUAR PEKERJAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan investigasi</li> <li>▪ Semangat</li> <li>▪ Rekrutment</li> <li>▪ Seleksi dan penempatan</li> <li>▪ Kekurangan biaya</li> <li>▪ Perombakan rencana atau jadwal</li> <li>▪ Kompensasi sebenarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaruh sosial</li> <li>▪ Pengaruh keluarga</li> <li>▪ Pengaruh psikologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kekurangan dalam hal kualitas pelayanan pendidikan</li> <li>▪ Hasil gagal diperoleh sesuai dengan standar</li> </ul>

Sumber : William, Castetter (1981) dalam Sedarmayanti (2009)

Masih menurut William, Castetter (1981) sebagaimana yang dikutip oleh Sedarmayanti (2009), Sumber utama kinerja yang tidak efektif dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Sumber Utama Kinerja yang Tidak Efektif

Individu	Organisasi	Lingkungan Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelemahan intelektual</li> <li>▪ Kelemahan psikologis</li> <li>▪ Demotivasi</li> <li>▪ Faktor personalitas</li> <li>▪ Keuangan</li> <li>▪ Preparasi jabatan</li> <li>▪ Orientasi nilai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem</li> <li>▪ Peranan kelompok</li> <li>▪ Perilaku pengawas</li> <li>▪ Iklim organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keluarga</li> <li>▪ Kondisi ekonomi</li> <li>▪ Kondisi politik</li> <li>▪ Kondisi hukum</li> <li>▪ Nilai sosial</li> <li>▪ Pasaran kerja</li> <li>▪ Perubahan teknologi</li> <li>▪ Perserikatan</li> </ul>

Sumber : William, Castetter (1981) dalam Sedarmayanti (2009)

### 2.1.5. Konsep Keberdayaan

Prinsip pemberdayaan memberikan alasan bahwa setiap tahap kegiatan perencanaan, dilaksanakan dengan kapasitas, yaitu memfasilitasi pengembangan pendidikan dan kelembagaan desa. Proses pemberdayaan dan kapasitas ini tidak lain adalah proses pembelajaran penduduk dan kelembagaan desa agar memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya desa. Proses ini perlu difasilitasi oleh fasilitator (Surochiem, 2001)

Pada awal kegiatan, peranan fasilitator masih cukup besar, tetapi peranan tersebut akan berangsur-angsur surut dengan bertambah berdayanya penduduk dan kelembagaan desa. Dan pada akhirnya berperan sebagai fasilitator jarak jauh. Jadi 3 kunci peran serta adalah kesadaran dan kemauan untuk dating, ikut aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Konsepsi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai salah satu efek dari pembangunan hanya menjadikan masyarakat sekedar menjadi obyek semata menuju masyarakat yang benar-benar menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Strategi pembangunan yang sejalan dengan itu

adalah pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat (*People Centered Development*) khususnya masyarakat yang selama ini paling tidak diuntungkan oleh hasil-hasil pembangunan (Surochiem, 2001).

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, social dan ransformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Menurut Uphof dalam Indah Susilowati, dkk (2004), pemberdayaan diartikan sebagai berikut :

*“ empowerment is particularly challenging because of inhenrent ambiguity and elusiveness of what is to be measured. It can be argued with justification that empowerment does not really a reflection of other things that do exist. While this does not mean that we can not measure empowerment...”* “Power” to identify what are kinds of power based proposed by political scientists and economist over many years. He concluded there are six categoies of resources or asset that can ce accumulated and utilized tho achieve objectives (1) economics (2) Social, (3) political, (4) informational; (5) moral, and (6) physical.

Menurut Moelyarto dalam Wahono dkk (2001) pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata “*empowerment*” yaitu, sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Kartasasmita dalam Surochiem (2001) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan baru pembangunan, yaitu *people centered, participatory, empowering and sustainable*. Konsep ini tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*) dimana upaya yang dilakukan akan diarahkan langsung kepada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamiskan potensinya, pendek kata memberdayakannya. Dengan demikian rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan

demikian dapat diartikan pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia (Soetomo, 2006). Dalam kaitan dengan potensi manusia yang perlu diaktualisasikan agar dapat terpenuhi kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, didalamnya terkandung tiga nilai, yaitu kelestarian hidup, harga diri dan kebebasan (Korten dalam Soetomo, 2006).

Dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas pengelola TPI dalam pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi peluang terjadinya eksploitasi oleh kelompok lain.

## **2.2. Kerangka Berfikir**

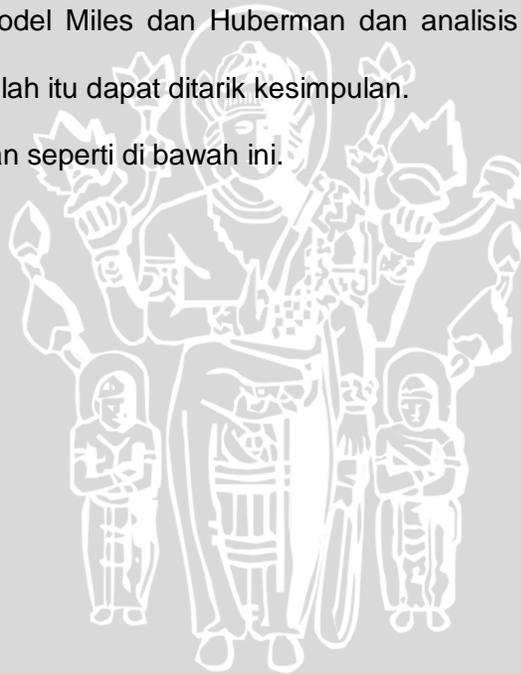
Alur penelitian pada penelitian ini dimulai dengan adanya masalah. Masalah timbul karena adanya gap atau kesenjangan antara teori dan keadaan empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keberdayaan Pengelola TPI merupakan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai keberdayaan pengelola TPI dalam sejumlah aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

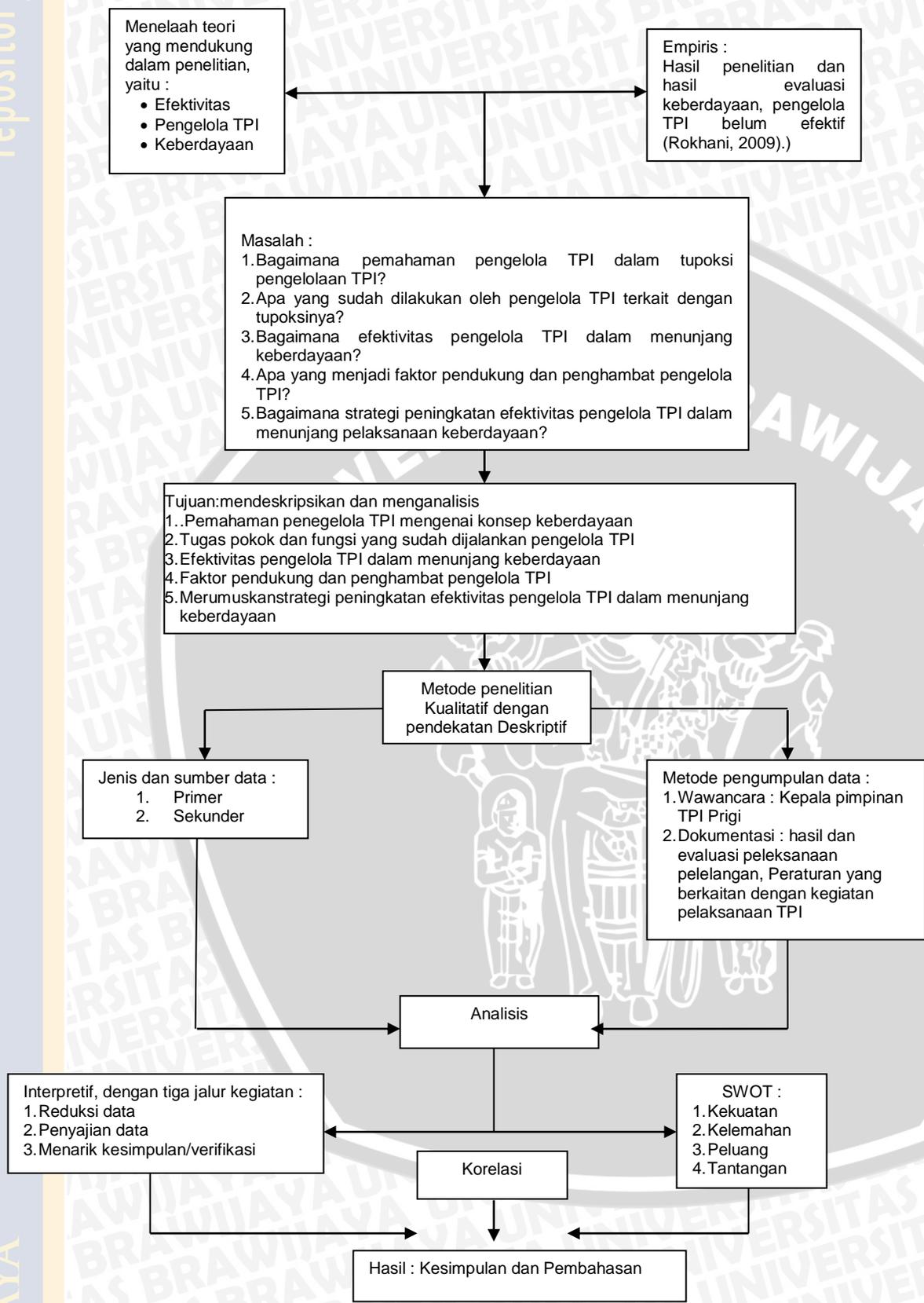
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibentuklah TPI dengan landasan hukum Undang-undang RI No. 9Th. 1985 tentang perikanan. Kep.Ment Kelautan dan Perikanan No. KEP 10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan dan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka pemerintah daerah berhak mengelola wilayah pesisirnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka kinerja para pengelola TPI harus lebih efektif dan dalam rangka menunjang keberdayaan pengelola TPI.

Dari data empiris diketahui bahwa pengelola TPI belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur yang ditunjuk untuk menggerakkan TPI. Oleh karena adanya kesenjangan tersebut maka penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan. Untuk menjawab permasalahan maka disusunlah tujuan penelitian. Dari tujuan tujuan penelitian kemudian ditentukan metode penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang mempengaruhi efektivitas pengelola TPI dalam menunjang keberdayaan pengelola TPI. Dengan metode pengumpulan data melalui FGD, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan alat analis interpretif model Miles dan Huberman dan analisis SWOT. Hasil analisis kemudian dikorelasikan dan setelah itu dapat ditarik kesimpulan.

Alur penelitian dapat digambarkan seperti di bawah ini.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

### 2.3. Definisi Operasional

Berdasarkan pada teori dan konsep yang penulis ajukan dalam penelitian ini maka variabel penelitian dan definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas, didefinisikan sebagai pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Indikatornya adalah dilihat dari produk yang telah dihasilkan, kualitas dari pekerjaannya dan tercapainya tujuan.
2. Pengelolaan TPI, pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada Dinas Perikanan dan kalautan atau organisasi nelayan dalam bentuk koperasi di tingkat daerah. Pengelolaan TPI yang baik serta professional akan memotivasi para nelayan untuk menambah dan mengembangkan usahanya di bidang perikanan.
3. Keberdayaan, didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada bulan Maret-Juni 2012.

### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan fakta-fakta, fenomena dan permasalahan untuk dapat diungkapkan. Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan yang dilaksanakan oleh pengelola TPI. Dalam penelitian ini peneliti juga akan mengungkapkan fenomena tentang pengelolaan TPI akan konsep efektivitas dan keberdayaan dan apa yang telah dilakukan oleh pengelola TPI dalam usaha menjalankan TPI serta efektivitas pengelola TPI dalam menunjang keberdayaan pengelola TPI di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai dua tujuan, pertama membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Mungkin data cukup menarik tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan (Moleong, 2002).

Dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas tugas pokok dan fungsi pengelola TPI dalam rangka menunjang tingkat keberdayaan pengelola TPI di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Secara rinci, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menggali informasi mengenai pemahaman konsep pengelolaan TPI, hal ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan tentang konsep pengelolaan TPI dan harus dijawab oleh pengelola TPI.
2. Mencari informasi baik dari informan maupun dokumentasi mengenai pekerjaan yang telah dilakukan oleh pengelola TPI terkait dengan tupoksinya.
3. Efektivitas pengelola TPI dalam rangka menunjang keberdayaan pengelola TPI di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dinilai dari :
  - a. Faktor individu
  - b. Faktor organisasi
  - c. Lingkungan eksternal, yang di lihat baik selama bekerja dan di luar pekerjaan.
4. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas pengelola TPI dalam melaksanakan tugasnya di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur yang dilihat juga dari dari 3 aspek, yaitu :
  - a. Faktor individu
  - b. Faktor organisasi
  - c. Faktor lingkungan eksternal

5. Menyusun strategi peningkatan efektivitas pengelola TPI, untuk menentukan strategi atau langkah apa yang perlu dilakukan agar pengelola TPI dapat lebih efektif dalam menunjang keberdayaan pengelola TPI.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1. Jenis Data

Sumber data berupa seseorang, peristiwa, dokumen (hal atau benda) yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Data diperoleh dengan cara *focus group discussion* (FGD) dan wawancara dengan beberapa orang PNS dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang memiliki pengetahuan tentang konsep pengelolaan TPI serta dengan beberapa pengelola TPI.
2. Data sekunder, merupakan data yang bersumber di luar kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini, seperti dokumen-dokumen peraturan daerah, topografi desa, laporan, brosur, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

#### 3.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data data primer yang di dapat dari FGD, wawancara, dan data sekunder yang di dapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari :

### 1. Person / Informan

Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis dan berupa data aktual yang di dapat dari penelitian di lapangan, yang diperoleh peneliti langsung dari subyek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Sebagai informan awal dipilih secara purposive dengan pertimbangan menguasai permasalahan yang akan di teliti, yaitu :

- a. Kepala PPN Prigi
- b. Pimpinan TPI Prigi
- c. Pengelola TPI Prigi
- d. Anggota TPI (nelayan dan pedagang)

### 2. Peristiwa

Data yang diperoleh melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola TPI dalam menjalankan tugas. Peristiwa ini dapat disikapi sebagai kejadian yang muncul dalam proses pelaksanaan tugas pengelolaan TPI. Termasuk didalamnya rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan TPI.

### 3. Paper / Dokumen

Data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, usulan penelitian, media masa, dan sumber lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Hal ini diperlukan sebagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan dan legitimasi hukum. Dokumen yang diperlukan meliputi :

- a. Keputusan Bupati Trenggalek tentang pembentukan susunan tata kerja TPI

- b. Keputusan Bupati Trenggalek tentang penyelenggaraan pelelangan ikan
- c. Keputusan Bupati Trenggalek tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara :

#### 1. FGD (*Focus Group Discussion*)

FGD adalah adalah diskusi dengan peserta terbatas yang berasal dari satu kelompok tertentu dan dengan topik bahasan diskusi tertentu pula. Menurut Bungin (2007) teknik FGD ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu.

Lebih lanjut dalam Bungin (2007), pertimbangan menentukan siapa yang terlibat dalam FGD berkaitan dengan beberapa hal, yaitu :

- a. Keahlian atau kepakaran seseorang dalam kasus yang akan didiskusikan
- b. Pengalaman praktis dan kepedulian terhadap fokus masalah
- c. "Pribadi terlibat" dalam fokus masalah
- d. Tokoh otoritas terhadap kasus yang akan di diskusikan
- e. Masyarakat awam yang tidak tahu menahu dengan masalah tersebut, namun ikut merasakan persoalan sebenarnya

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber dalam FGD adalah Kepala PPN Prigi, Pimpinan TPI. Kemudian yang menjadi peserta dalam FGD adalah para pegawai atau staf di TPI.

#### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung dengan informan, bertujuan untuk mendapatkan data primer yaitu data mengenai tugas pokok dan fungsi pengelola TPI dalam menunjang tingkat keberdayaan pengelola

TPI dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan TPI secara keseluruhan di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

### 3. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dan teknik dokumentasi diperlukan terutama untuk memperoleh data sekunder, misalnya berupa catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan, penyajian dan berguna bagi sumber data serta membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap afektivitas pengelola TPI dalam menunjang pelaksanaan TPI di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

#### 3.6. Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pemahaman pengelola TPI dalam tupoksi pengelolaan TPI, hal pertama yang akan dilakukan adalah memberikan daftar pertanyaan kepada pengelola TPI untuk dijawab. Setelah mendapatkan jawaban dari daftar pertanyaan yang telah diberikan dan semua data yang diperlukan telah terkumpul maka akan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ke dua, apa yang sudah dilakukan oleh pengelola TPI terkait dengan tugas dan fungsinya, disini penulis akan mempelajari dokumen dan menggali informasi dari informan. Kemudian data yang sudah didapat akan di analisis dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ke tiga, yaitu bagaimana efektivitas pengelola TPI dalam menunjang pelaksanaan TPI di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, hal pertama yang dilakukan

adalah dengan membuat pertanyaan dari masing-masing kriteria atau indikator efektivitas, menurut William (1961) dalam Sedarmayanti (2009) pengukuran pegawai yang tidak efektif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : faktor organisasi, faktor individu, dan faktor sosial. Dari ketiga kategori tersebut, dibagi lagi menjadi 2, yaitu : selama bekerja dan diluar pekerjaan. Sedangkan untuk mengukur kinerja yang tidak efektif menurut William (1961) dalam Sedarmayanti (2009) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : individu, organisasi, dan lingkungan eksternal. . Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji masing-masing faktor untuk menilai kinerja pegawai yang tidak efektif, maka dibuat daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh informan. Dari pertanyaan yang dibuat, akan dijadikan panduan pertanyaan dalam proses pengumpulan data, wawancara dan dokumentas. Setelah data terkumpul maka diteruskan dengan menganalisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dari data yang di dapat sedikit demi sedikit dari lapangan dicatat secara rinci dan teliti. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan apabila ada data-data yang belum diperoleh dapat langsung diteliti.

#### 2. Penyajian Data

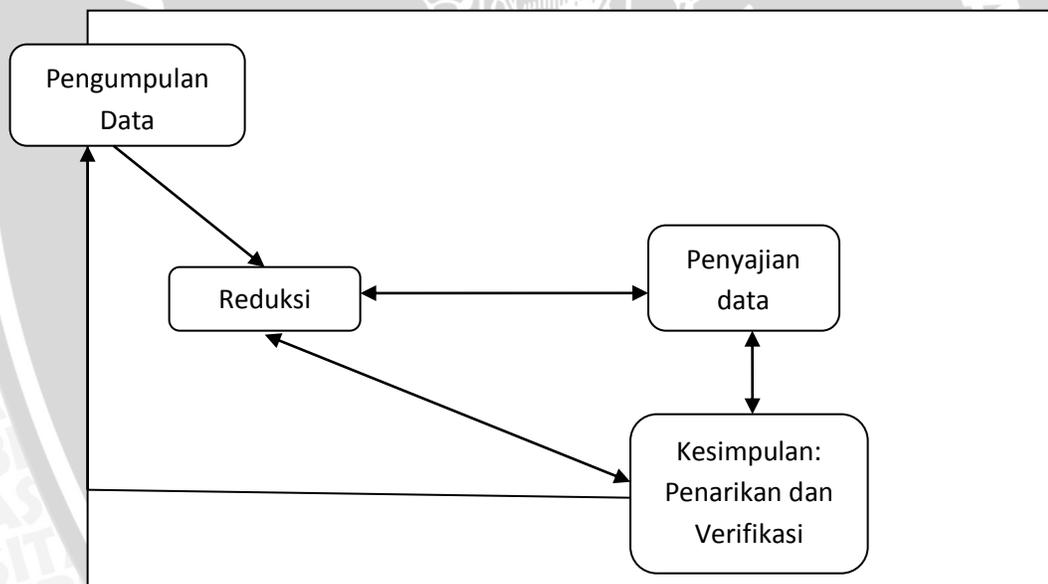
Mendisplay data dimaksudkan agar lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, maupun *flowchart*. Biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif.

### 3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan pada kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

Tahapan analisa dalam penelitian yang diungkapkan menurut Miles dan Huberman (1992) dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Miles dan Huberman (1992)

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data, Model Interaktif

Tujuan penelitian yang ke empat dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat pengelola TPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor pendukung dan penghambat di sini dilihat dari aspek individu, organisasi dan lingkungan eksternal.

Dari masing-masing faktor akan dibuat dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam proses pengumpulan data kepada informan dan dipakai sebagai bahan untuk memperkaya bahan diskusi dalam FGD. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan hal yang sama seperti tujuan penelitian pertama, kedua dan ketiga yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk tujuan penelitian yang ke lima data dan informasi yang diperoleh di lapangan baik berupa data hasil FGD, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunity), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) dengan faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Menurut Rangkuti (2003) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

Analisis SWOT tidak hanya dipakai dalam perusahaan, tetapi juga dapat dipakai oleh semua kalangan termasuk pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dalam penelitian ini analisis SWOT digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan pengelola TPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang keberdayaan pengelola TPI di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Adapun tahapan pengisian matriks faktor strategi internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dalam kolom 1 yaitu : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (tabel faktor-faktor kekuatan, peluang dan ancaman).

- b. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2 mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting).
- c. Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat baik), sampai dengan 1 (di bawah rata-rata) berdasarkan pengaruh faktor tersebut.
- d. Mengalihkan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4, dimana hasilnya bervariasi mulai dari 4,0 (sangat baik) sampai dengan 1,0 (dibawah rata-rata).
- e. Gunakan kolom 5 untuk komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- f. Jumlah skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan.
- g. Selanjutnya memasukkan semua faktor strategi internal, faktor eksternal dan membuat kemungkinan strategi dari pengelolaan berdasarkan pertimbangan kombinasi 4 (empat) sel faktor strategis tersebut.

Tabel 3. Faktor–faktor Kekuatan (Strengths)

No	Faktor Kekuatan
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst.	

Tabel 4. Faktor-faktor Kelemahan (Weakness)

No	Faktor Kelemahan
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst.	

Tabel 5. Faktor-faktor Peluang (Opportunities)

No	Faktor Kelemahan
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst.	

Tabel 6. Faktor-faktor Ancaman (Threats)

No	Faktor Kelemahan
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst.	

Dari hasil penelitian di lapangan yang ada, akan di dapatkan faktor-faktor strategis internal berupa matriks IFAS (Internal Startegic Factors Analysis Summary) dan faktor-faktor strategis



eksternal berupa matriks EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) yang akan di investarisasi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Matriks IFAS (Internal Strategic Factors Summary)

No	Aspek	Bobot	Rating	Score	Komentar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>Faktor Kekuatan</b>				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah Faktor Kekuatan				
<b>B.</b>	<b>Faktor Kelemahan</b>				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah Faktor Kelemahan				
	Total Faktor Internal	1,00			
	Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = S – W = x				



Tabel 8. Matriks EFAS (External Strategic Factors Summary)

No	Aspek	Bobot	Rating	Score	Komentar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>Faktor Peluang</b>				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah Faktor Peluang				
<b>B.</b>	<b>Faktor Ancaman</b>				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah Faktor Ancaman				
	Total Faktor External	1,00			
	Selisih Total Peluang – Total Ancaman = O – T = y				

Selanjutnya data yang diperoleh dari IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) adalah :

No	Jumlah Score Faktor Internal	Jumlah Score Eksternal
1.	S	O
2.	W	T
	Selisih Jumlah Score S – W = x	Selisih Jumlah Score O – T = y

Berdasarkan konsep analisis internal (IFAS) dan analisis eksternal (EFAS) di atas, kemudian di analisis kekuatan dan kelemahan baik dari faktor internal dan eksternal dalam sebuah matriks yang menggambarkan kondisi keterkaitan satu sama lain seperti dalam matriks berikut :

Tabel 9. Matrik SWOT

IFAS \ EFAS	Strengths (S)	Weakness (W)
Opportunity (O)	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>
Treaths (T)	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p>

Sumber : Rangkuti (2003)

Gambar 3. Matriks SWOT

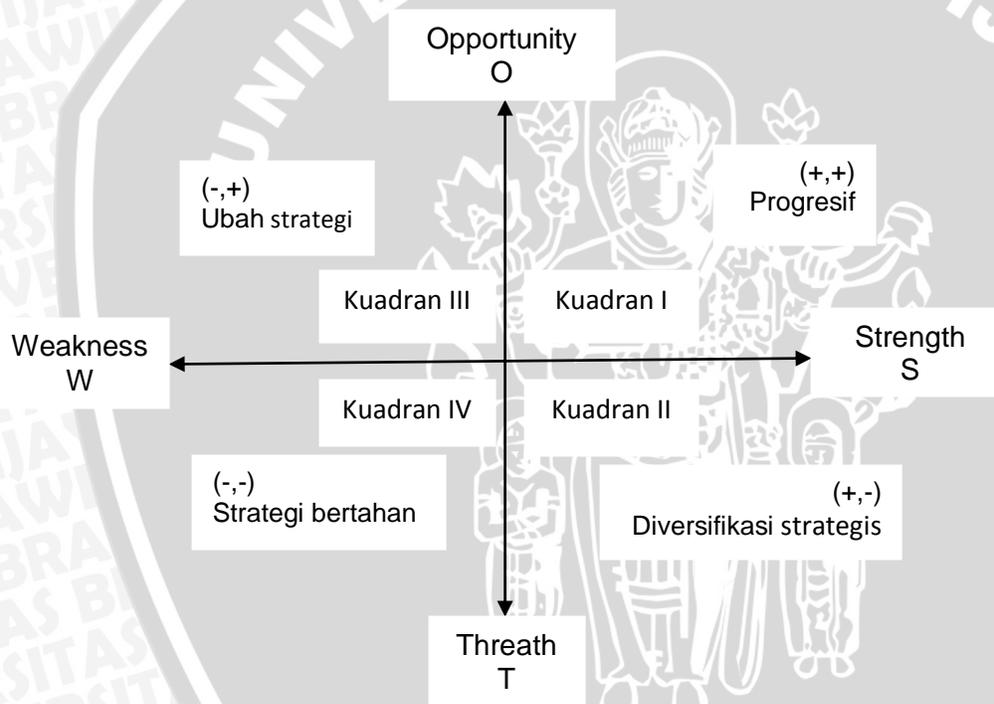
Penjelasan dari formulasi startegis SWOT di atas, sebagai berikut :

- **Strategi SO :**  
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- **Strategi WO :**  
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- **Strategi ST :**  
Ini adalahstrategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- Strategi WT :

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kualitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya adalah mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x, y) pada kuadran SWOT seperti yang terdapat pada gambar berikut



Gambar 3. Kuadran SWOT Pearce dan Robinson

Arahan strategi peningkatan efektivitas pengelola TPI salam menunjang keberdayaan di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, pada dasarnya adalah menindaklanjuti hasil analisis SWOT yang dilakukan. Oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu hasil analisis SWOT yang menunjukkan pada posisi dan kuadran berapa serta bagaimana yang harus dihadapi.

Berdasarkan posisi tersebut, selanjutnya akan di ketahui strategi apa yang harus dilakukan oleh pengelola TPI agar dapat lebih efektif dalam menunjang keberdayaan pengelola TPI di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

### 3.7. Keabsahan Data

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat criteria keabsahan data yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut

#### 1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukuran benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

##### a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

##### b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

##### c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (*Internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

4. Keajegan (*Reabilitas*)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

## BAB IV

### KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Letak Geografis dan Topografis Desa Tasikmadu

Kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi terletak di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang dibangun di atas lahan seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 11,5 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak di Teluk Prigi pada posisi koordinat  $111^{\circ} 43' 58''$  BT dan  $08^{\circ} 17' 22''$  LS, yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak ke ibu kota Propinsi (Surabaya) adalah  $\pm 200$  km, dan jarak ke ibu kota Kabupaten (Trenggalek) adalah  $\pm 47$  km.

Tinggi daerah Watulimo sekitar 299 meter dari permukaan laut. Suhu perairan Watulimo rata-rata  $27^{\circ}$  C. Sedangkan keadaan curah hujan pertahun di wilayah Watulimo berukuran kecil, oleh karena itu hanya berfungsi sebagai sarana pengairan sawah.

Iklm di wilayah Watulimo adalah iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada Bulan April sampai Bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan Oktober sampai Bulan April.

Kecamatan Watulimo terbagi atas 5 desa pantai, yaitu Desa Tasikmadu, Desa Karanggandu, Desa Prigi, Desa Prigi, Desa Margomulyo, dan Desa Sawahan. Dari kelima Desa tersebut, Desa Tasikmadu adalah desa yang berbatasan langsung dengan Pantai Prigi.

Desa Tasikmadu terletak pada posisi koordinat  $8^{\circ} 17' 43''$  LS dan  $8^{\circ} 24' 25''$  LS serta  $111^{\circ} 43' 08''$  BT. Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 37 RT. Luas wilayah dari Desa Tasikmadu sekitar 2.845,743 Ha. Adapun batas-batas dari Desa Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- Batas sebelah utara : Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung
- Batas sebelah timur : Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung

- Batas sebelah selatan: Samudera Indonesia
- Batas sebelah barat : Desa Prigi, Kecamatan Watulimo

Secara umum kondisi Topografi Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pegunungan kapur selatan dengan rata-rata ketinggian tiga meter diatas permukaan laut. Struktur tanahnya sangat bagus untuk tanaman jati, selain itu juga digunakan untuk area persawahan yang banyak terdapat di bagian utara Desa Tasikmadu.

Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit berbatu karang. Teluk ini dinamakan Teluk Prigi yang mempunyai kedalaman 6 – 45 meter..

#### **4.2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

Berdasarkan data dari kantor kelurahan Desa Tasikmadu Jumlah penduduk sampai bulan Oktober 2010 sekitar 10.378 orang dengan komposisi 5.135 orang penduduk laki-laki dan 5.243 orang penduduk perempuan.

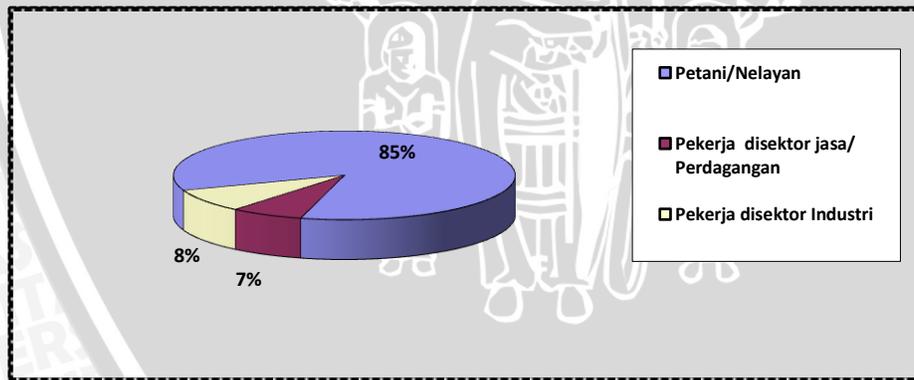
Keadaan penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan tingkat pendidikan sudah relatif cukup tetapi tamatan sekolah dasar masih mendominasi, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tamat sekolah dasar mencapai 31.36% dari jumlah penduduk wilayah tersebut. Ada juga yang tidak tamat SD 0,75%, Sedangkan tamatan SMP sebesar 27,88%, tamatan SMA sebesar 49,25%, D1 sebanyak 0.04%, D2 sebanyak 0,05%. D3 sebanyak 0.09%, S1 0,94% dan S2 sebanyak 0,02%, Dan S3 sebanyak 0,1%. Maka masih perlu adanya peningkatan SDM yang lebih tinggi, karena ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi perkembangan usaha pada sektor perikanan yang ada di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	9 Orang	0,10 %
2.	Penduduk yang tidak tamat SD/Sederajat	78 Orang	0,88 %
3.	Penduduk tamat SD/ Sederajat	3.255 Orang	36,8
4.	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	2.803 Orang	31,6 %
5.	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	2.582 Orang	29,1%
6.	Penduduk tamat D-1	4 Orang	0,04 %
7.	Penduduk tamat D-2	5 Orang	0,05 %
8.	Penduduk tamat D-3	9 Orang	0,10 %
9.	Penduduk tamat S-1	97 Orang	1,09 %
10.	Penduduk tamat S-2	2 Orang	0,02 %
11.	Penduduk tamat S-3	1 Orang	0,01 %
Total		8.845 Orang	100 %

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu (2011)

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Desa Tasikmadu sebagian besar bermata pencaharian disektor petani/nelayan, jumlah petani/nelayan di Desa Tasikmadu yaitu sebanyak 5.922 orang, pekerja disektor jasa/ perdagangan sebanyak 481 orang, dan pekerja disektor industri sebanyak 597 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tasikmadu  
 Sumber: Kantor Desa Tasikmadu, 2011

Dari data kependudukan Desa Tasikmadu didapatkan bahwa jumlah petani petani lebih banyak dari pada nelayan. Hal ini disebabkan karena pada musim tanam mereka banyak turun sebagai sebagai petani, pemilik, penggarap maupun buruh tani. Setelah selesai musim tanam mereka menjadi ABK dengan istilah yang mereka pakai *ngadim*.

Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk Desa Tasikmadu beragama Islam sebanyak 10.237 orang kemudian agama Kristen sebanyak 40 orang, dan agama Hindu sebanyak 1 orang. Untuk menunjang kegiatan keagamaan terdapat sarana peribadatan yaitu masjid dan mushola serta gereja. Di Desa Tasikmadu sering diadakan kegiatan keagamaan antara lain seperti yasinan yang diadakan secara bergiliran dan setiap sore anak-anak mengaji di langgar. Hal ini membuktikan keagamaan di lingkungan mereka berjalan secara rutinitas sehingga melekat dalam kegiatan mereka sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka.

#### **4.3. Keadaan Umum Perikanan**

##### **4.3.1. Kegiatan Usaha Perikanan**

Kegiatan usaha perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi baik bidang penangkapan maupun pengolahan pada umumnya masih bersifat tradisional. Pada tahun 2011 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pelabuhan masih sedikit jumlahnya. Selain Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Prigi (PPPS Cabang Prigi) kegiatan perusahaan perikanan yang sudah menginvestasikan usahanya di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah :

- a. PT. Prima Indo Bahari Sentosa mempunyai fasilitas cold storage sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing-masing 500 ton serta fasilitas Air Blast Freezer (ABF) sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing – masing unit 6 Ton.
- b. PT. Bumi Mina Jaya bidang usaha pengolahan hasil perikanan dan pabrik tepung ikan yang menggunakan bahan baku ikan teri, lemuru dan layang yang mengalami penurunan harga akibat melimpahnya hasil produksi.
- c. PT. Sumber Pangan Nasional mempunyai fasilitas 1 unit cold storage dengan kapasitas 70 ton serta fasilitas ABF 1 unit dengan kapasitas 8 Ton.

Kegiatan usaha perikanan tangkap yang tergolong usaha kecil dan menengah terdiri dari 688 unit usaha yaitu :

- 1) Usaha perikanan purse seine berjumlah 159 unit;

- 2) Usaha perikanan jaring insang berjumlah 43 unit;
- 3) Usaha perikanan payang berjumlah 38 unit;
- 4) Usaha perikanan pukat pantai berjumlah 38 unit;
- 5) Usaha perikanan pancing ulur berjumlah 271 unit;
- 6) Usaha perikanan pancing tonda berjumlah 86 unit
- 7) Usaha perikanan jaring klitik berjumlah 53 unit.

#### 4.3.2. Musim Penangkapan Ikan

Musim ikan di PPN Prigi pada Tahun 2012 terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember dengan musim puncak pada bulan Oktober. Pada bulan-bulan tersebut terjadi kenaikan produksi bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, hal ini dipengaruhi oleh musim, angin dan arus laut.

#### 4.3.3. Jumlah Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap

Jumlah nelayan pada tahun 2011 berkurang menjadi 6.588 orang dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 6.724 orang, hal ini disebabkan berkurangnya alat tangkap pukat pantai dari 41 unit menjadi 38 unit. Jumlah nelayan berdasarkan alat tangkap dapat dilihat berikut ini pada Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah nelayan menurut alat tangkap PPN Prigi tahun 2007-2011

NO	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Nelayan/Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pukat Cincin	3.000	3.000	3.750	3.925	3.975
2.	Pancing Tonda	360	360	360	430	430
3.	Jaring Insang	129	129	129	129	129
4.	Payang	576	576	608	608	456
5.	Pancing Prawe	108	108	0	0	0
6.	Pukat Pantai	1.008	1.008	1.008	984	950
7.	Pancing Ulur	546	546	542	542	542
8.	Jaring Klitik	106	106	106	106	106
	Jumlah	5.833	5.833	6.503	6.724	6.588

Sumber : Laporan Tahunan PPN Prigi, 2011

Kapal-kapal nelayan umumnya belum dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi yang memadai sehingga nelayan sering bekerja berdasarkan naluri (insting) dan pengalaman saja. Alat-alat keselamatan juga sangat terbatas bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali sehingga ancaman melaut sering menghadang mereka. Pada umumnya nelayan tersebut merupakan nelayan tradisional dengan latar belakang pendidikan dan penguasaan teknologi yang minim sehingga sering produktifitas mereka sangat rendah dan hasil usaha penangkapan ikan di laut yang tidak pasti serta posisi tawar yang rendah juga merupakan masalah bagi nelayan.

#### 4.3.4. Produksi Perikanan

Upaya meningkatkan produksi perikanan terus diupayakan baik melalui kegiatan penyuluhan maupun kegiatan lain yang mendukung peningkatan produksi perikanan. Perkembangan produksi hasil tangkapan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 12. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2007-2011

No.	Tahun	Volume (Kg)	Keterangan
1	2007	22.332.000	-
2	2008	26.355.000	Naik 18,01%
3	2009	23.571.671	Turun 10,56%
4	2010	7.676.236	Turun 67,43%
5	2011	40.896.857	Naik 432,77%

Sumber : Laporan Tahunan PPN Prigi, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 produksi perikanan yang didaratkan adalah 40.896.857 kg atau 112.046 kg per hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 maka jumlah produksi perikanan tahun 2011 mengalami Kenaikan 432.77 % atau 33.220.621 kg. Kenaikan ini disebabkan karena musim penangkapan ikan terjadi dari bulan

Juni sampai dengan Nopember dibanding dengan tahun 2010 musim penangkapan ikan hanya bulan April dan Agustus dikarenakan cuaca yang kurang baik.

Volume jenis ikan yang terbanyak didaratkan di PPN Prigi adalah ikan Tongkol krai, Lemuru, Tuna madidihang, Cakalang, Layang Deles dan Ubur-ubur. Jumlah produksi jenis ikan dominan adalah Layang deles 19.542.593 kg atau 47.79% dengan nilai produksi Rp. 70.661.129.550,-, sedangkan sisanya atau ikan jenis lainnya adalah sebesar 21.354.264 kg atau 52.21% dengan nilai produksi Rp. 113.031.565.600 ,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2011

No.	Jenis Ikan	Volume (kg)	Nilai (Rp.)
1.	Layang deles	19.542.593	70.661.129.550,-
2.	Tongkol krai	12.949.739	87.199.062.750,-
3.	Lemuru	2.345.179	4.753.730.000,-
4.	Cakalang	717.189	6.761.309.850,-
5.	Tuna madidihang	338.841	4.482.420.550,-
6.	Layur	287.950	871.420.900,-
7.	Ikan lainnya	7.060.545	13.717.351.550,-
Jumlah		40.896.857	183.692.695.150,-

Sumber : Laporan PPN Prigi, 2011

Produksi hasil perikanan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010, kondisi ini disertai pula dengan kenaikan nilai produksi perikanan. Nilai produksi perikanan di PPN Prigi pada tahun 2011 adalah Rp. 183.692.695.150,- lebih besar bila dibandingkan nilai produksi tahun 2010 yaitu Rp. 45.641.521.000,-

#### 4.3.5 Pemasaran Ikan

Produksi hasil tangkap di wilayah PPN Prigi dipasarkan dalam kondisi segar dan dalam bentuk hasil olahan seperti pengeringan /penggaraman, pemindangan, pengasapan, ikan beku dan tepung ikan. Daerah pemasaran wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu di kota

Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Surabaya, Malang, Madiun dan Surakarta. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Daerah Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2011

No.	Tujuan	Ikan Segar (kg)	Ikan Olahan (kg)	Jumlah (kg)
1.	Trenggalek	2.031.330	491.538	2.522.868
2.	Tulungagung	1.584.165	2.604.372	4.188.537
3.	Surabaya	5.895.042	20.747.903	26.642.945
4.	Malang	0	3.006.739	3.006.739
5.	Jombang	0	1.863.815	1.863.815
6.	Nganjuk	0	1.198.965	1.198.965
7.	Madiun	0	846.028	846.028
8.	Surakarta	0	626.960	626.960
Jumlah		9.510.537	31.386.320	40.896.857

Sumber : Laporan Tahunan PPN Prigi, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemasaran produksi ikan terbesar adalah daerah Surabaya yaitu 26.642.945 kg atau 65,15% dengan pemasaran terbanyak berupa produksi ikan olahan sebesar 20.747.903 kg atau 62,17%. Sedangkan untuk kebutuhan lokal (Trenggalek) lebih banyak pemasaran dalam bentuk ikan segar sebesar 2.031.330 kg atau 4,27% dibanding ikan olahan sebesar 491.538 kg atau 1,15%.

Dari Tabel 14 dapat diketahui bahwa jumlah ikan yang dipasarkan sebagian besar adalah ikan olahan yaitu 31.387.185 kg atau 76,75% dari jumlah total produksi ikan 40.896.857 kg, yang terdiri dari ikan pindang 13.714.265 atau 33,53%, ikan kering/asin 8.465.046 kg atau 20,70%, ikan beku 636.029 kg atau 1,56%, ikan asap 75.946 kg atau 0,19% dan tepung ikan 8.495.899 kg atau 20,77%. Pemasaran produksi dalam bentuk ikan segar sebesar 9.509.672 kg atau 23,25%.

Tabel 15. Pengolahan Produksi Hasil Tangkap Tahun 2011

Bulan	Ikan Segar (kg)	Ikan Olahan (kg)					Jumlah (kg)
		Ikan Kering/Asin	Ikan Pindang	Ikan Asap	Tepung Ikan	Pembekuan	
Januari	41,9	37,6	68,8	2,859	0	0	151,2
Februari	156,8	0	0	5,846	0	0	162,7
Maret	163,7	0	0	7,123	0	0	170,8
April	99,5	0	69,04	6,528	0	0	175,1
Mei	124,6	0	46,7	11,195	0	0	182,5
Juni	853,8	0	870,8	7,631	495,352	0	182,5
Juli	1,649,7	1,751,8	2,564,09	8,317	715,289	238,4	2,227,6
Agustus	826,0	3,089,8	1,986,09	3,087	1,225,48	117,3	6,927,801
September	1,554,6	1,347,1	2,329,7	7,229	9	81,6	7,247,968
Oktober	2,316,5	1,549,8	3,040,8	6,663	1,034,34	74,7	6,354,658
Nopember	1,490,2	506,666	2,386,9	2,615	3,838,26	123,8	10,826,99
Desember	231,8	182	351,227	6,853	3	0	7
					1,187,16		5,697,439
					6		771,891
					0		
Sub Total (kg)	9,509,6	8,465,04	13,714,2	75,946	8,495,89	636,029	40,896,8
Total (kg)	9,509,6			31,387,185			40,896,8

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2011

#### 4.3.6. Lembaga Perikanan

##### a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi

Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.06/Men/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan telah ditetapkan

bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
2. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
3. pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan;
4. pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan;
5. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
6. pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya;
7. pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
8. pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan;
9. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi;
10. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
11. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fasilitas pelabuhan yang telah dibangun di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Berikut tabel rincian fasilitas pelabuhan.

Tabel 16. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

No.	Nama Fasilitas	Jumlah/Volume
I.	Fasilitas Pokok	
	1. Lahan : a. Tanah	11,5 Ha
	b. Kolam	15 Ha
	2. Kolam Pelabuhan : a. Sebelah Barat	7 Ha
	b. Sebelah Timur	8 Ha
	3. Break Water	710 m
	4. Dermaga	652 m
	5. Jalan Komplek	1.123,5 m
	6. Revetment	830 m
II.	Fasilitas Fungsional	
	1. Kantor	
	2. Gedung TPI : a. Sebelah Barat	655 m <sup>2</sup>
	b. Sebelah Timur	940 m <sup>2</sup>
	3. Pabrik Es	400 m <sup>2</sup>
	4. SPDN/BBM	20 ton/hari
	5. Tower Air	50 ton
	6. Bak Air	30 ton
	7. Bengkel	40 ton
	8. Jaringan Listrik PLN	120 m <sup>2</sup>
	9. MCK	250 KVA
	10. Pos Keamanan : a. Pos Satpam	90 m <sup>2</sup>
	b. Pos Terpadu	26 m <sup>2</sup>
	11. Telepon	120 m <sup>2</sup>
	12. Lampu Suar	7 unit
III.	Fasilitas Penunjang	4 unit
	1. Rumah Dinas	
	2. Guest House	4 unit
	3. BPN	1 unit
	4. Kios BAP	300 m <sup>2</sup>
	5. Gudang	54 m <sup>2</sup>
	6. Kios Tertutup	200 m <sup>2</sup>
	7. Kios Terbuka	16 unit x 24 m <sup>2</sup>
	8. Gudang Pengepakan	14 unit x 22,5 m <sup>2</sup>
	9. Kendaraan Dinas	180 m <sup>2</sup>
		6 Bh. Roda 2, 2 Bh. Roda 4

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2011

### c. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan, yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008. Kemudian dengan adanya perubahan kelembagaan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 menyebabkan perubahan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 15 September 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 130 TPI sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

#### **d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 Tanggal 4 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

##### **1. Kedudukan**

- Tempat Pelelangan Ikan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan.
- Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **2. Tugas Pokok**

Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

##### **3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

- Pelaksana kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan
- Pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan.
- Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan.
- Pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas :

- Kepala Tempat Pelelangan Ikan, dengan fungsi sebagai manager dan administratur
- Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Lelang, Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Kepegawaian
- Kepala Sub Bidang terdiri dari 4 Juru yaitu : Buku, Lelang, Timbang, Loket

#### 4.4. Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Trenggalek dibangun sejak Tahun 1976, pembangunan TPI dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Propinsi Jawa Timur. Landasan hukum pelaksanaan TPI adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 (Perda 5 Tahun 1975). Pelaksanaan TPI Prigi di Watulimo pada tahun 1976 diserahkan penyelenggaraannya kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Tani Sempurna. Kegiatan pelelangan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya kendala,

sehingga pada tahun 1998 keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri perihal penghapusan pungutan yang bersifat memberatkan masyarakat. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dalam menyikapi adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut akhirnya menerbitkan Peraturan Daerah baru yaitu Perda Nomor 14 Tahun 1998 yang diistilahkan pelaksanaan Pasar Grosir. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan TPI yang dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Tani Sempurna, sangat kurang memuaskan bagi para pengguna TPI maupun Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun 2000 sampai 2003 penyelenggara pelelangan ikan dikelola oleh Koperasi Nelayan Teluk Prigi (Sinati) dan KBN. Sinati adalah koperasi yang merupakan manifest dari para juragan/pemilik alat tangkap purse seine, sedangkan KBN adalah Koperasi Bakul Nelayan. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka kewenangan TPI sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Berkaitan dari hasil pengelolaan TPI oleh Koperasi Nelayan Teluk Prigi (Sinati) kurang optimal, maka pada tanggal 1 Mei 2003 Bupati Trenggalek menunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sebagai penyelenggara TPI secara swakelola. Dalam masa transisi penanganan TPI dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2003 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sudah ada peningkatan dari jumlah ikan yang dilelang maupun dari segi pendapatan retribusinya. Pada tahun 2004 penanganan TPI dikukuhkan dengan pola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004. maka TPI Prigi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek hingga sekarang.

Adapun fungsi TPI Prigi menurut keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah : menjamin keberlanjutan sumber perikanan, pemberdayaan kapasitas dan partisipasi masyarakat khususnya nelayan, peningkatan kontribusi PAD (pendapatan asli daerah), pusat data eksplorasi perikanan dan sumberdaya laut lainnya.

Pada tahun 2010 jumlah ikan yang dilelang di TPI Prigi adalah sebanyak 2.323.564 kg dengan nilai harga sebesar Rp 11.284.602.000,00 dengan rincian jenis-jenis ikan yang dilelang sebagai berikut :

Tabel 17. Jenis-jenis Ikan Yang Dilelang Di TPI Prigi Pada Tahun 2011

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1.	Kwee	43.854	306.075.000
2.	Cakalang	363.949	2.153.524.000
3.	Tongkol	1.264.931	6.520.102.000
4.	Tuna	92.612	741.515.000
5.	Kembung	2.099	11.446.000
6.	Peperek	24.475	92.204.000
7.	Layang	68.855	332.559.000
8.	Lemuru	439.016	909.468.000
9.	Cucut	6.560	38.652.000
10.	Julung-julung	296	1.628.000
11.	Slengseng	1.147	6.876.000
12.	Layur	15.157	166.487.000
13.	Lemadang	613	4.066.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.323.564</b>	<b>11.284.602</b>

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan, 2011

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa jenis ikan terbanyak yang dilelang di TPI Prigi adalah Tongkol, Cakalang, dan Lemuru yang merupakan jenis ikan pelagis yang menjadi hasil tangkapan utama nelayan purse seine. Hal ini karena alat tangkap purse seine di Prigi mendominasi alat tangkap yang ada.

Masyarakat pengguna TPI mempunyai kewajiban membayar retribusi 5% yang terdiri atas 3% dibebankan kepada pemilik ikan/nelayan dan 2% dibebankan kepada pembeli ikan. Adapun perkembangan retribusi dari TPI Prigi selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini :

Tabel 18. Perkembangan Retribusi TPI Prigi Selama Tahun 2010-2011

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
2010	1.000.000.000	58.430.475	5,84
2011	350.000.000	277.830.000	79,683

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan, 2011

Target retribusi pevelangan ikan pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan realisasi perolehan retribusi pevelangan ikan sebesar Rp 58.430.475,- (5,84 %) dan telah disetor ke kas daerah. Target retribusi tahun 2011 Rp 350.000.000,- dan realisasi hasil perolehan retribusi pevelangan ikan sebesar Rp 277.830.000,-. Pencapaian target penerimaan retribusi pevelangan ikan pada tahun 2010 dan tahun 2011 tidak tercapai, namun pada tahun 2011 realisasi penerimaan retribusi telah mengalami peningkatan walaupun masih belum mencapai target.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Proses Pelelangan Ikan di TPI Prigi

Mekanisme pelelangan ikan di TPI Prigi yakni waktu lelang disesuaikan dengan waktu pendaratan. Kapal ikan yang akan merapat di dermaga PPN Prigi harus melapor di Pos Keamanan untuk mendapatkan nomor urut lelang dan melakukan pembongkaran hasil. Ikan mulai dibongkar oleh ABK, disortir sesuai dengan jenis dan mutunya, ditempatkan di fish basket yang disediakan oleh TPI. Ikan diturunkan dari kapal dan ditimbang kemudian ditata di lantai lelang oleh petugas angkut ikan yang dikoordinir oleh kepala bidang lelang. Ikan dilelang setelah semua ikan hasil tangkapan satu kapal masuk disesuaikan dengan nomor urut lelang. Penyelenggaraan lelang ikan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Tetapi sampai saat ini di TPI Prigi yang mengikuti proses lelang kebanyakan masih bakul lokal saja. Calon pembeli diberikan kesempatan dalam waktu yang cukup untuk meneliti atau mengamati ikan yang akan dilelang, agar calon pembeli dapat menentukan harga. Selanjutnya ikan dilelang dan disesuaikan dengan nomor urut lelang. Setelah lelang, nelayan mendapat karcis lelang yang telah dihitung oleh juru hitung dan diberi SPU (Surat Penagihan Utang), kemudian di bayar melalui juru loket TPI (kasir) dengan dipungut 3% dari jumlah transaksi lelang. Pedagang/bakul membayar dari jumlah transaksi lelang ditambah retribusi sebesar 2%. Namun kenyataannya penarikan retribusi ini tidak berjalan secara efektif, nelayan dan pedagang masih mangkir dalam melakukan kewajibannya membayar retribusi. Selesai proses administrasi, ikan yang telah dibeli segera dibawa keluar oleh pedagang dengan faktur pembelian/ karcis ikan keluar dari TPI.

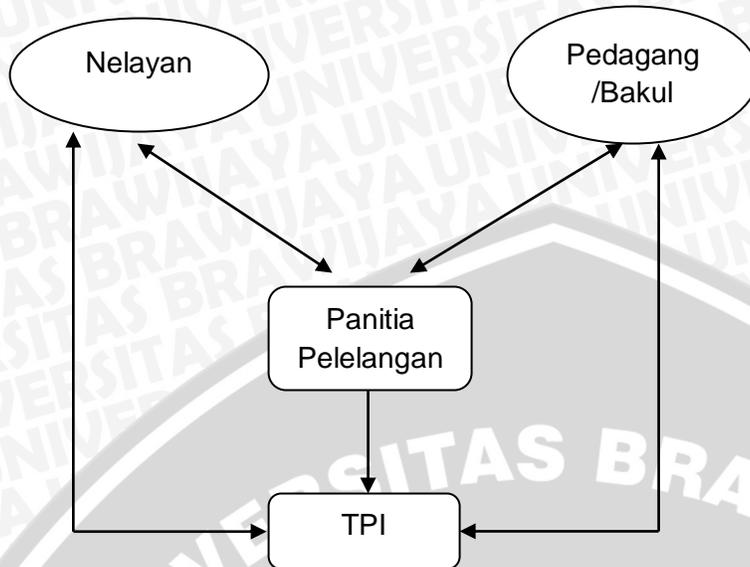
Dalam pelaksanaan lelang di TPI Prigi tentunya juga diperlukan Teknis Pengamanan. Dalam hal ini langsung dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Teknis Pengamanan, yang mana

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tempat Pelelangan Ikan. Pelaksana Teknis Pengamanan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pengamanan.
- b. Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap kapal ikan yang akan merapat ke dermaga.
- c. Melaksanakan pendaftaran dan penertiban kegiatan pembongkaran ikan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan tim keamanan terpadu atau unit keamanan lain dalam pengamanan dan penertiban pelaksanaan pelelangan ikan dan kelestarian sumberdaya perikanan.
- e. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Di TPI Prigi tidak semua hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi di proses melalui sistem pelelangan, hal ini biasanya tergantung jenis ikan atau alat tangkap yang digunakan. Seperti hasil perikanan dari alat tangkap pancing dan gill net tidak melalui proses pelelangan, karena jumlahnya yang relatif sedikit. Sedangkan untuk alat pancing purse seine dilakukan melalui pelelangan.

Secara sederhana komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pelelangan hasil perikanan di TPI Prigi dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 5. Alur pelelangan ikan di TPI Prigi

Untuk memperoleh data mengenai kegiatan pelelangan ikan di TPI Prigi, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan. Informan tersebut antara lain : 4 pegawai TPI (yang terdiri dari Kepala TU yaitu : EY; dan pegawai TPI Prigi: EJ, HK, STN); dan 2 nelayan/pemilik kapal yaitu : JI, BYT. Pada umumnya TPI adalah tempat nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya melalui sistem lelang untuk memperoleh harga dengan sebaik-baiknya. Apakah yang terjadi pada proses pra pelelangan, pelelangan dan pasca pelelangan? Pembahasannya sebagai berikut.

### 5.1.1. Pra Pelelangan

Proses pertama yang dilakukan adalah proses bongkar muat di pelabuhan hingga ikan tiba di TPI. Ikan diangkut dari kapal hingga ke tempat pelelangan dengan di pikul oleh 2 orang, dan pemikul ini adalah tenaga lepas yang biasanya dibayar Rp 5.000,00 /keranjang. Hal yang cukup menarik adalah ketika ikan akan dibawa dari kapal ke tempat pelelangan, banyak sekali pemapak (penjemput) yang mengaku sebagai keluarga dari ABK dengan seenaknya mengambil ikan bahkan itu juga dilakukan oleh para pemikul ikan. Berikut tanggapan narasumber mengenai keamanan di TPI Prigi melalui wawancara dengan Narasumber EY (50) :

“ Kalo masalah pencurian itu udah budaya mbak, di sini setiap ada ikan di daratkan yang mesti selalu ada pencurian.. Ya pernah jga kita panggil pencurinya itu kita dudukan di kantor lalu kita ajak bicara, tapi ya setelah itu tetap saja dilakukan.. Sebenarnya TPI itu tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh di back-up dari polisi, pol air, dan orang-orang pelabuhan untuk menata parkir”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Narasumber lain HK (47). Beliau mengungkapkan hal-hal berikut:

“Masalah pencurian itu sudah lama ada, sejaknya berdirinya TPI Prigi memang sudah ada. Pihak TPI sebenarnya jga sudah melakukan pengamanan dengan adanya satpam, tapi memang itu saja tidak cukup. Kita perlu bantuan dari pihak-pihak lain untuk pengamanan di TPI”.

Setelah ikan sampai di tempat pelelangan ikan, ikan di timbang oleh juru timbang yang kemudian dicatat di karcis dan kemudian di berikan kepada nelayan. Kemudian ikan di perlihatkan kepada calon pembeli yang terlebih dahulu sudah mendaftarkan dirinya sebagai peserta lelang. Pembeli berhak melakukan pengecekan terhadap kondisi ikan agar mereka dapat menentukan harga yang sesuai.

### **5.1.2. Proses Pelelangan**

Kegiatan pelelangan biasanya dilakukan oleh banyak calon pembeli dan hanya 1 penjual, pelelangan biasanya menghasilkan harga tertinggi dari berbagi penawaran calon pembeli.

Pada dasarnya sistem pemasaran hasil perikanan di TPI melalui sistem pelelangan. Namun sistem pelelangan di TPI Prigi bukan melalui lelang murni, karena harga yang diperoleh bukan berdasarkan harga penawaran tertinggi dari pedagang. Harga yang dicapai adalah harga hasil kesepakatan antara nelayan dengan pedagang. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan EY (50) :

“..Kalo di TPI Prigi memang sejak awal berdirinya TPI Prigi sudah bukan melalui sistem lelang murni.. Jadi kita sulit untuk merubah kebiasaan seperti itu”.

Hal sama juga diungkapkan oleh STN (49) :

“Sistem pelelangan di TPI Prigi memang bukan melalui lelang murni, tetapi berdasarkan hasil kesepakatan antara nelayan dengan pedagang. Kalo musim ikan, kekuasaan penentu harga ada di pedagang, kalo musim paceklik penentu harga ada di tangan nelayan. Di sini jga seperti ada peraturan ridak tertulis, bahwa pedagang luar prigi tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan di sini, dan sebaliknya juga seperti itu”.

Berdasarkan hasil penelitian pemegang kendali dalam penentuan harga ada di tangan pedagang. Keberadaan TPI yang seharusnya menjadi tempat penyelenggaraan pelelangan ikan agar nelayan dapat memperoleh harga sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi TPI tidak berjalan dengan optimal. Dalam hal ini pihak nelayan yang dirugikan. Dan seperti adanya peraturan tidak tertulis bahwa pedagang dari luar kota tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan di TPI Prigi, mereka harus melalui perantara dari pedagang lokal jika ingin membeli hasil perikanan di PPN Prigi dan sebaliknya pedagang dari TPI Prigi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan di luar Prigi. Keadaan ini menyebabkan harga yang ada di TPI Prigi kurang optimal.

Dari aturan tata cara pelelangan dengan jelas diatur bahwa penjualan dilakukan dengan satuan berat, dan adanya jaminan harga yang layak karena pelelangan dilakukan dengan tawaran meningkat dan penawar dengan harga tertinggi sebagai pemenang. Disamping itu, terbuka adanya persaingan diantara pembel maupun penjual sehingga mengurangi adanya monopoli pihak-pihak tertentu dalam pemasaran ikan (Sawitri, 1997).

### **5.1.3. Pasca Pelelangan**

Setelah nelayan dan pembeli telah mencapai kesepakatan harga, maka ikan sudah menjadi milik pedagang. Dan ikan diangkut ke tempat pedagang dengan menggunakan mobil pick-up, sebelum ikan di bawa keluar TPI pedagang diberikan surat tanda keluar dari TPI setelah pedagang melakukan pembayaran retribusi di loket.

Proses pembayaran transaksi antara pembeli dengan nelayan tidak selalu dibayarkan penuh, bahkan terkadang tunggakan itu bertambah setelah pelelangan ikan selanjutnya berlangsung. Seharusnya sisa pembayaran dari transaksi pelelangan ikan diberikan jatuh tempo dan pihak pembeli juga memberikan jaminan yg sesuai sebelum sisa pembayaran

tersebut di lunasi agar tidak membebankan nelayan. Berikut hasil wawancara dengan Narasumber BYT (43) sebagai nelayan/pemilik kapal :

“Seharusnya itu pihak TPI tanggap kalo ada permasalahan pembayaran, pembeli itu diberikan jatuh tempo misalnya 20 hari setelah proses transaksi dan perlu memberikan jaminan kalo sisa pembayaran itu belum lunas.. Jadi kalo selama 20 hari itu dia tidak bisa melunasi ya nelayan kan rugi. Seperti yang saya lihat di TPI Sendang Biru pembeli selalu menjaminkan rumahnya kalo mau beli ikan tapi nanti kalo sisa pembayaran sudah lunas ya jaminan itu dikembalikan”.

Hal yang cukup mengejutkan adalah Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, ternyata tidak dipatuhi oleh nelayan maupun pembeli. Pembeli hanya membayar retribusi berdasarkan jumlah keranjang yang dibelinya Rp 1.000,00/keranjang, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan pembeli untuk membayar sebesar 2% dari harga ikan yang diperolehnya. Dan nelayan ternyata juga tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi sebesar 3%, hal itu dikarenakan mereka merasa pihak TPI tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga mereka merasa tidak perlu membayar retribusi. Dan menurut mereka penarikan retribusi di TPI adalah ilegal karena Menteri Perikanan terdahulu Muhamamad Fadel telah membebaskan pembayaran retribusi di bidang perikanan, namun karena semua kebijakan kembali pada otonomi daerah masing-masing Kabupaten Trenggalek masih menetapkan pembayaran retribusi di bidang perikanan. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang narasumber JI (52) sebagai nelayan/pemilik kapal :

“Bagaimana kita mau bayar retribusi kalo pelayanan dari pihak TPI belum benar. Seperti ada permainan antara TPI dengan nelayan, juru timbang sengaja melebihkan hasil timbangan dari jumlah sebenarnya sehingga pedagang merasa tertipu”.

Berikut tanggapan pihak TPI mengenai keluhan-keluhan dari nelayan maupun pedagang, melalui hasil wawancara dengan narasumber EJ (46):

“Sebenarnya TPI sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk nelayan. Kita juga menyadari bahwa masi terdapat kekurangan, oleh karena itu kita perlu di bantu oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan”.

Pihak TPI merasa sudah berusaha memberikan pelayanan extra untuk membantu nelayan walaupun nelayan dan pedagang masi merasa kurang puas dengan pelayanan dari pihak TPI. Agar Penyelenggaraan TPI dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar maka TPI sangat membutuhkan bantuan dari stake holders lain.

## **5.2. Gambaran Pemahaman Pegawai TPI Prigi Tentang Konsep Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja suatu kemeterian negara/lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Dalam pelaksanaan pelelangan ikan, baik dipusat maupun di daerah harus didukung dengan prasyarat yang harus dipenuhi demi lancarnya pelaksanaan pelelangan ikan tersebut. Salah satu prasyarat dalam pelaksanaan pelelangan ikan di daerah adalah adanya penguatan kelembagaan. Kelembagaan yang pertama adalah adanya struktur dalam pemerintahan berupa badan, biro atau unit pemberdayaan pegawai sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keberadaan TPI di daerah ini ditegaskan dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 Tanggal 7 Maret 2003 tentang Penyelenggaran Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek. Menurut Keputusan Bupati Trenggalek ini, lembaga Penyelenggara TPI adalah Badan hukum yang bergerak di bidang perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Tim Pembina Penyelenggara TPI adalah Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati yang dibantu oleh Camat setempat. Kelembagaan Penyelenggara TPI sekurang-kurangnya terdiri dari : kepala TPI, dengan fungsi sebagai Manager dan Administartur; Kepala Bidang, terdiri dari Kepala bidang keuangan, Kepala bidang TU, Kepala bidang lelang, Kepala

bidang Jasa Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Keamanan, Kepala bidang perkreditan; Kepala sub bidang; Badan pengawas dan resolusi konflik; Juru tagih.

Adapun tugas pokok dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan Prigi adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

- Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

Dalam hal menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawabnya TPI Prigi menetapkan sebagai berikut:

- Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan adalah :

Melaksanakan tanggung jawab atas bimbingan teknis usaha perikanan baik terhadap peningkatan produksi oleh nelayan ataupun penanganan pasca panen. Melaksanakan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan teknis lelang. Melaksanakan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan pengaturan kesejahteraan nelayan dan tabungan nelayan. Menyediakan sarana kerja untuk kelancaran pelaksanaan lelang sebatas kemampuan anggaran Pemerintah. Melaksanakan pembinaan ketrampilan petugas lelang bekerjasama dengan Instansi terkait. Membuat laporan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Bupati.

- Tugas Pokok Kepala TPI :

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Melaksanakan penataan dan memeberikan pelayanan kepada nelayan, kapal perikanan, dan pelaku usaha lainnya. Memimpin dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi pelelangan dan pelaksanaan mekanisme pelelangan ikan. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di TPI. Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi pelelangan dan

pelaksanaan mekanisme pelelangan ikan. Bertanggung jawab atas ketertiban, kelancaran pungutan retribusi serta menyetorkan secara teratur. Mengatasi hambatan yang timbul agar tidak terjadi adanya stagnasi kerja (kevakuman petugas). Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam mendukung pengelolaan tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas dan fasilitas atas penyelesaian konflik diantara para nelayan, bakul, pihak terkait lainnya. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

- Tugas Pokok Kepala Bidang adalah :

Sebagai penanggung jawab pelaksana teknis dibidang masing-masing. Melaporkan hasil pekerjaan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Kepala TPI.

- Tugas Kepala Sub Bidang adalah :

Bertugas dan berperan membantu kepala bidang yang bersangkutan. Melaporkan hasil pekerjaan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Kepala Bidang.

- Tugas Pokok Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah :

Melaksanakan tanggung jawab asistensi teknis dan pengendalian penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua tugas dan tanggung jawab penyelenggara TPI. Mengambil langkah tindak lanjut dari hasil asistensi, pengendalian dan monitoring-evaluasi yang dilakukan. Membuat laporan tentang ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Bupati.

Sedangkan fungsi dari TPI berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 Tanggal 4 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek :

- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pelelangan ikan
- Penyelenggaraan tata usaha Tempat Pelelangan Ikan
- Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan

- Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan
- Pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelelangan ikan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Apabila kita lihat dari tugas-tugas pegawai TPI di atas, tugas tugas tersebut akan berat dan sulit dilaksanakan oleh pegawai TPI yang belum memiliki tingkat pemahaman yang baik tentang konsep penyelenggaraan TPI. Apalagi jika tidak di dukung oleh kepala unit kerja (kepala dinas/badan) yang juga sebagai anggota kelompok kerja pegawai TPI.

Paham diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran atau pandangan mengenai suatu konsep atau hal tertentu. Seseorang dikatakan paham apabila dia mengerti akan suatu hal dan memiliki konsep yang jelas akan hal tersebut. Dalam suatu kegiatan yang tentu saja melibatkan seseorang dalam pelaksanaannya, pemahaman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi faktor penting agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan pelelangan ikan, Pemahaman akan konsep penyelenggaraan pelelangan ikan merupakan faktor penting bagi seorang pegawai TPI agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemahaman yang baik akan mendukung seseorang menjadi lebih peka, terampil dan menimbulkan motivasi untuk bekerja lebih optimal. Sebagai salah satu prasyarat dari proses pelaksanaan pelelangan, pegawai TPI memiliki peran penting, karena pegawai TPI sebagai bagian dari kelembagaan yang harus dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai TPI mengenai konsep Tupoksi, maka disiapkan kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep

Tupoksi pegawai TPI. Kuesioner ini dibagikan kepada informan pada saat pelaksanaan wawancara. Adapun hasil dari kuesioner akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19. Pemahaman Informan Terhadap Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai TPI

No	Istilah / Konsep	Jumlah		Persentase (%)	
		Benar	Salah	Benar	Salah
1.	Tugas Pokok dan Fungsi	14	0	100	0
2.	Tujuan Tupoksi	10	4	71,4	28,6
3.	Tugas pokok pegawai TPI	14	0	100	0
4.	Fungsi pegawai TPI	14	0	100	0
5.	Manfaat TPI	12	2	85,7	14,3
6.	Tugas pokok Kepala TPI	14	0	100	0
7.	Tugas pokok Ka.Bid. Keuangan	14	0	100	0
8.	Tugas pokok Ka.Bid. TU	13	1	92,8	7,1
9.	Tugas pokok Kepala Urusan Teknik Lelang	14	0	100	0
10.	Tugas pokok Ka.Bid. Jasa Sarana dan Prasarana	11	3	78,6	21,4
11.	Tugas pokok Ka.Bid. Keamanan	14	0	100	0
12.	Tugas pokok Ka.Bid. Perkreditan	7	7	50	50
13.	Tugas pokok Tim Asistensi dan Pengendali	12	2	85,7	14,3

Sumber : Hasil penelitian, 2012

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan, konsep Tupoksi sudah sepenuhnya dipahami dengan benar. Mayoritas pegawai TPI telah memahami istilah tersebut hanya saja ada beberapa konsep tupoksi terutama tupoksi Ka.Bid. Perkreditan dimana 50% responden menjawab benar, hal ini dikarenakan struktur organisasi dari TPI Prigi sendiri tidak memiliki Ka.Bid. Perkreditan sehingga mereka tidak tahu apa tugas pokok dan fungsi dari Ka.Bid. Perkreditan dan selama ini TPI Prigi tidak pernah melayani perkreditan, yang mereka tahu tugas dari TPI adalah membantu nelayan untuk memasarkan hasil perikanan saja. Demikian

juga Tujuan tupoksi dan Tupoksi Ka.Bid. Jasa sarana dan Prasarana masing-masing 28,6% dan 21,4% responden menyatakan salah. Sedangkan untuk istilah tugas pokok dan fungsi, tugas pokok pegawai TPI, fungsi pegawai TPI, tugas pokok kepala TPI, tugas pokok Ka.Bid. keuangan, tugas pokok kepala urusan teknik lelang, tugas pokok Ka.Bid. keamanan informan menjawab dengan benar, hal ini dikarenakan pegawai TPI Prigi sudah paham dengan tupoksi dari bagian-bagian tersebut dan bagian-bagian tersebut sudah terdapat dalam struktur organisasi TPI Prigi. Selain dengan kuisisioner, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang narasumber HC (47) :

“Tugas pokok dan fungsi itu maksudnya tugas-tugas yang wajib dikerjakan dan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diserahkan kepada orang tersebut. Semua pegawai TPI sudah mengerti apa yang menjadi kewajiban dari masing-masing pegawai. Dan semua pegawai bukan hanya paham tetapi juga sudah dilakukan walaupun masih ada kekurangan”.

Hasil wawancara selanjutnya oleh UH (35), yaitu :

“TPI ini di dirikan untuk membantu nelayan, diharapkan melalui TPI dengan sistem lelang nelayan maupun pedagang dapat memperoleh harga yang sesuai dan tidak ada pihak yang dirugikan”.

Selanjutnya oleh MAS (50), bahwa :

“Fungsi TPI itu sebagai tempat berkumpulnya nelayan dan bakul, tempat terjadinya pendataan, meningkatkan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah)”.

Konsep Tupoksi sudah sepenuhnya dipahami dengan baik oleh informan. Karena berdasarkan pertanyaan atau kuesioner yang dijawab oleh informan, hanya terdiri dari dua pertanyaan yang menjawab salah. Berdasarkan hasil kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai TPI mengenai konsep Tugas pokok dan Fungsi pegawai TPI, dapat disimpulkan bahwa pegawai TPI sudah memiliki pemahaman dasar tentang konsep tugas pokok dan fungsi pegawai TPI. Hasil wawancara yang dilakukan pada setiap pegawai TPI hampir sama yaitu seperti yang dikatakan oleh JM (50), sebagai berikut ini :

“Pegawai TPI Prigi sudah paham dengan tupoksinya masing-masing. Bahkan kami kadang mengerjakan apa yang bukan menjadi bagiannya. Seperti tukang juru timbang yang berhalangan hadir, maka juru tulis juga bisa menggantikan posisi juru timbang

dengan baik. Namun masih adanya kendala-kendala yang membuat kami kurang optimal dalam melakukan pekerjaan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh RBU (46), salah seorang pegawai TPI Prigi :

“Pemahaman tupoksi dalam bekerja sangat penting dan pegawai TPI sudah mengerti dengan tupoksi masing-masing unit kerjanya. Karna tujuan dari tupoksi itu untuk mencapai target kerja.Tapi dalam pelaksanaannya tupoksi masih belum 100% di lakukan dengan baik, karena masih terdapat kendala”.

Pada dasarnya pegawai TPI Prigi sudah memahami dengan baik Tupoksi masing-masing unit kerja namun dikarenakan masih terdapatnya kendala-kendala maka Tupoksi tersebut belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut juga di sampaikan oleh SKI (49) dalam sesi wawancara, berikut ini hasil wawancara tersebut :

“Pegawai TPI sudah paham betul dengan tugas-tugas pokok yang harus di kerjakan dari masing-masing bagian. Walaupun pegawai TPI belum pernah mendapatkan pelatihan kerja penyelenggaraan pelelangan ikan baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun dari Dinas lain. Kita belajar itu melalui otodidak baca dari buku, dll”.

Berdasarkan hasil kuesioner dan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pegawai TPI sudah memahami mengenai konsep tugas pokok dan fungsi pegawai TPI. Karena hal ini nampak pada adanya kesadaran yang dimiliki oleh pegawai TPI, bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan TPI adalah membantu nelayan untuk memperoleh harga sebaik-baiknya.

Menurut Helmi (2008), Tugas dari pengelola TPI yang sesungguhnya adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Pemahaman akan konsep Tupoksi ini memang harus dimiliki oleh semua kalangan, terutama pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan sebagai agen pembangunan. Pegawai TPI dan pengambil kebijakan harus memiliki konsep yang jelas mengenai konsep ini. Sosialisasi dan advokasi harus terus diberikan kepada aparaturnya pemerintah agar kebijakan dan program-program pembangunan dapat menyentuh dan memberikan manfaat yang sama dan memperhitungkan kepentingan kedua belah pihak yaitu, nelayan dan pedagang.

### 5.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai TPI dalam Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Untuk memperoleh data mengenai Tupoksi pegawai TPI dalam pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Prigi, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan antara lain pegawai TPI Prigi yaitu EY, RHI, SJW, TS, STN dan nelayan/pemilik kapal yaitu JI dan BYT.

Tempat Pelelangan Ikan Prigi merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) ini bertugas melaksanakan tugas pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi administrasi umum, pengusahaan jasa dan fasilitas pelelangan ikan.

Tempat Pelelangan Ikan Prigi dipimpin oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

TPI Prigi sendiri dalam hal mengalokasikan sumberdaya, merumuskan dan menetapkan tugas, struktur organisasi, pelatihan, serta penempatan sumberdaya manusia pada posisi yang paling tepat. Dilakukan dan sepenuhnya diatur oleh Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 Tanggal 4 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 Tanggal 21 April tentang Organisasi dan Tata kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, terdiri dari Kepala UPTD TPI, Pelaksana Tata Usaha, Pelaksana Teknis Pelelangan, Pelaksana Teknis Keamanan.

Pegawai TPI Prigi berjumlah 19 orang, 4 orang PNS dan 15 orang pegawai tetap non PNS yang dulunya berasal dari pegawai Koperasi Nelayan Teluk Prigi (Sinati). Faktor sumberdaya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja. Tenaga kerja di TPI sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai Kepala UPTD TPI, 1 orang sebagai Kepala Tata Usaha, 2 orang sebagai Staff, 3 orang sebagai Juru Buku, 4 orang sebagai Juru Timbang, 1 Orang sebagai Kasir, 2 orang sebagai Juru Lelang, 4 orang sebagai Pengamanan, 1 orang sebagai

Juru Locket. Struktur organisasi yang terdapat di TPI Prigi memang masi belum sesuai dengan Keputusan Bupati

Apabila kita merujuk pada Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek Bab IV Pasal 16 yang isinya tentang Tugas Pokok Penyelenggara TPI terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala TPI, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Tim Pembina Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Tugas-tugas tersebut akan terasa berat dan sulit dilaksanakan oleh Pegawai TPI yang belum paham akan konsep penyelenggaraan pelelangan ikan. Apalagi jika tidak di dukung oleh kepala unit kerja (kepala dinas/badan) yang juga sebagai anggota kelompok kerja pegawai TPI. Mengenai beratnya tugas pegawai TPI ini di benarkan oleh EY (50), yang diutarakan pada saat pelaksanaan wawancara :

“..... tugas pegawai TPI bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karena kita harus melakukan penyadaran terhadap nelayan dalam pembayaran retribusi dan agar target PAD (pendapatan asli daerah) tercapai, sedangkan nelayan menganggap bahwa penarikan retribusi di TPI itu adalah ilegal itu yang membuat kita belum optimal dalam menjalankan tupoksi. Insentif juga sebenarnya berpengaruh dalam bekerja kita bekerja selama 24 jam, sedangkan gaji yang diterima pegawai TPI Prigi masih di bawah UMR Kabupaten Trenggalek yaitu sekitar Rp 280.000,00”.

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh RHI (35), berikut hasil wawancara :

“Di TPI itu pekerjaannya tidak mudah, apalagi kita harus stand by selama 24 jam di kantor. Kita juga sudah berusaha melayani nelayan dan pedagang dengan pelayanan yang extra tapi tetap saja masih dianggap kurang memuaskan. Di sini kita bekerja dengan harus mencapai target pendapatan retribusi, sedangkan kesadaran dari pihak nelayan maupun pedagang masih kurang.. Mereka masih seenaknya kalo bayar retribusi. Padahal gaji pegawai TPI ini dari hasil retribusi itu, kalo retribusinya sedikit ya gaji yang kita terima jga sedikit”.

Pihak penyelenggara TPI merasa sudah sangat maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap nelayan dan pedagang, namun sebaliknya nelayan dan pedagang merasa pegawai TPI tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mereka merasa tidak perlu untuk membayar retribusi. Kurangnya kesadaran dari pihak nelayan maupun pedagang dalam

membayar retribusi sangat memberatkan kinerja para pegawai TPI yang harus mencapai target dalam penarikan retribusi. Hal tersebut juga di benarkan oleh SJW (40) melalui hasil wawancara, berikut ini:

“Sebenarnya yang memberatkan pegawai TPI dalam bekerja itu adalah memberikan kesadaran kepada nelayan dan pedagang pentingnya membayar retribusi. Pedagang itu kalo bayar retribusi cuman Rp 1.000,00 / keranjang padahal ketentuannya 2% dari hasil pelelangan, sedangkan nelayan yang membayar retribusi jarang sekali kalau-pun ada bayarnya masih sesukanya”.

Keterangan yang disampaikan oleh SJW (40) sebagai narasumber dalam wawancara juga di benarkan oleh TS (45) bahwa pegawai TPI belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, seperti tergambar pada hasil wawancara berikut:

“Memang terus terang saja, pekerjaan di TPI ini sulit.. Sebenarnya kita paham tupoksi kita masing-masing kalo juru timbang ya berarti harus nimbang, juru loket berarti nanti yang mintain uang retribusi. Tapi pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karna nelayan dan pedagang saja susah kalo dimintain uang retribusi. Terus kalo masalah lelang murni itu ya bagaimana ya memang dari awal berdirinya sudah bukan lelang murni jadi sudah sekian tahun berjalan terus tiba-tiba harus diadakan perubahan itu ga gampang...”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh STN (43) :

“Pegawai TPI sebenarnya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun karena sempat ada wacana dari Menteri Perikanan dan Kelautan tentang pembebasan penarikan retribusi di bidang perikanan semenjak saat itu banyak nelayan yang tidak membayarkan kewajiban retribusinya. Padahal peraturan penyelenggaraan TPI berdasarkan otonomi daerah masing-masing dan menurut Peraturan Bupati Trenggalek penarikan retribusi di bidang perikanan tetap dilaksanakan. Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Prigi memang belum lelang murni, karena sejak berdirinya TPI Prigi sistem yang berlaku bukan melalui lelang murni, biasanya transaksi berdasarkan harga yang disepakati pihak nelayan dan pedagang”.

Peneliti tidak hanya menemui pegawai TPI saja, tetapi peneliti juga mewawancarai salah seorang nelayan/pemilik kapal JI (55), bahwa :

“Sebenarnya nelayan tidak keberatan memebayar retribusi kalo pelayanan yang diberikan juga baik. Kasus pencurian ikan saja masih marak terjadi, dan itu sangat merugikan nelayan tapi pihak TPI seakan tidak peduli dengan keadaan seperti ini”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BYT (43) :

“Nelayan dan pedagang bersedia membayar retribusi tetapi pelayanan yang diberikan juga harus sesuai dengan uang yang kita bayarkan. Jangan hanya mau menarik retribusi saja tapi pelayanan tidak diperhatikan, khususnya keamanan di TPI karena kasus pencurian masih banyak terjadi dan sangat merugikan nelayan yang sudah capek-capek melaut tapi seenaknya saja di curi”.

Berikut ini tanggapan salah seorang pegawai TPI Prigi EY (50 ) mengenai keluhan nelayan tentang keamanan di TPI Prigi :

“Pihak TPI sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani keamanan di TPI Prigi, kita juga pernah meminta bantuan dari pihak Tentara, Pol.air untuk menjaga keamanan waktu ada pendaratan ikan, tapi ternyata kurang efektif dan hanya menambah biaya saja, sehingga saat ini kami hanya menempatkan satpam saja sebagai keamanan. Kami juga pernah menangkap orang yang mencuri, kita dudukan di kantor lalu kita ajak bicara dan ternyata masih saudara dari ABK dan terkadang pemikul itu juga saat pemikul ikan merupakan kesempatan bagi dia untuk mengambil ikan. Kalo sudah begini pihak TPI yang repot selalu disalahkan dianggap tidak pernah bekerja, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kurangnya dukungan dari berbagai pihak (nelayan, pedagang dan pemikul) serta bantuan stake holders lain (pol.air, polisi, tentara) untuk membantu menangani masalah keamanan di TPI karena TPI tidak bisa berdiri sendiri”.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai TPI belum melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran dari nelayan dan bakul untuk membayar retribusi dan masih maraknya pencurian ikan yang meresahkan nelayan. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, masih adanya permainan harga antara pembeli dengan pegawai TPI. Selain keresahan itu dirasakan oleh pihak nelayan, pihak penyelenggara TPI juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa dikambing hitamkan atas kasus pencurian ikan, padahal pihak TPI telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mencegah kasus pencurian tersebut tetapi kurangnya dukungan dari berbagai pihak menyebabkan kasus pencurian tersebut tetap marak terjadi. Pihak TPI juga merasa sangat membutuhkan bantuan dari stake holders lain dalam menangani keamanan di TPI, karena pihak TPI merasa tidak bisa berdiri sendiri.

Menurut Manullang (2009), TPI kalau ditinjau dari manajemen operasi, maka TPI merupakan tempat penjual jasa pelayanan antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagang ikan atau pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan. Nelayan ingin menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga sebaik mungkin, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu, diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai, sehingga masing-masing pihak tidak merasa di rugikan.

#### **5.4. Efektivitas Pegawai TPI dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya**

Efektivitas menurut Effendy (1989) adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitasnya adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas pegawai TPI dalam menunjang pelaksanaan pelelangan ikan di Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah untuk mengetahui sejauh mana pegawai TPI dapat mensosialisasikan, mengadvokasi dan sampai dengan mewarnai program, kegiatan dan kebijakan di unit kerjanya menjadi responsif keberdayaan. Dalam penulisan ini efektivitas pegawai TPI dapat dilihat dari produktivitas atau hasil kerja yang telah dilakukan oleh pegawai TPI bagi pemberdayaan di unit kerjanya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pegawai TPI, maka disiapkan kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kinerja, yang terdiri dari dua bagian, yang pertama faktor untuk mengetahui tingkat kinerja (pegawai yang efektif), faktor ini di bagi menjadi dua yaitu selama bekerja dan di luar pekerjaan, kemudian faktor yang ke dua

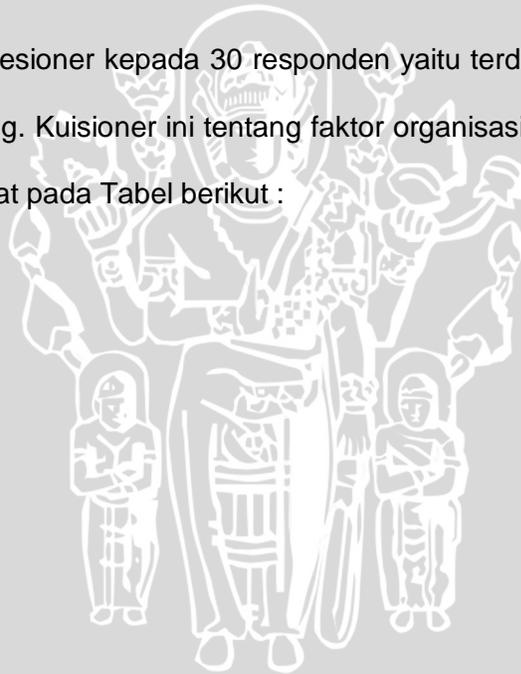
adalah sumber utama kinerja yang tidak efektif. Kuesioner ini dibagikan kepada informan pada saat pelaksanaan wawancara.

#### **5.4.1. Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja (pegawai yang tidak efektif) selama bekerja**

Faktor Tingkat Kinerja (pegawai yang tidak efektif) selama bekerja adalah untuk mengetahui faktor ketidak-efektivisan pegawai selama bekerja. Terdiri dari tiga bagian, yaitu faktor organisasi, faktor individu dan faktor sosial. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut maka disiapkan kuisisioner, adapun hasil dari kuisisioner akan disajikan dalam penjelasan di bawah ini, yaitu:

##### ❖ Faktor Organisasi

Dari hasil penyebaran kuisisioner kepada 30 responden yaitu terdiri dari 14 pegawai TPI Prigi, 10 nelayan dan 6 pedagang. Kuisisioner ini tentang faktor organisasi oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 7 buah dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 20. Tabel Faktor Organisasi Tingkat Kinerja Yang Tidak Efektif Selama Bekerja

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Keterlambatan : Pegawai TPI selalu datang tepat waktu	<b>Sangat setuju</b>	<b>22</b>	<b>73,3</b>
		Setuju	6	20
		Ragu-ragu	2	6,6
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
2.	Kehadiran : Pegawai TPI selalu hadir dalam penyelenggaraan pelelangan ikan	<b>Sangat setuju</b>	<b>26</b>	<b>86,6</b>
		Setuju	4	13,3
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
3.	Pelatihan : Pegawai TPI sudah pernah mendapatkan pelatihan penyelenggaraan pelelangan ikan	Sangat setuju	-	-
		Setuju	2	6,6
		Ragu-ragu	10	33,3
		Tidak setuju	6	20
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
4.	Penurunan Produktivitas : Pegawai TPI menjaga stabilitas harga; pegawai TPI sudah melaksanakan pelelangan dengan aman, tertib dan lancar; pegawai TPI sudah melakukan penarikan iuran retribusi sesuai ketetapan yang berlaku	Sangat setuju	11	36,3
		Setuju	1	3,3
		Ragu-ragu	2	6,6
		Tidak setuju	3	10
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>13</b>	<b>43,3</b>
5.	Perombakan rencana/jadwal : Perombakan rencana kegiatan TPI dapat mencapai tujuan	<b>Sangat setuju</b>	<b>14</b>	<b>46,6</b>
		Setuju	9	30
		Ragu-ragu	3	10
		Tidak setuju	2	6,6
		Sangat tidak setuju	2	6,6
6.	Peningkatan tanggung jawab dan pengawasan : Pemimpin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>13</b>	<b>43,3</b>
		Setuju	1	3,3
		Ragu-ragu	5	16,6
		Tidak setuju	11	36,6
		Sangat tidak setuju	-	-
7.	Kekeliruan/ketidak efisienan : Pekerjaan yang dilakukan selalu diselesaikan tepat waktu, jika pekerjaan yang dilakukan kurang baik pegawai akan berusaha memperbaiki	<b>Sangat setuju</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
		Setuju	2	6,6
		Ragu-ragu	3	10
		Tidak setuju	5	16,6
		Sangat tidak setuju	8	26,6

Sumber : Data primer (diolah), 2012

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Manullang (2009), adanya struktur organisasi pada lingkungan kerja dapat memberikan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta kedudukan masing-masing pelaksana, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pekerjaan yang dapat menghambat kelancaran pencapaian tujuan.

Dari Tabel 20. diketahui jawaban dari responden menunjukkan bahwa 40% pegawai TPI Prigi belum pernah mendapatkan pelatihan penyelenggaraan pelelangan ikan. Dan 43,3% responden menyatakan penurunan produktivitas pegawai TPI, TPI yang memiliki fungsi sebagai stabilator harga ternyata tidak berfungsi di TPI Prigi, penentu harga masih berada di tangan pedagang. Terjaminnya penyelenggaraan pelelangan yang aman, tertib dan lancar tidak dirasakan oleh konsumen TPI, pelayanan yang kurang memuaskan khususnya dalam hal penanganan keamanan penyelenggaraan pelelangan ikan tidak berjalan dengan baik, masih maraknya kasus pencurian ikan membuat nelayan sangat kecewa dengan pelayanan di TPI dan mereka merasa dirugikan. Hal ini yang menyebabkan konsumen TPI enggan untuk membayar retribusi, karena mereka menganggap pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan penarikan retribusi. Pedagang yang seharusnya membayar 2% dari transaksi pelelangan ikan, kenyataannya tidak seperti itu, pedagang hanya membayar sesuai dengan jumlah keranjang ikan yang mereka bawa pulang dan retribusi per keranjang adalah Rp 1.000,00.

## ❖ Faktor Individu

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 14 responden yaitu pegawai TPI Prigi, tentang faktor individu oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 2 buah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 21. Faktor Individu Tingkat Kinerja Yang Tidak Efektif Selama Bekerja

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ orang	Persentase (%)
1.	Pengaruh karier : Mutasi dalam rangka promosi sangat mempengaruhi kinerja pegawai TPI	Sangat setuju	-	-
		Setuju	2	7,1
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	3	21,4
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>8</b>	<b>57,1</b>
2.	Pengaruh kemampuan : Pegawai TPI memiliki kemampuan dalam melaksanakan kerja di unit kerjanya masing- masing	<b>Sangat setuju</b>	<b>13</b>	<b>92,8</b>
		Setuju	1	7,1
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Faktor individu adalah metode yang efektif memungkinkan pegawai untuk mengalami kemajuan pada tingkat kecepatan yang berbeda, materi yang berbeda dan bahkan berpartisipasi dalam aktivitas yang berbeda.

Dari Tabel 21. diketahui bahwa jawaban dari 57,1% responden menunjukkan bahwa mutasi kerja tidak mempengaruhi kinerja pegawai TPI, karna baik di promosikan atau tidak pegawai TPI harus tetap memberikan kinerja yang baik dan sudah menjadi tugas pokok dari pegawai TPI untuk membantu nelayan. Dalam Hal kemampuan, sebanyak 92,8% responden menyatakan bahwa pegawai TPI sudah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing. Walaupun pegawai TPI belum pernah mendapatkan pelatihan kinerja namun mereka sudah dapat memahami dan melaksanakan tupoksinya masing-masing, pegawai TPI belajar melalui buku dan secara otodidak, namun masih terdapatnya beberapa kendala sehingga hasil kinerja yang diterima belum efektif.

### ❖ Faktor Sosial

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden yaitu terdiri dari 14 pegawai TPI Prigi, 10 nelayan dan 6 pedagang. Kuisisioner ini tentang faktor organisasi oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 3 buah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 22. Faktor Sosial Tingkat Kinerja Yang Tidak Efektif Selama Bekerja

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Ketidakpuasan klien : Pengelola TPI melayani dengan ramah, sabar dan cepat	Sangat setuju	12	40
		Setuju	2	6,6
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	1	3,3
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>15</b>	<b>50</b>
2.	Hubungan masyarakat : Pegawai TPI memiliki hubungan yang baik dengan nelayan/pedagang	Sangat setuju	4	13,3
		Setuju	5	16,6
		<b>Ragu-ragu</b>	<b>16</b>	<b>53,3</b>
		Tidak setuju	3	10
		Sangat tidak setuju	2	6,6
3.	Kredibilitas dan abilitas : Sistem untuk memberikan pelayanan efektif, sistem yang berlaku dalam unit kerja mendukung tupoksi pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>10</b>	<b>33,3</b>
		Setuju	3	10
		Ragu-ragu	1	3,3
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Faktor sosial adalah faktor yang mempengaruhi hubungan individu yang satu dengan individu lainnya. Individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya, begitu juga sebaliknya. Menurut Bonner dalam Ali (2004), merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya.

Dari Tabel 22. diketahui bahwa jawaban dari 50% responden menunjukkan bahwa pegawai TPI Prigi belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, konsumen merasa pegawai TPI belum melayani dengan baik. Pelayanan yang diberikan juga lambat, hal ini dikarenakan jumlah pegawai TPI yang tidak seimbang dengan jumlah konsumen yang ada. Dan sebanyak 53,3% responden menyatakan ragu-ragu memiliki hubungan baik

antara pegawai TPI Prigi dengan masyarakat nelayan, karena selama ini nelayan menganggap TPI adalah sebagai tempat yang hanya berfungsi untuk memungut retribusi saja, sedangkan fungsi TPI sebagai stabilator tidak berjalan dengan.

#### 5.4.2. Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja (pegawai yang tidak efektif) di Luar

##### Pekerjaan

Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja (pegawai yang tidak efektif) di luar pekerjaan adalah untuk mengetahui faktor ketidak-efektivitasan pegawai di luar pekerjaan. Terdiri dari tiga bagian, yaitu faktor organisasi, faktor individu dan faktor sosial. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut maka disiapkan kuisisioner, adapun hasil dari kuisisioner akan disajikan dalam penjelasan di bawah ini, yaitu:

##### ❖ Faktor Organisasi

Dari hasil penyebaran kuisisioner kepada 30 responden untuk pertanyaan no. 1 dan 2, dan untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada 14 respon, yaitu terdiri dari 14 pegawai TPI Prigi, 10 nelayan dan 6 pedagang. Kuisisioner ini tentang faktor organisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 23. Faktor Organisasi Tingkat Kinerja Yang Tidak Efektif Di Luar Pekerjaan

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Ketidakpuasan klien : Pengelola TPI melayani dengan ramah, sabar dan cepat	Sangat setuju	12	40
		Setuju	2	6,6
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	1	3,3
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>15</b>	<b>50</b>
2.	Semangat : Pegawai TPI memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan tupoksinya	<b>Sangat setuju</b>	<b>10</b>	<b>33,3</b>
		Setuju	3	10
		Ragu-ragu	3	10
		Tidak setuju	5	16,6
		Sangat tidak setuju	9	30
3.	Rekrutmen : Penunjukan pegawai TPI berdasarkan kompetensi dan penunjukan pegawai TPI diketahui oleh pegawai tersebut	<b>Sangat setuju</b>	<b>11</b>	<b>78,5</b>
		Setuju	2	14,2
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
4.	Seleksi dan penempatan: Pegawai TPI diseleksi dan ditempatkan sesuai dengan bidang tugasnya	<b>Sangat setuju</b>	<b>6</b>	<b>42,8</b>
		Setuju	2	14,2
		Ragu-ragu	2	14,2
		Tidak setuju	3	21,4
		Sangat tidak setuju	1	7,1
5.	Kekurangan biaya : Biaya operasional kegiatan TPI dalam unit kerja belum memadai	<b>Sangat setuju</b>	<b>13</b>	<b>92,8</b>
		Setuju	1	7,1
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
6.	Perombakan rencana/jadwal : Terjadi perombakan rencana atau jadwal yang telah ditentukan	<b>Sangat setuju</b>	<b>9</b>	<b>64,2</b>
		Setuju	1	7,1
		Ragu-ragu	4	28,5
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
7.	Kompensasi sebenarnya: Pegawai TPI mendapatkan kompensasi/honor yang sesuai dengan beban pekerjaan	Sangat setuju	-	-
		Setuju	-	-
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	1	7,1
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>13</b>	<b>92,8</b>

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis,

terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Tabel 23, sebanyak 50% responden menyatakan ketidak puasaan klien. Fungsi TPI sebagai tempat stabilator harga perikanan tidak dirasakan oleh nelayan, mereka merasa TPI hanyalah tempat untuk memungut retribusi. Pelayanan yang kurang memuaskan terutama dalam hal keamanan, maraknya kasus pencurian ikan yang sangat merugikan nelayan. Dan sebanyak 92,8% menyatakan kompensasi honor yang di terima pegawai TPI Prigi masih di bawah UMR Kabupaten Trenggalek, yaitu hanya Rp 280.000,00 sedangkan UMR Kabupaten Trenggalek Rp 678.000,00. Dan untuk kompensasi lembur baru diadakan pada tahun 2011, apabila bekerja di atas jam 19.00-03.00/20.00-04.00 dikategorikan lembur.

#### ❖ Faktor Individu

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 14 responden yaitu pegawai TPI Prigi, tentang faktor individu oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 3 buah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 24. Faktor Individu Tingkat Kinerja Yang Tidak Efektif Di Luar Pekerjaan

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Pengaruh sosial : Sosial dan budaya yang mengutamakan laki-laki yang harus bekerja mencari nafkah	Sangat setuju	-	-
		Setuju	2	14,2
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	1	7,1
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>10</b>	<b>71,4</b>
2.	Pengaruh keluarga : Keluarga kurang mendukung pekerjaan pegawai TPI	Sangat setuju	-	-
		Setuju	-	-
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	2	14,2
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>11</b>	<b>78,5</b>
3.	Pengaruh psikologis : Pola pikir/mind set pegawai TPI bahwa bekerja di TPI untuk membantu nelayan	<b>Sangat setuju</b>	<b>9</b>	<b>64,2</b>
		Setuju	3	21,4
		Ragu-ragu	2	14,2
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Faktor individu adalah metode yang efektif memungkinkan pegawai untuk mengalami kemajuan pada tingkat kecepatan yang berbeda, materi yang berbeda dan bahkan berpartisipasi dalam aktivitas yang berbeda.

Dari Tabel 24. Diketahui bahwa jawaban 71,4% responden menunjukkan bahwa pengaruh sosial yang mengutamakan laki-laki dalam bekerja tidak mempengaruhi pegawai TPI, walaupun pegawai di TPI lebih dominan laki-laki dibandingkan perempuan namun pengaruh sosial tersebut tidak mempengaruhi pegawai TPI dalam bekerja. Dan sebanyak 78,5% menyatakan keluarga sangat mendukung pekerjaan yang dijalani oleh pegawai TPI. Karena pentingnya suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka apabila itu merupakan pekerjaan yang baik dan halal maka keluarga akan sangat mendukung.

#### ❖ Faktor Sosial

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 14 responden yaitu pegawai TPI Prigi, tentang faktor sosial oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 3 buah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 25. Faktor Sosial Tingkat Kinerja Yang Tidak Efektif Di Luar Pekerjaan

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Kekurangan dalam hal kualitas pelayanan pendidikan : Pegawai TPI belum efektif melakukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pelelangan ikan	<b>Sangat setuju</b>	<b>9</b>	<b>64,2</b>
		Setuju	2	14,2
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	2	14,2
		Sangat tidak setuju	-	-
2.	Hasil gagal diperoleh sesuai dengan standar : Pegawai TPI belum memberikan kontribusi bagi pelaksanaan TPI di dalam unit kerja masing-masing	Sangat setuju	-	-
		Setuju	-	-
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	2	14,2
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>11</b>	<b>78,5</b>

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Faktor sosial adalah faktor yang mempengaruhi hubungan individu yang satu dengan individu lainnya. Individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya, begitu juga

sebaliknya. Bonner ( dalam Ali, 2004) merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 25, Sebanyak 64,2% responden menjawab pegawai TPI belum mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pekelangan ikan, namun dalam hal pemahaman penyelenggaraan pegawai TPI sudah memahami melalui buku atau belajar secara otodidak.

#### **5.4.3. Sumber Utama Kinerja yang Tidak Efektif**

Sumber utama kinerja yang tidak efektif adalah faktor yang menjadi ketidak efektifitasan pegawai dalam bekerja. Terdiri dari tiga bagian, yaitu faktor individu, faktor organisasi dan faktor eksternal. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut maka disiapkan kuisisioner, adapun hasil dari kuisisioner akan disajikan dalam penjelasan di bawah ini, yaitu:

##### ❖ Faktor Individu

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 14 responden yaitu pegawai TPI Prigi, tentang faktor individu oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 8 buah dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 26. Faktor Individu Sumber Utama Kinerja Yang Tidak Efektif

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Kelemahan intelektual : Pegawai TPI kurang memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaan	Sangat setuju	-	-
		Setuju	-	-
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	2	14,2
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>12</b>	<b>85,7</b>
2.	Kelemahan psikologis : Pegawai TPI lemah secara psikologisnya	Sangat setuju	-	-
		Setuju	-	-
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	3	21,4
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>10</b>	<b>71,4</b>
3.	Kelemahan fisik : Pegawai TPI lemah secara fisik, sering sakit atau sering absen	Sangat setuju	-	-
		Setuju	-	-
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	2	14,2
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>11</b>	<b>78,5</b>
4.	Demotivasi : Pegawai TPI kurang termotivasi dalam bekerja karena tidak adanya reward	<b>Sangat setuju</b>	<b>6</b>	<b>42,8</b>
		Setuju	3	21,4
		Ragu-ragu	2	14,2
		Tidak setuju	2	14,2
		Sangat tidak setuju	1	42,8
5.	Faktor personalita : Pegawai TPI memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tupoksinya	<b>Sangat setuju</b>	<b>13</b>	<b>92,8</b>
		Setuju	1	7,1
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
6.	Keuangan : Pegawai TPI kurang bersemangat dalam menjalankan tupoksinya karena tidak diberikan kompensasi/honor yang layak	<b>Sangat setuju</b>	<b>9</b>	<b>64,2</b>
		Setuju	3	21,4
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	1	7,1
		Sangat tidak setuju	-	-
7.	Preparasi jabatan : Kinerja yang baik ditunjukkan oleh pegawai TPI untuk mendapatkan promosi jabatan	Sangat setuju	-	-
		Setuju	1	7,1
		Ragu-ragu	2	14,2
		Tidak setuju	4	28,5
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
8.	Orientasi nilai : Pegawai TPI memiliki orientasi nilai yang berspektif untuk membantu nelayan	<b>Sangat setuju</b>	<b>13</b>	<b>92,8</b>
		Setuju	1	7,1
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Faktor individu adalah metode yang efektif memungkinkan pegawai untuk mengalami kemajuan pada tingkat kecepatan yang berbeda, materi yang berbeda dan bahkan berpartisipasi dalam aktivitas yang berbeda.

Berdasarkan Tabel 27. Sebanyak 42,8% menyatakan pegawai TPI kurang termotivasi dalam bekerja karena tidak adanya reward. Untuk kompensasi lembur baru diadakan pada tahun 2011, apabila bekerja di atas jam 19.00-03.00/20.00-04.00 dikategorikan lembur, semenjak saat itu pegawai semangat untuk lembur karena dengan lembur mereka mendapatkan tambahan pendapatan sedangkan untuk mengandalkan dari hasil gaji saja itu sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan sebanyak 64,2% responden menyatakan kurang bersemangat dalam menjalankan tupoksinya karena tidak diberikan kompensasi/honor yang sesuai dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh pegawai TPI, membuat pegawai TPI kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mencari tambahan melalui lembur atau memebantu nelayan/pemilik kapal di sela-sela waktu kerja. Kompensasi/honor yang di terima pegawai TPI Prigi masih di bawah UMR Kabupaten Trenggalek, yaitu hanya Rp 280.000,00 sedangkan UMR Kabupaten Trenggalek Rp 678.000,00.

#### ❖ Faktor Organisasi

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 14 responden yaitu pegawai TPI Prigi, tentang faktor organisasi oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 8 buah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 27. Faktor Organisasi Sumber Utama Kinerja Yang Tidak Efektif

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Sistem : Pegawai TPI memiliki mekanisme kerja yang jelas	<b>Sangat setuju</b>	<b>10</b>	<b>71,4</b>
		Setuju	2	21,4
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
2.	Peranan kelompok : Sesama pengelola TPI saling mendukung dalam melaksanakan tupoksinya	<b>Sangat setuju</b>	<b>11</b>	<b>78,5</b>
		Setuju	2	14,2
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
3.	Perilaku pengawas : Atasan selalu mengawasi pekerjaan pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
		Setuju	4	28,5
		Ragu-ragu	2	14,2
		Tidak setuju	1	7,1
		Sangat tidak setuju	-	-
4.	Iklim organisasi : Di dalam unit kerja masing-masing memungkinkan pegawai TPI melakukan tupoksinya	<b>Sangat setuju</b>	<b>9</b>	<b>64,2</b>
		Setuju	3	21,4
		Ragu-ragu	1	7,1
		Tidak setuju	1	7,1
		Sangat tidak setuju	-	-

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Manullang (2009), adanya struktur organisasi pada lingkungan kerja dapat memberikan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta kedudukan masing-masing pelaksana, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pekerjaan yang dapat menghambat kelancaran pencapaian tujuan.

Berdasarkan Tabel 27, Berdasarkan jawaban responden rata-rata setiap item di atas 50%, hal ini menunjukkan bahwa faktor organisasi TPI Prigi sudah sangat efektif dalam menunjang kinerja pegawai TPI

❖ Faktor Eksternal

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 14 responden yaitu pegawai TPI Prigi, tentang faktor organisasi oleh TPI Prigi dengan item sejumlah 8 buah dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 28. Faktor Eksternal Sumber Utama Kinerja Yang Tidak Efektif

No.	Indikator	Pernyataan	Frekuensi/ Orang	Persentase (%)
1.	Keluarga : Kondisi keluarga berpengaruh terhadap kinerja sebagai pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>8</b>	<b>57,1 %</b>
		Setuju	4	28,5 %
		Ragu-ragu	1	7,1 %
		Tidak setuju	1	7,1 %
		Sangat tidak setuju	-	-
2.	Kondisi ekonomi : Kondisi ekonomi dapat meningkatkan kinerja sebagai pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>10</b>	<b>71,4 %</b>
		Setuju	3	21,4 5
		Ragu-ragu	1	7,1 %
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
3.	Kondisi politik : Kondisi politik mempengaruhi kinerja sebagai pegawai TPI	Sangat setuju	-	-
		Setuju	-	-
		Ragu-ragu	1	7,1 %
		Tidak setuju	2	14,2 %
		<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>11</b>	<b>78,5 %</b>
4.	Kondisi hukum : Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki regulasi/peraturan yang mendukung pelaksanaan TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>13</b>	<b>92,8 %</b>
		Setuju	1	7,1 %
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
5.	Nilai sosial : Nilai sosial yang berkembang di luar organisasi menghambat proses pelaksanaan tupoksi pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>6</b>	<b>42,8%</b>
		Setuju	3	21,4 %
		Ragu-ragu	2	14,2 %
		Tidak setuju	2	14,2 %
		Sangat tidak setuju	1	7,1 %
6.	Pasaran kerja : Lingkungan eksternal sebagai penikmat hasil pembangunan memerlukan produk/jasa yang dihasilkan oleh pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>9</b>	<b>64,2 %</b>
		Setuju	4	28,5 %
		Ragu-ragu	1	7,1 %
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
7.	Perubahan teknologi : Perubahan teknologi dapat mempengaruhi kinerja pengelola TPI ke arah yang lebih baik	<b>Sangat setuju</b>	<b>7</b>	<b>50 %</b>
		Setuju	4	28,5 %
		Ragu-ragu	2	14,2 %
		Tidak setuju	-	-
		Sangat tidak setuju	-	-
8.	Perserikatan : Pegawai TPI menjalin hubungan kerja yang baik dengan pegawai TPI	<b>Sangat setuju</b>	<b>13</b>	<b>92,8 %</b>
		Setuju	1	7,1 %
		Ragu-ragu	-	-
		Tidak setuju	-	-

yang lain, memiliki wadah untuk bertukar pikiran dan informasi mengenai kegiatan pekelangan ikan	Sangat tidak setuju	-	-
--	---------------------	---	---

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Berdasarkan Tabel 28. Sebanyak 57,1% responden menyatakan keluarga sangat mempengaruhi dalam kinerja pegawai. Jika di rumah terdapat masalah, pegawai kurang memiliki konsentrasi dalam melakukan pekerjaan dan jika keluarga memberikan dukungan penuh dalam bekerja pegawai akan bersemangat dalam melakukan kinerja. Karena pegawai merasa keluarga adalah segalanya yang mereka miliki, dan mereka bekerja selain untuk dirinya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sebanyak 71,4% responden menyatakan kondisi ekonomi dapat meningkatkan kinerja pegawai. Meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga mempengaruhi pegawai untuk bekerja lebih giat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain dari tabel-tabel di atas, pengukuran efektifitas juga dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh pegawai TPI bagi unit kerjanya dapat dilihat dari program atau kegiatan yang ada di unit kerjanya. Berapa persen dari kegiatan tersebut masih belum mencapai target yang sudah ditentukan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber WT (52) :

“Menurut saya kinerja dari pegawai TPI Prigi belum efektif. Dari potensi yang dimiliki sebesar 1 milyar tapi pendapatan TPI masih saja di bawah target, bahkan gaji para pegawai di bawah UMR Kabupaten Trenggalek. Dan untuk masalah kebersihan saja masih ditanggung oleh pihak PPN Prigi”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai TPI Prigi belum efektif, karena target kerja yang dilaksanakan belum dapat tercapai.

## 5.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pegawai TPI dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

### 5.5.1. Faktor Pendukung

Dalam terlaksananya segala macam kegiatan selalu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat. Dimana faktor-faktor tersebut dapat

bersifat eksternal maupun internal. Dalam rangka mewujudkan suatu program agar berhasil dengan baik, pasti akan nampak adanya faktor-faktor tertentu yang menjadi pendukung dan hal ini sangat membantu. Demikian halnya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TPI di unit kerjanya juga tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang menjadi penyebab berjalannya tugas dan fungsi mereka dengan baik. Adapun faktor-faktor pendukung pegawai TPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan diuraikan berikut ini.

Faktor pendukung yang pertama adalah adanya komitmen pimpinan yang ditunjukkan dengan di tetapkannya Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 Tanggal 4 Desember tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Faktor pendukung yang kedua adalah fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan, yaitu : dermaga untuk pendaratan kapal, fasilitas gedung dan tempat lelang dan perdagangan pasca panen, fasilitas gedung penyimpanan basket dan peralatan lelang lainnya, fasilitas tempat parkir dan MCK, fasilitas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

Faktor pendukung yang ke tiga adalah potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang besar di Teluk Prigi. Potensi SDI yang besar ini menjadikan Teluk Prigi sebagai tempat potensial bagi banyak nelayan dalam melaut. Sehingga TPI Prigi memiliki volume produksi ikan yang besar untuk dipasarkan.

### **5.5.2. Faktor Penghambat**

Selain faktor-faktor pendukung, pegawai TPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga tidak terlepas dari faktor penghambat yang justru lebih banyak, sehingga bisa dikatakan pegawai TPI belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor penghambat ini bisa bersifat eksternal maupun internal.

Faktor penghambat yang pertama adalah masih maraknya kasus pencurian ikan di TPI Prigi. Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, banyak pihak-pihak yang tidak berhak mengambil ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis merugikan pihak nelayan.

Faktor penghambat yang kedua adalah nelayan dan pedagang yang masih enggan dalam melakukan pembayaran retribusi dan menyebabkan pihak TPI belum bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor penghambat yang ketiga adalah, pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, penentuan harga masih dikuasi oleh pedagang.

Faktor penghambat yang ke empat adalah manajemen pelelangan ikan yang belum efektif. Fungsi stabilator di TPI Prigi yang tidak berjalan, serta sistem lelang yang belum efektif memerlukan sebuah perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik agar pelelangan ikan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar.

## **5.6. Strategi Peningkatan Efektivitas Pegawai TPI dalam Menunjang Pelaksanaan Pemberdayaan di TPI Prigi**

### **5.6.1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal**

Hasil identifikasi untuk menentukan strategi peningkatan efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan melalui pendekatan analisis SWOT, hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal. Hasilnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor-faktor Internal**

Pada faktor internal merupakan penganalisaan lingkungan internal TPI Prigi yang berguna untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki TPI Prigi untuk mengembangkan kegiatannya, dan untuk mengetahui kelemahan TPI Prigi yang dapat menghambat perkembangan tersebut. Dari analisa pada kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan dasar untuk

menentukan strategi internal apa yang akan dijalankan oleh TPI Prigi nantinya. Berikut ini hasil analisa dari faktor Internal TPI Prigi.

a. Identifikasi variabel Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan sumberdaya, keterampilan, atau kebutuhan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh TPI Prigi. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh TPI Prigi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya piranti hukum dari Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan pelelangan ikan
- 2) Pegawai TPI Prigi selalu siap 24 jam di kantor TPI untuk melayani konsumen.
- 3) Fasilitas yang memadai untuk membantu kinerja para pegawai TPI.
- 4) Konsep penyelenggaraan pelelangan ikan sudah dipahami oleh pegawai TPI Prigi.
- 5) Iklim organisasi yang mendukung pegawai dalam melaksanakan tupoksi.

b. Identifikasi variabel Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius dapat menghambat kinerja TPI Prigi.

Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh TPI Prigi:

- 1) Manajemen keamanan yang belum baik
- 2) Manajemen pelaksanaan pelelangan ikan belum berjalan dengan efektif
- 3) SDM di lembaga pemasaran TPI masih kurang
- 4) Kurangnya dana operasional di TPI Prigi
- 5) Hubungan yang kurang baik antara pegawai TPI dengan nelayan/pedagang

Adapun matrik faktor strategi internal atau *Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS) dalam pengembangan TPI Prigi ini, dapat dilihat pada

Tabel 29. Matrik IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)

No	Faktor Strategi Internal	Bobot (B)	Rating (R)	B x R
1	Kekuatan			
	Adanya piranti hukum dari pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan pelelangan ikan	0,15	4	0,60
	Pegawai TPI Prigi selalu siap sedia 24 jam di kantor	0,05	2	0,10
	Fasilitas-fasilitas yang memadai	0,10	3	0,30
	Pegawai TPI sudah paham dengan konsep penyelenggaraan pelelangan ikan	0,15	4	0,60
	Iklm organisasi yang mendukung pegawai dalam melaksanakan tupoksi	0,10	3	0,30
	Jumlah nilai Kekuatan			1,90
2	Kelemahan			
	Manajemen keamanan yang belum baik	0,10	4	0,40
	Manajemen pelaksanaan pelelangan ikan belum berjalan dengan efektif	0,15	4	0,60
	SDM dilembaga TPI Prigi masih kurang	0,05	2	0,10
	Kurangnya dana operasional	0,05	2	0,10
	Hubungan yang kurang baik antara pegawai TPI dengan nelayan/pedagang	0,10	3	0,30
	Jumlah nilai Kelemahan			1,50
TOTAL	1,00		3,40	

## 2. Faktor-faktor Eksternal

Analisa faktor eksternal merupakan penganalisaan lingkungan eksternal TPI Prigi yang berguna untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman tersebut akan dijadikan dasar untuk menentukan strategi Eksternal apa yang akan dijalankan oleh TPI Prigi nantinya. Berikut ini adalah hasil analisa dari faktor Eksternal TPI Prigi.

### a. Identifikasi variabel Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan situasi penting yang ada di lingkungan luar, yang menguntungkan atau mendukung kegiatan-kegiatan TPI Prigi. Berikut ini adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh TPI Prigi :

- 1) Perubahan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kinerja pegawai TPI
- 2) Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang besar di teluk Prigi
- 3) Permintaan produk perikanan yang cukup tinggi
- 4) Daya dukung masyarakat sekitar untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di TPI Prigi
- 5) Piranti hukum dari pemerintah pusat/KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang mendukung pelaksanaan pelelangan ikan

b. Identifikasi variabel Ancaman (*Threath*)

Ancaman merupakan situasi penting yang ada di lingkungan luar TPI Prigi, yang tidak menguntungkan atau tidak mendukung kegiatan-kegiatan TPI Prigi. Berikut ini adalah ancaman-ancaman terhadap TPI Prigi :

- 1) Adanya ancaman demo dari nelayan dan pedagang jika pelayanan yang diberikan kurang memuaskan.
- 2) Kurangnya kesadaran dari pihak nelayan dan pedagang dalam membayar retribusi.
- 3) Adanya peraturan tidak tertulis yang melarang tengkulak dari luar Prigi untuk mengikuti pelelangan di TPI Prigi.
- 4) Maraknya kasus pencurian ikan
- 5) Tingkat kepercayaan nelayan yang berkurang pada TPI

Adapun matrik faktor strategi eksternal atau External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) dalam pengembangan TPI Prigi ini, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 30. Matriks EFAS (Eksternal Strategic Factory Summary)

No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot (B)	Rating (R)	B x R
1	Peluang			
	Perubahan teknologi	0,05	2	0,10
	Potensi SDI yang besar di Teluk Prigi	0,10	4	0,40
	Permintaan produk perikanan yang cukup tinggi	0,10	3	0,30
	Piranti hukum dari pemerintah pusat/KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)	0,10	3	0,30
	Daya dukung masyarakat sekitar	0,20	4	0,80
	Jumlah nilai Peluang			1,90
2	Ancaman			
	Ancaman demo dari nelayan	0,05	2	0,10
	Kurangnya kesadaran nelayan dan bakul dalam membayar retribusi	0,10	3	0,30
	Bakul luar Prigi di larang mengikuti pelelangan ikan di TPI Prigi	0,10	3	0,30
	Maraknya kasus pencurian ikan	0,10	1	0,10
	Tingkat kepercayaan nelayan yang berkurang pada TPI	0,10	4	0,40
	Jumlah nilai Ancaman			1,20
	TOTAL	1,00		3,10

Selanjutnya data yang diperoleh dari IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) adalah :

Tabel 31. Score IFAS dan EFAS

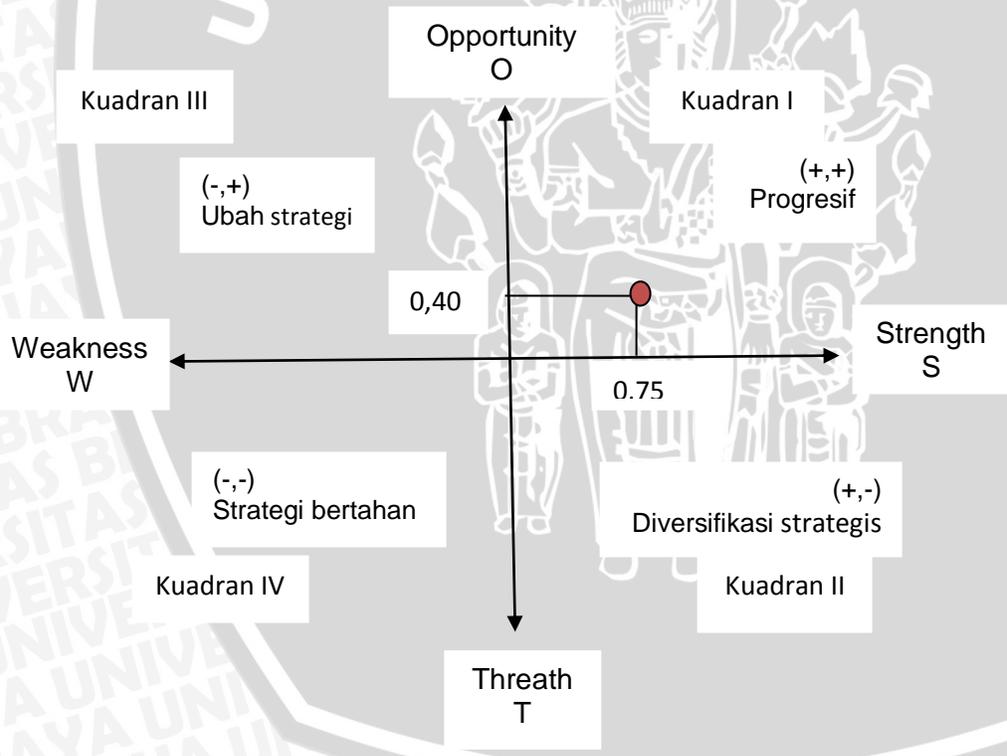
No	Jumlah Score Faktor Internal	Jumlah Score Eksternal
1.	1,90	1,90
2.	1,50	1,20
	Selisih Jumlah Score $1,90 - 1,50 = 0,40$	Selisih Jumlah Score $1,90 - 1,20 = 0,70$

Dari hasil analisa tabel di atas, perhitungan pada faktor eksternal dan internal TPI Prigi dapat diperoleh nilai kekuatan internal sebesar 1,90 dan kelemahan internal sebesar 1,50,

sehingga selisih kedua faktor tersebut yaitu 0,40. Untuk faktor eksternal diperoleh nilai peluang sebesar 1,90 dan nilai ancaman 1,20, sehingga selisih kedua faktor tersebut yaitu sebesar 0,70.

### 5.6.2. Bagan Matrik SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan antara faktor eksternal Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal. Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness). Perbandingan tersebutlah yang akan digunakan untuk menentukan strategi-strategi yang akan dijalani oleh TPI Prigi. Setelah mendapatkan hasil perbandingan dari faktor internal yaitu sebesar 0,40 dan faktor eksternal sebesar 0,75, maka selanjutnya adalah mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x, y) pada kuadran SWOT. Berikut ini adalah bagan atau diagram analisis SWOT TPI Prigi.



Gambar 6. Kuadran SWOT Pearce dan Robinson

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa TPI Prigi memiliki posisi internal-eksternal pada titik (0,40;0,75), yaitu pada kuadran I. Pada kuadran tersebut dapat diartikan bahwa

strategi yang cocok untuk TPI Prigi yaitu strategi agresif. Dengan kata lain, TPI Prigi memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth oriented strategy). Pada TPI Prigi strategi agresif ini akan difokuskan pada pelayanan dan keamanan yang perlu ditingkatkan dengan melihat potensi daya dukung masyarakat sekitar dan permintaan hasil perikanan yang tinggi. Contoh meningkatkan pelayanan adalah dengan TPI Prigi sebagai pemegang kendali dalam menentukan harga dan tidak merugikan pihak nelayan maupun pedagang. Kemudian yang perlu ditingkatkan juga yaitu keamanan melalui bantuan dari polisi dan pol-air, pegawai TPI juga perlu bertindak tegas terhadap pelaku pencurian dengan memberikan hukuman.

Selain dari bagan/diagram analisis SWOT, maka perlu dilakukan juga penyusunan strategi dengan menggunakan matrik SWOT. Matrik SWOT ini digunakan untuk menyusun rencana strategi yang didasarkan pada faktor strengths opportunities (SO), strengths threats (ST), weakness opportunities (WO), dan weakness threats (WT). Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan alternatif strategi yang lebih detail dan aplikatif, yang dapat digunakan untuk menunjang keberdayaan di TPI Prigi. Berikut ini adalah matrik SWOT untuk TPI Prigi.

Tabel 32. Matrik SWOT TPI Prigi

<p><b>IFAS</b></p> <p><b>EFAS</b></p>	<p><b>STRENGTHS (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya piranti hukum</li> <li>• Pegawai TPI siaga dalam 24 jam</li> <li>• Fasilitas memadai</li> <li>• Pemahaman konsep pelelangan ikan yang sudah dipahami oleh pegawai TPI</li> <li>• Iklim organisasi yang mendukung pegawai TPI dalam menjalankan tupoksinya</li> </ul>	<p><b>WEAKNESS (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen keamanan yang belum baik</li> <li>• Manajemen pelaksanaan pelelangan ikan belum berjalan dengan efektif</li> <li>• SDM di lembaga pemasaran TPI masih kurang</li> <li>• Kurangnya dana operasional di TPI Prigi</li> <li>• Hubungan yang kurang baik antara nelayan/pedagang dengan pegawai TPI</li> </ul>
<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kinerja pegawai TPI</li> <li>• Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang besar di teluk Prigi</li> <li>• Permintaan produk perikanan yang cukup tinggi</li> <li>• Daya dukung masyarakat sekitar untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di TPI Prigi</li> <li>• Piranti hukum dari pemerintah pusat/KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang mendukung pelaksanaan pelelangan ikan</li> </ul>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan</li> <li>• Meningkatkan daya dukung masyarakat dengan meningkatkan fungsi TPI</li> <li>• Meningkatkan kerja sama antar pegawai</li> </ul>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keamanan, menjalin kerjasama dengan stake holders yang bersangkutan</li> <li>• Menambah jumlah SDM di TPI</li> <li>• Memperbaiki hubungan antara nelayan/pedagang dengan pegawai TPI</li> </ul>
<p><b>THREATS (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya ancaman demo dari nelayan dan pedagang jika pelayanan yang diberikan kurang memuaskan.</li> <li>• Kurangnya kesadaran dari pihak nelayan dan pedagang dalam</li> </ul>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pengertian/sosialisasi retribusi kepada nelayan</li> <li>• Memanfaatkan piranti hukum yang ada dengan baik</li> </ul>	<p><b>STRATEGI WT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan fungsi TPI</li> <li>• Mengadakan pelatihan kerja bagi pegawai TPI</li> </ul>

<p>membayar retribusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peraturan tidak tertulis yang melarang tengkulak dari luar Prigi untuk mengikuti pelelangan di TPI Prigi.</li> <li>• Maraknya kasus pencurian ikan</li> <li>• Tingkat kepercayaan nelayan yang berkurang pada pegawai TPI</li> </ul>		
---	--	--

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Adapun penjelasan dari alternatif-alternatif strategi tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan kekuatan yang dimiliki, maka strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh TPI Prigi yaitu :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan, TPI Prigi telah cukup dikenal dan dikunjungi meskipun volume pengunjung banyak pada musim ikan saja, oleh karena itu pegawai TPI perlu meningkatkan pelayanan sehingga konsumen (nelayan/pedagang) dapat lebih terpuaskan, karena tujuan dari didirikannya TPI adalah untuk membantu nelayan mendapatkan harga sebaik mungkin melalui sistem lelang murni dengan tidak merugikan nelayan maupun pedagang.
- Meningkatkan daya dukung masyarakat, TPI merupakan pusat perekonomian terpenting di Pelabuhan. Dan daya dukung masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di TPI. Daya dukung masyarakat juga dipengaruhi oleh fungsi dari TPI tersebut, semakin baiknya meningkatnya fungsi TPI maka daya dukung dari masyarakat juga akan meningkat
- Meningkatkan kerja sama antar pegawai, dengan semakin baiknya kerja sama antar pegawai maka semakin kuat organisasi yang terdapat di TPI dan akan semakin baik pula kinerja yang dibangun.

➤ Strategi ST

Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki TPI Prigi untuk mengatasi ancaman. Strategi alternatif yang bisa dilakukan TPI Prigi yaitu :

- Memberikan pengertian/sosialisasi retribusi, untuk menyadarkan nelayan dan pedagang bahwa biaya retribusi tersebut sangat penting untuk pembiayaan sarana dan prasarana di TPI dan merupakan pendapatan asli daerah (PAD). Serta uang dari retribusi nantinya dapat dikembalikan kepada mereka ketika musim paceklik tiba.
- Memanfaatkan piranti hukum yang ada, selama ini peraturaran yang berlaku masih belum berjalan dengan optimal, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum secara tegas yang dilakukan oleh pegawai TPI baik melalui denda, hukuman penjara, dll.

#### ➤ Strategi WO

Strategi WO ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Dengan demikian, strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh TPI Prigi yaitu :

- Meningkatkan keamanan, kasus pencurian ikan yang marak terjadi membuat konsumen merasa kurang puas dengan pelayanan keamanan yang diberikan oleh TPI Prigi. TPI Prigi sangat membutuhkan bantuan dari stake holders lain terutama dalam hal keamanan. Oleh sebab itu perlunya diadakan kerja sama agar dapat menciptakan rasa aman bagi nelayan dan meminimalisir kasus pencurian ikan dan menunjang efektivitas dari TPI Prigi.
- Menambah jumlah SDM, volume ikan yang dilelang masi belum sesuai dengan jumlah SDM di TPI. Tidak sebandingnya jumlah konsumen dan volume ikan yang dilelang dengan jumlah pegawai TPI, membuat pegawai TPI kewalahan dan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen
- Memperbaiki hubungan antara nelayan/pedagang dengan pegawai TPI, hubungan antara nelayan/pedagang dengan pegawai TPI sangatlah penting. Karena jika diantara

nelayan/pedagang dan pegawai TPI memiliki hubungan yang kurang baik, hal ini akan mempengaruhi kegiatan

Pelelangan di TPI.

#### ➤ Strategi WT

Strategi WT ditentukan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Adapun alternatif strategi WT

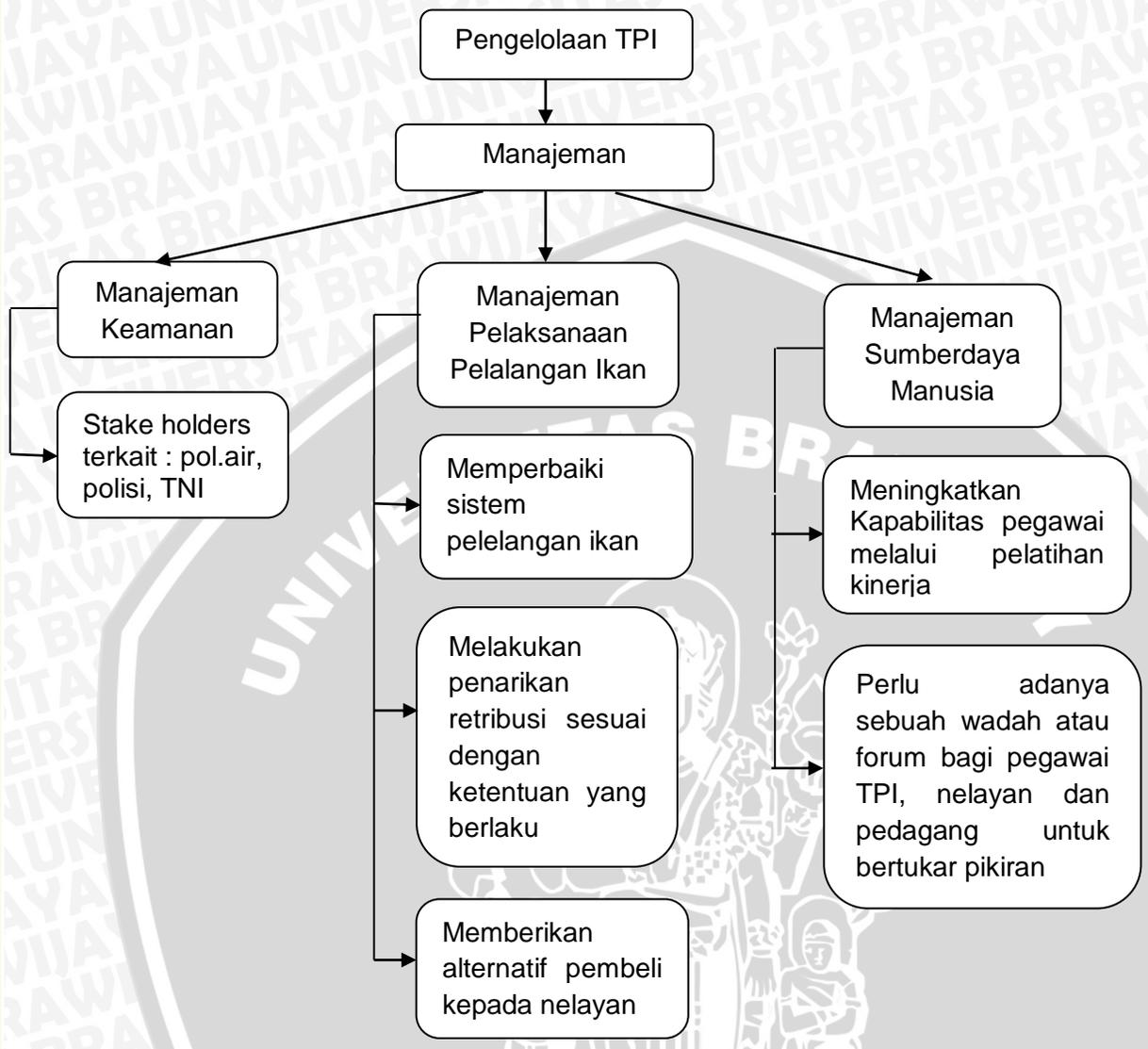
TPI Prigi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan fungsi TPI Prigi, pada umumnya fungsi TPI adalah tempat untuk menyelenggarakan pelelangan ikan, namun selama ini fungsi tersebut belum berjalan dengan optimal di TPI Prigi. Oleh karena itu perlu meningkatkan fungsi TPI agar penyelenggaraan pelelangan ikan tidak merugikan pihak nelayan maupun pedagang.
- Mengadakan pelatihan kerja bagi pegawai TPI, kurang optimalnya pegawai TPI dalam pelaksanaan tupoksi sehingga dirasa perlu adanya pelatihan kerja. Dan diharapkan melalui pelatihan kerja ini, pegawai TPI dalam lebih optimal dalam melaksanakan tupoksinya.

#### 5.6.3. Implementasi Strategi

Dalam perencanaan keberdayaan TPI Prigi ini implementasi strategi dimaksudkan untuk menindaklanjuti perencanaan strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Jika didalam analisis SWOT perencanaan strategi dilakukan secara umum, maka pada implementasi strategi akan dibahas secara khusus satu persatu sesuai dengan bidang atau aspeknya masing-masing. Dengan kata lain, implementasi ini merupakan penyusunan rencana strategi hasil dari analisi SWOT.

Implementasi strategi pada keberdayaan TPI Prigi akan dilakukan pada manajemen pengelolaan TPI



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam menunjang keberdayaan di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Pemahaman pegawai TPI terhadap tupoksi termasuk baik. Mayoritas pegawai TPI telah memahami istilah tupoksi, hanya saja ada beberapa konsep tupoksi terutama tupoksi Kepala Bidang Perkreditan. Perkreditan dimana 50% responden yang jawabannya benar. Demikian juga Tujuan Tupoksi dan Tupoksi Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana masing-masing 28,6% dan 21,4% responden menyatakan salah. Sedangkan untuk istilah tugas pokok dan fungsi, tugas pokok pegawai TPI, fungsi pegawai TPI, fungsi tugas pokok kepala TPI, tugas pokok Kepala Bidang Keuangan, tugas pokok Kepala Bidang urusan teknik lelang, tugas pokok Kepala Bidang keamanan, informan menjawab dengan benar.
- Pelaksanaan tupoksi pegawai TPI belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi, seperti nelayan dan bakul yang masi enggan dalam membayar retribusi dan masih maraknya pencurian ikan yang meresahkan nelayan. Bagi nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya, masih adanya permainan harga antara pembeli dengan pegawai TPI.
- Tingkat efektivitas pegawai TPI Prigi termasuk belum efektif. Berdasarkan hasil kuisioner tersebut konsumen dari TPI Prigi belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan

oleh pihak TPI. Namun Pihak TPI merasa sudah sangat optimal dalam memberikan pelayanan. Dalam melakukan pekerjaan pegawai TPI selalu penuh semangat. Kompensasi/honor yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan membuat pegawai TPI mencari tambahan penghasilan dengan lembur atau membantu nelayan di saat sela-sela aktifitas kerja. Pegawai TPI Prigi belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan kerja yang dapat membantu meningkatkan efektifitas pegawai.

- Faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan pelelangan ikan. Faktor penunjang pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Prigi adalah adanya pranti hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelelangan ikan di Kabupaten Trenggalek, potensi sumber daya ikan (SDI) yang besar dapat meningkatkan produksi pemasaran di TPI Prigi, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya Faktor penghambat, yaitu: pihak nelayan dan pedagang masi enggan dalam memebayar retribusi, masih maraknya kasus pencurian ikan, pegawai TPI belum menjalankan tupoksinya dengan efektif, manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan yang belum efektif.
- Strategi peningkatan efektifitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan. Berdasarkan analisis tersebut di dapatkan strategi yang cocok untuk TPI Prigi yaitu strategi agresif. Dengan kata lain, TPI Prigi memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth oriented strategy).

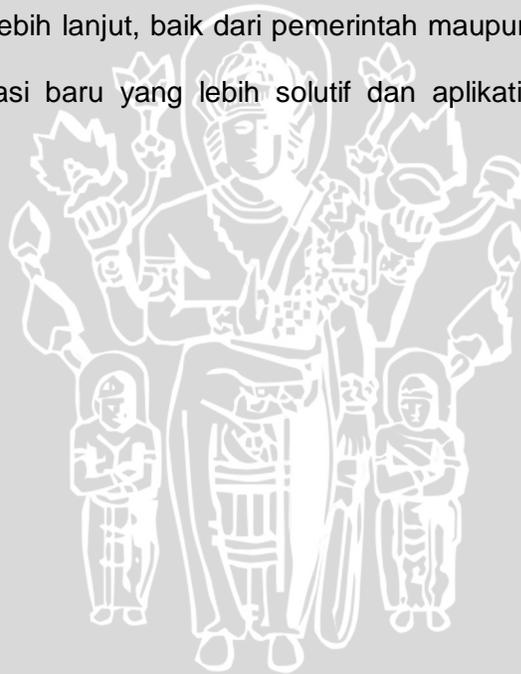
## 6.2 Saran

Dari hasil kegiatan penelitian di wilayah perairan Prigi Kabupaten Trenggalek ini, maka disarankan untuk :

- Perlu adanya forum/wadah antara nelayan, pedagang dan pegawai TPI agar masyarakat nelayan mengetahui tentang bagaimana fungsi dan manfaat dari TPI

sebagai pusat pemasaran hasil perikanan di pelabuhan dan sebagai tempat bermusyawarah.

- Bagi Pemerintah daerah, dalam pengelolaan TPI Prigi perlu adanya perbaikan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan, agar pelelangan ikan di TPI Prigi dapat terselenggara lebih baik dan tidak ada lagi pihak (nelayan dan pedagang) yang dirugikan. Serta perlu adanya pelatihan kinerja pegawai TPI agar dapat meningkatkan pengelolaan sistem pelelangan secara profesional. Dan perlu adanya ikatan kerja sama antara pihak TPI dengan stake holders terkait, dalam pengamanan pelaksanaan pelelangan ikan agar dapat mencegah terjadi pencurian hasil tangkapan nelayan.
- Perlu adanya penelitian lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun pihak akademis agar dapat memperoleh inovasi baru yang lebih solutif dan aplikatif dalam memecahkan permasalahan TPI



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah S dan Hariyanto T. 2004. **Proses Pelaksanaan Pelelangan Ikan: Studi Implementasi Kebijakan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek nomor 61 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek**. Jurnal Kebijakan Publik, vol.1, no.2, Desember 2004
- Akhmad Fauzi.2005. **Kebijakan Perikanan dan Kelautan**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis, ke Arah Ragam Varian Kontemporer**. Edisi Pertama. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indah Susilowati,Agung Sudaryono, Tri Winarni A,2004, **Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi-UMKMK) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di kabupaten/Kota Pekalongan, Jawa Tengah**. Lemlit UNDIP, Semarang
- Mahyuddin, Bustami.2007.**Peranan Pelelangan Ikan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan**.Jabar.
- Manullang Prama Mita Adelina. **2009. Analisis Perbandingan Pemasaran Ikan Melalui Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Dengan Sistem pemasaran Tradisional (Studi Kasus : Desa Pantai Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)**. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Miles Matthew B, Huberman A. Michael. 1992. **Analisis Data Kualitatif**. UI Press. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Cetakan Keenambelas. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rangkuti, Freddy. 2003. **Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis**. Cetakan kesepuluh. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rokhani, Ahmad. 2009. **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pelelangan Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek**. Malang
- Sawitri, Ni Luh Gede. 1997. Peranan Tempat Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan: Kasus Di TPI Muara Angke, Jakarta Utara. Buletin Ilmiah Tarumanegara Th.11/No.36/1997.
- Sedarmayanti. 2009. **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**. Cetakan Ketiga. CV Mandar Maju. Bandung.
- Soetomo.2006.**Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat**. Jakarta :Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2008. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Cetakan Keempat. CV. Alfabeta. Bandung.
- Surochiem,2001. **Dimensi-dimensi Penting Monitoring Pelaksanaan Program**

**Pemberdayaan dan Partisipasi pada Masyarakat Pesisir.** *Jurnal Neptunus, Vol8, No 1 Maret 2001,50-56, Surabaya*

Wahyuni Tri. 2008. **Analisis Efisiensi Teknis Tempat Pelelangan Ikan Dan Tingkat Keberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Serta Strategi Pemberdayaan Di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah,** Thesis, MM. UNDIP : Semarang.

Wahyono,Ari.dkk.2001.**Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.** Yogyakarta :Media Pressindo.

Wibisono Wiyono, 2005. **Peran dan Strategi Koperasi Perikanan dalam Menghadapi Tantangan Pengembangan TPI dan PPI di Indonesia Terutama di Pulau Jawa. Makalah dalam Semiloka Internasional tentang Revitalisasi Dinamis Pelabuhan Perikanan dan Perikanan Tangkap di Pulau Jawa dalam Pembangunan Perikanan Indonesia.** Bogor.



Lampiran 1. Kuisisioner

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Pegawai

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi

Jl. Pantai Prigi, Trenggalek, Jawa Timur 66382 Desa Tasikmadu

Kabupaten Trenggalek.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “ Efektivitas Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Menunjang Keberdayaan Pengelola TPI Di TPI Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur ”, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Nur Maulidya  
Nim : 0810840031  
Fakultas : Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Program studi : Sosial Ekonomi Perikanan

Mengharapkan kesediaan bapak/Ibu/Sdr/i Pegawai untuk meluangkan waktu mengisi kuisisioner yang saya ajukan. Demi tercapainya tujuan dalam penelitian ini dan mengingat semata-mata untuk kepentingan Akademik, mohon untuk diisi dengan sebenar-benarnya dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Karena seluruh jawaban Bapak/Ibu/sdr/i Pegawai akan terjamin kerahasiaannya.

Atas kesediaannya dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i Pegawai sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Rizky Nur Maulidya

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nomor Responden :  
 Umur :  
 Jabatan :  
 Jenis Kelamin : (Laki-laki/ Perempuan)  
 Pendidikan Terakhir :

1. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian.
2. Jawaban setiap pernyataan telah disediakan, Bapak / Ibu / Saudara / tinggal memilih salah satu jawaban sesuai dengan kenyataan yang ada dengan memberi tanda "X" pada kolom yang ada, yaitu SS = Sangat setuju, S = Setuju, RR = Ragu-ragu, TS = Tidak setuju, dan STS = Sangat tidak setuju.
3. Score tertinggi 5 untuk jawaban sangat setuju (SS) dan score terendah 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS).
4. Bacalah setiap pertanyaan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang terlewatkan, tidak ada jawaban yang paling baik kecuali jawaban saudara.

**Bagian 1 : Pertanyaan untuk mengetahui tingkat kinerja selama bekerja**

**a. Faktor Organisasi**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.*	Keterlambatan	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI setiap kali pelaksanaan kegiatan mengenai TPI selalu datang tepat waktu					
2.*	Kehadiran	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI setiap kegiatan pelaksanaan mengenai TPI selalu hadir					
3.	Pelatihan	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI sudah pernah mendapatkan pelatihan Keberdayaan					
		Kalau sudah pernah berapa kali dalam 1 tahun?	.....				
4.*	Penurunan Produktivitas	Terkait dengan tugas pengelola TPI :					

		a. Pengelola TPI sudah menjaga stabilitas harga					
		b. Pengelola TPI sudah melaksanakan dan menyelenggarakan lelang dengan aman, tertib dan lancar					
		c. Pengelola TPI sudah melakukan penarikan iuran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku					
5.*	Perombakan rencana/jadwal	Perombakan rencana/jadwal kegiatan TPI dapat mencapai tujuan					
6.*	Peningkatan tanggung jawab dan pengawasan	Pemimpin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja pengelola TPI					
7.*	Kekeliruan/kesalahan efisiennan	Pekerjaan yang dilaksanakan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan					
		Jika pekerjaan yang dilakukan kurang baik, pegawai selalu berusaha memperbaikinya					

**b. Faktor Individu**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.	Pengaruh karier	Mutasi pengelola TPI dalam rangka promosi dan pengembangan karier yang bersangkutan mempengaruhi kinerja					
2.	Pengaruh kemampuan	Pengelola TPI memiliki kemampuan dalam melaksanakan keberdayaan di unit kerjanya masing-masing					

**c. Faktor Sosial**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.*	Ketidakpuasan klien	Pengelola TPI melayani dengan sabar, ramah dan cepat					
2.*	Hubungan masyarakat	Pengelola TPI mempunyai hubungan yang baik dengan teman sejawat (nelayan/pedagang) lainnya terutama terkait dengan pelaksanaan tupoksinya					
3.*	Kredibilitas dan abilitas	Sistem yang berlaku dalam unit kerja mendukung tugas dan fungsi					

sistem untuk memberikan pelayanan efektif	pengelola TPI						
---	---------------	--	--	--	--	--	--

**Bagian 2 : Pernyataan untuk mengetahui tingkat kinerja di luar pekerjaan**

**a. Faktor Organisasi**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.	Kehilangan investigasi						
2.	Semangat	Pengelola TPI memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya					
3.	Rekrutmen	Penunjukan pengelola TPI diketahui oleh pegawai/aparatur itu sendiri					
		Penunjukan pengelola TPI berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh pegawai/aparatur					
4.	Seleksi dan penempatan	Pengelola TPI diseleksi dan ditempatkan sesuai dengan bidang tugasnya					
5.	Kekurangan biaya	Biaya operasional kegiatan TPI dalam unit kerja belum memadai					
6.	Perombakan rencana/jadwal	Terjadi perombakan rencana atau jadwal yang telah ditentukan					
7.	Kompensasi sebenarnya	Pengelola TPI mendapatkan kompensasi/honor yang sesuai dengan beban pekerjaannya					

**b. Faktor Individu**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.	Pengaruh sosial	Sosial dan budaya yang mengutamakan laki-laki yang harus bekerja mencari nafkah					

2.	Pengaruh keluarga	Keluarga kurang mendukung pekerjaan pengelola TPI					
3.	Pengaruh psikologis	Pola pikir/mind set pengelola TPI bahwa bekerja di TPI untuk membantu masyarakat nelayan					

**c. Faktor Sosial**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.	Kekuarangan dalam hal kualitas pelayanan pendidikan	Pengelola TPI belum efektif melakukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan pelelangan					
2.	Hasil gagal diperoleh sesuai dengan standar	Pengelola TPI belum memberikan kontribusi bagi pelaksanaan TPI di dalam unit kerjanya					

**a. Faktor Individu**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.	Kelemahan intelektual	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI kurang memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaannya					
2.	Kelemahan Psikologis	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI lemah secara psikologis					
3.	Kelemahan fisik	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI lemah secara fisik, yang ditunjukkan dengan sering sakit atau sering absen					
4.	Demotivasi	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI kurang termotivasi dalam menjalankan tupoksinya karena tidak adanya reward bagi					

		pengelola TPI yang berprestasi					
5.	Faktor personalitas	Pengelola TPI tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tupoksinya					
6.	Keuangan	Staf/aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola TPI kurang bersemangat dalam menjalankan tupoksinya karena tidak diberikan kompensasi/honor yang layak					
7.	Preparasi jabatan	Kinerja yang baik ditunjukkan oleh pengelola TPI sebagai preparasi jabatan/kesiapan pengelola TPI untuk mendapatkan promosi jabatan					
8.	Orientasi nilai	Pengelola TPI memiliki orientasi nilai yang berspektif keberdayaan					

**b. Faktor Organisasi**

No	Kriteria	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.	Sistem	Pengelola TPI memiliki mekanisme kerja yang jelas					
2.	Peranan kelompok	Sesama pengelola TPI saling mendukung dalam melaksanakan tupoksinya					
3.	Perilaku pengawas	Atasan selalu mengawasi pekerjaan pengelola TPI					
4.	Iklim organisasi	Di dalam unit kerja masing-masing memungkinkan pengelola TPI melakukan tupoksinya, memberikan pelayanan terbaik kepada anggota TPI, menjaga kestabilan harga					

**c. Lingkungan Eksternal**

No	Kriteria: Lingkungan Eksternal	Pernyataan	Jawaban				
			SS	S	RR	TS	STS
1.	Keluarga	Kondisi keluarga berpengaruh terhadap kinerja anda sebagai pengelola TPI					
2.	Kondisi ekonomi	Kondisi ekonomi anda dapat meningkatkan kinerja anda sebagai					

		pengelola TPI					
3.	Kondisi politik	Kondisi politik mempengaruhi kinerja anda sebagai pengelola TPI					
4.	Kondisi hukum	Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki regulasi/peraturan yang mendukung pelaksanaan TPI					
5.	Nilai sosial	Nilai sosial yang berkembang di luar organisasi menghambat proses pelaksanaan tupoksi pengelola TPI					
6.	Pasaran kerja	Lingkungan eksternal sebagai penikmat hasil pembangunan memerlukan produk/jasa yang dihasilkan oleh pengelola TPI					
7.	Perubahan teknologi	Perubahan teknologi dapat mempengaruhi kinerja pengelola TPI ke arah yang lebih baik					
8.	Perserikatan	Pengelola TPI menjalin hubungan kerja yang baik dengan pengelola TPI lain					
		Pengelola TPI memiliki wadah atau tempat untuk bertukar pikiran dan informasi mengenai kegiatan pelepasan					



## Lampiran 2. Prolog

**PROLOG**

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal, hal itu dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum melakukan sebuah perbuatan secara efektif sehingga keberdayaan tersebut belum dapat dicapai.

Pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan Unit Kegiatan Ekonomi terpenting di pelabuhan yang merupakan faktor penggerak dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Salah satu fungsi utama TPI adalah menyelenggarakan pemasaran atau pelelangan hasil tangkapan nelayan. Dalam proses pelelangan tersebut TPI akan mampu mengangkat daya tawar (bargaining position) nelayan ketika berhadapan dengan pedagang, dengan terciptanya harga dan sistem pembayaran yang layak tanpa merugikan pedagang.

Pada pertemuan kali ini, yang akan dibahas lebih lanjut adalah pengelola TPI sebagai salah satu komponen kunci dalam pelaksanaan kegiatan pelelangan di TPI. Pengelola TPI adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul dan nelayan.

Dalam suatu penelitian, disebutkan bahwa pengelola TPI belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan keberdayaan di unit kerjanya masing-masing.

Bagaimana pemahaman pengelola TPI mengenai konsep keberdayaan?

Apa yang telah dilakukan oleh pengelola TPI terkait dengan tugas dan fungsinya?

Bagaimana efektivitas pengelola TPI dalam menunjang keberdayaan di Lingkungan TPI PPN Prigi?

Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelola TPI dalam melaksanakan keberdayaan di Lingkungan TPI PPN Prigi?

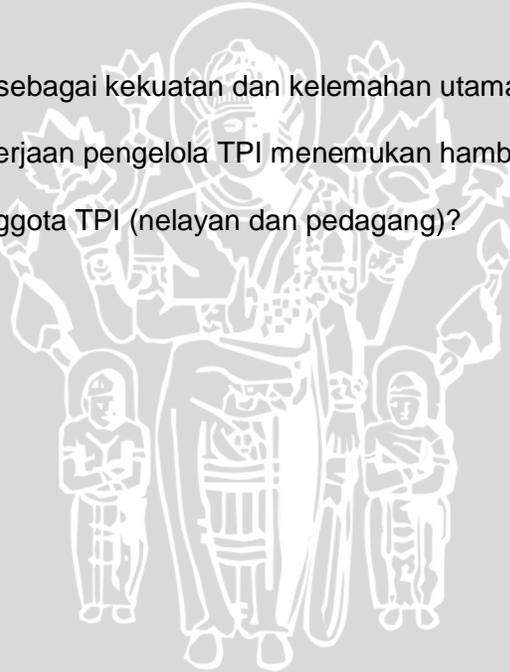
Bagaimana strategi peningkatan efektivitas pengelola TPI dalam menunjang pelaksanaan keberdayaan di Lingkungan TPI PPN Prigi?

Susunan Acara :

1. Registrasi peserta (mengisi daftar hadir, menerima prolog dan snack)
2. Pembukaan dan perkenalan team (Narasumber)
  - Selamat datang dan ucapan Terima kasih
  - Mengenalkan diri dan seluruh anggota team beserta posisi masing-masing
  - Penjelasan tujuan FGD dan mengapa peserta dipilih sebagai subyek penelitian
  - Penjelasan mekanisme FGD, termasuk penggunaan peralatan
  - Penjelasan peraturan-peraturan dan panduan diskusi, termasuk menjelaskan pentingnya masing-masing peserta mengemukakan pendapatnya, giliran bicara, cara-cara interupsi dan sebagainya
  - Penjelasan tentang waktu pelaksanaan pengelola TPI dan termasuk waktu break
3. Prolog (narasumber)
  - Tujuan penelitian
  - Fenomena
  - Menyampaikan pertanyaan kunci
4. Pelaksanaan FGD (Narasumber, Fasilitator, Notulen dan Team pendukung)
  - Diskusi berlangsung berdasar pada panduan pertanyaan
  - Diskusi dicatat secara terperinci sesuai kronologis kejadian oleh notulen
  - Diskusi dilakukan hingga tercapai kesimpulan kelompok untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan panduan pertanyaan FGD
5. Penutup (Narasumber dan Fasilitator)
  - Pembacaan kesimpulan kelompok oleh fasilitator
  - Ucapan terima kasih.

## Panduan Pertanyaan FGD

1. Saat ini jenis pengaruh kebijakan apa yang dapat dikerjakan oleh pengelola TPI dengan sangat baik? Dimana kita mengalami sukses terbesar
2. Apa jenis keterampilan dan kapasitas yang dimiliki oleh pengelola TPI mempengaruhi kebijakan yang ada?
3. Dalam bidang apa pengelola TPI dapat memanfaatkan dengan sangat efektif keterampilan dan kapasitasnya?
4. Siapa saja mitra terkuat dalam mempengaruhi kebijakan?
5. Kapan mereka telah bekerja bersama dengan pengelola TPI untuk melakukan dampak kebijakan?
6. Apa yang dianggap karyawan sebagai kekuatan dan kelemahan utama? Dan mengapa?
7. Apakah dalam melakukan pekerjaan pengelola TPI menemukan hambatan? Jika iya apa?
8. Bagaimana tanggapan dari anggota TPI (nelayan dan pedagang)?



## Lampiran 3. Pemahaman Tupoksi

**Pertanyaan-pertanyaan  
Penjajagan Tingkat Pemahaman Tupoksi Bagi Pengelola TPI****I. Identitas Responden**

Nama Responden : .....

Umur : .....

Jabatan : .....

Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan)

Pendidikan Terakhir : .....

1. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan dengan jawaban optional atau pilihan
2. Jawablah pertanyaan dengan melingkari jawaban yang Bapak / Ibu / Saudara anggap paling benar
3. Bacalah setiap pertanyaan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang terlewatkan, tidak ada jawaban yang paling baik kecuali jawaban saudara.

**II. Pertanyaan**

1. Apa pengertian dari Tugas pokok dan fungsi?
  - a. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf/aparatur dalam pekerjaannya
  - b. Sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan
  - c. Pengkoordinasian sistem kerja
2. Tujuan dari tupoksi?
  - a. Untuk mencapai sasaran utama dalam pekerjaan
  - b. Pelaksanaan tugas pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
  - c. Agar pekerjaan dapat lebih cepat selesai
3. Apa Tugas pokok dari pegawai TPI?
  - a. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang
  - b. Menjamin kelestarian sumberdaya alam
  - c. Mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di pasar ikan
4. Apa Fungsi dari pengelola TPI?
  - a. Mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di pasar ikan
  - b. Meningkatkan animo masyarakat nelayan untuk melakukan transaksi jual beli di TPI.
  - c. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat
5. Apa manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI?
  - a. Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen
  - b. Adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi (bea) lelang
  - c. Semua benar
6. Tugas pokok dari Kepala TPI adalah?

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan
  - b. Menyetorkan semua penerimaan keuangan kepada lembaga yang telah ditentukan
  - c. Membuat laporan tentang ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Bupati
7. Apa tugas pokok dari Kepala Bidang Keuangan?
- a. Melaksanakan urusan administrasi, rumah tangga, dan personalia TPI
  - b. Memberikan pelayanan penerimaan dan penyerahan uang dari penjual dan pembeli ikan
  - c. Mengelola dan melayani perkreditan baik untuk bakul maupun nelayan
8. Apa tugas pokok dari Kepala Bidang Tata Usaha?
- a. Melaksanakan urusan administrasi, rumah tangga, dan personalia TPI
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua tugas dan tanggung jawab penyelenggara TPI
  - c. Melakukan pengamanan dan penertiban sebelum, saat dan setelah proses pelelangan ikan
9. Apa tugas pokok dari Kepala Urusan Teknik Lelang?
- a. Menertibkan dan melancarkan seluruh mekanisme dan proses lelang ikan, yaitu dari saat mendaratkan ikan, menimbang dan melelang ikan
  - b. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan keuangan pada buku-buku yang telah ditentukan
  - c. Melakukan pengamanan dan penertiban sebelum, saat dan setelah proses pelelangan ikan
10. Apa tugas pokok dari Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana?
- a. Melaksanakan urusan administrasi, rumah tangga, dan personalia TPI
  - b. Mengurusi dan mengelola jasa-jasa penggunaan fasilitas fungsional dan penunjang lainnya seperti perparkiran, kios, gudang, persewaan basket dan MCK
  - c. Mengatur ketertiban, keamanan, kebersihan TPI dan lingkungannya
11. Apa tugas pokok dari Kepala Bidang Keamanan?
- a. Melakukan pengamanan dan penertiban sebelum, saat dan setelah proses pelelangan ikan
  - b. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan keuangan pada buku-buku yang telah ditentukan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua tugas dan tanggung jawab penyelenggara TPI
12. Apa tugas pokok dari Kepala Bidang Perkreditan?
- a. Melaksanakan urusan administrasi, rumah tangga, dan personalia TPI
  - b. Memberikan pelayanan penerimaan dan penyerahan uang dari penjual dan pembeli ikan
  - c. Mengelola dan melayani perkreditan baik untuk bakul maupun nelayan
13. Apa tugas pokok dari Tim Asistensi dan Pengendali?
- a. Melaksanakan tanggung jawab asistensi teknik dan pengendalian penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI

- b. Menertibkan dan melancarkan seluruh mekanisme dan proses lelang ikan, yaitu dari saat mendaratkan ikan, menimbang dan melelang ikan
- c. Melaksanakan urusan administrasi, rumah tangga, dan personalia TPI



Lampiran 4. Gedung TPI Prigi



Gedung TPI I



Gedung TPI II

Lampiran 5. Aktivitas pelaksanaan pelelangan ikan



Hasil perikanan yang akan dilelang di TPI Prigi



Proses pelelangan di TPI Prigi

Lampiran 6. Fasilitas TPI Prigi



Keranjang ikan

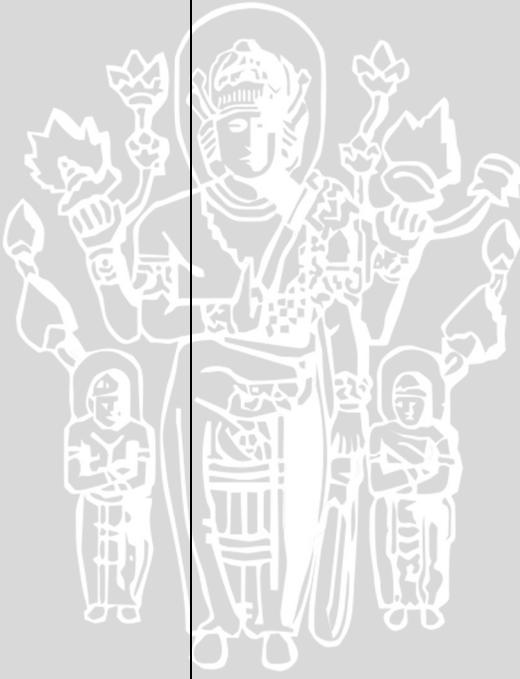


Timbangan



**REDUKSI DATA**

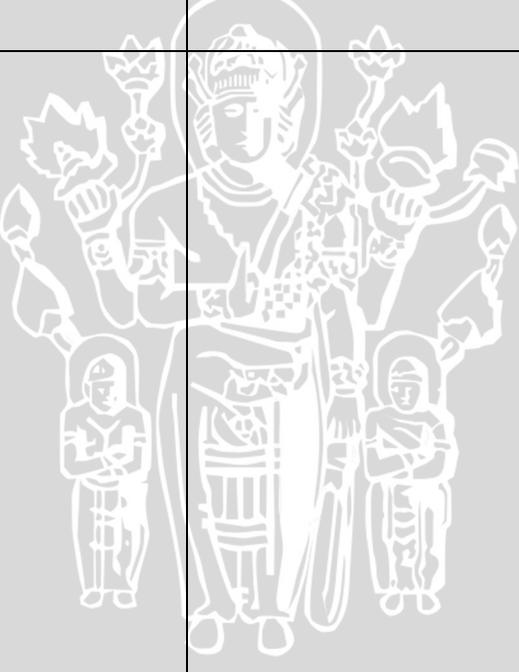
TEMA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA			SUMBER DATA
	WAWANCARA	FGD	DOKUMENTASI	
<p>Pemahaman pegawai TPI Prigi terhadap tupoksi pegawai TPI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai TPI Prigi sudah paham dengan tupoksi dari pegawai TPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tupoksi sudah di pahami oleh pegawai TPI</li> </ul>		<p>Pegawai TPI Prigi</p>
<p>Tugas pokok dan fungsi yang sudah dilaksanakan oleh pegawai TPI Prigi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai TPI Prigi belum efektif dalam melaksanakan tupoksinya, dikarenakan masih terdapatnya banyak kendala-kendala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi TPI sebagai stabilator harga belum dirasakan oleh nelayan, nelayan mengganggu TPI hanyalah tempat penarikan retribusi saja</li> <li>- Pelayanan yang kurang memuaskan, khususnya keamanan membuat nelayan dan pedagang enggan membayar retribusi</li> </ul>	 	<p>Pegawai TPI Prigi, Nelayan/pemilik kapal, Pedagang</p>

<p>Efektivitas pegawai TPI dalam menunjang keberdayaan di TPI Prigi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum efektif, karena dilihat dari target kerja yang masih belum tercapai</li> <li>- Kinerja pegawai TPI yang belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum efektif, target kerja masih belum dapat tercapai</li> </ul>		<p>Pegawai TPI Prigi, Kepala PPN Prigi, Nelayan/pemilik kapal, Pedagang</p>
<p>Faktor pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada kebijakan yang mendukung pembentukan organisasi Tata Kerja TPI Kabuapten Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 Tanggal 4 Desember tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek</li> <li>- Adanya fasilitas-fasilitas yang memadai</li> <li>- Potensi sumber daya ikan (SDI) yang besar di Teluk Prigi</li> </ul>			
<p>Faktor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masi</li> </ul>			

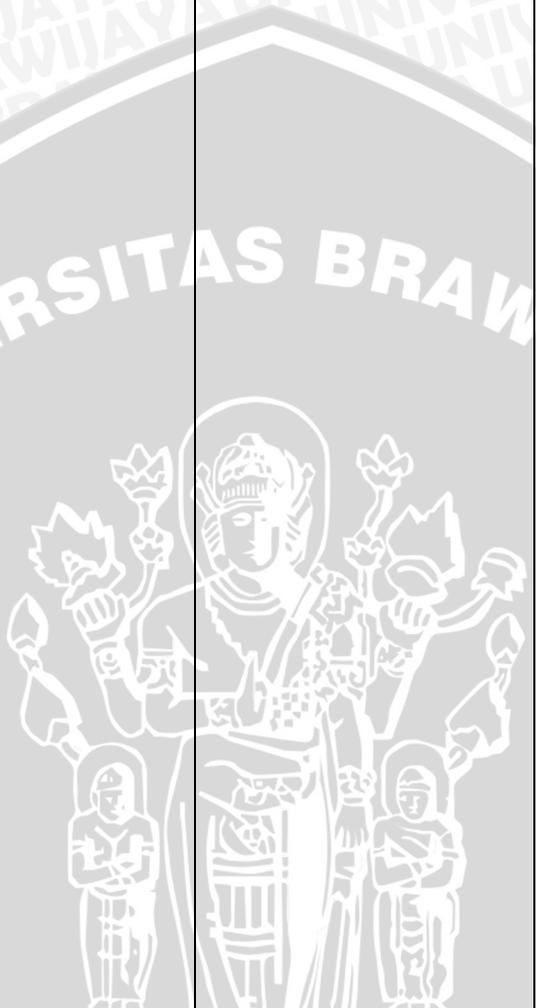


<p>penghambat</p>	<p>maraknya kasus pencurian ikan di TPI Prigi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran dari pihak nelayan dan pedagang dalam membayar retribusi.</li> <li>- Pegawai TPI Prigi belum menjalankan tupoksinya dengan optimal</li> <li>- Manajemen pelelangan ikan yang belum efektif</li> </ul>			
<p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ke ku atan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya piranti hukum dalam pelaksanaan pelelangan ikan</li> <li>2. Pegawai TPI Prigi selalu siap 24 jam di kantor TPI untuk melayani konsumen.</li> <li>3. Fasilitas yang memadai untuk membantu kinerja para pegawai TPI.</li> <li>4. Konsep penyelenggaraan pelelangan ikan sudah dipahami</li> </ol>			



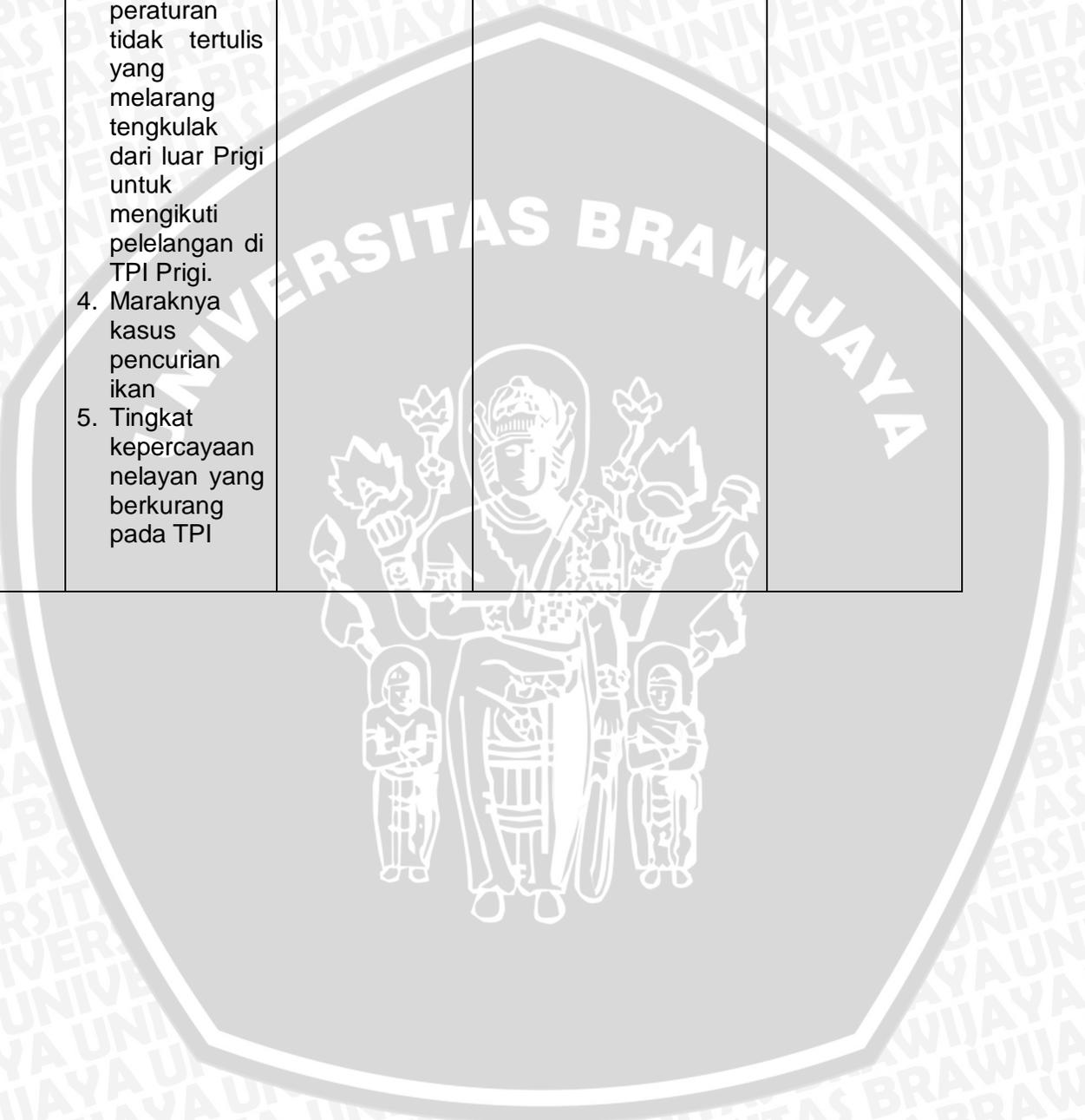
	<p>oleh pegawai TPI Prigi.</p> <p>5. Iklim organisasi yang mendukung pegawai dalam menjalankan tupoksinya</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelelahan</li> </ul>	<p>6) Manajemen keamanan yang belum baik</p> <p>7) Manajemen pelaksanaan pelelangan ikan belum berjalan dengan efektif</p> <p>8) SDM di lembaga pemasaran TPI masih kurang</p> <p>9) Kurangnya dana operasional di TPI Prigi</p> <p>10) Hubungan yang kurang baik antara pegawai TPI dengan nelayan/pedagang</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele</li> </ul>	<p>6) Perubahan teknologi</p>			



<p>ng</p>	<p>yang dapat membantu meningkatkan kinerja pegawai TPI</p> <p>7) Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang besar di teluk Prigi</p> <p>8) Permintaan produk perikanan yang cukup tinggi</p> <p>9) Daya dukung masyarakat sekitar untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di TPI Prigi</p> <p>10) Piranti hukum dari pemerintah pusat/KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang mendukung pelaksanaan pelelangan ikan</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ancaman demo dari nelayan dan pedagang jika pelayanan yang diberikan kurang memuaskan.</li> <li>2. Kurangnya kesadaran dari pihak</li> </ol>			



	<p>nelayan dan pedagang dalam membayar retribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya peraturan tidak tertulis yang melarang tengkulak dari luar Prigi untuk mengikuti pelelangan di TPI Prigi.</li> <li>4. Maraknya kasus pencurian ikan</li> <li>5. Tingkat kepercayaan nelayan yang berkurang pada TPI</li> </ol>			
--	---	--	--	--



Tema	Wawancara	Catatan
Pemahaman pegawai TPI Prigi terhadap tupoksi pegawai TPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HC (47 th), pegawai TPI            “Tugas pokok dan fungsi itu maksudnya tugas-tugas yang wajib dikerjakan dan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diserahkan kepada orang tersebut. Semua pegawai TPI sudah mengerti apa yang menjadi kewajiban dari masing-masing pegawai. Dan semua pegawai bukan hanya paham tetapi juga sudah dilakukan walaupun masih ada kekurangan”.</li> <li>2. UH (35 th), pegawai TPI            “TPI ini di dirikan untuk membantu nelayan, diharapkan melalui TPI dengan sistem lelang nelayan maupun pedagang dapat memperoleh harga yang sesuai dan tidak ada pihak yang dirugikan”.</li> <li>3. MAS (50 th), pegawai TPI            “Fungsi TPI itu sebagai tempat berkumpulnya nelayan dan bakul, tempat terjadinya pendataan, meningkatkan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah)”.</li> <li>4. JM (50 th), pegawai TPI            “Pegawai TPI Prigi sudah paham dengan tupoksinya masing-masing. Bahkan kami kadang mengerjakan apa yang bukan menjadi bagiannya. Seperti tukang juru timbang yang berhalangan hadir, maka juru tulis juga bisa menggantikan posisi juru timbang dengan baik. Namun masih adanya kendala-kendala yang membuat kami kurang optimal dalam melakukan pekerjaan”.</li> <li>5. RBU (46 th), pegawai TPI            “Pemahaman tupoksi dalam bekerja sangat penting dan pegawai TPI sudah mengerti dengan tupoksi masing-masing unit kerjanya. Karna tujuan dari tupoksi itu untuk mencapai target kerja. Tapi dalam pelaksanaannya tupoksi masih belum 100% di lakukan dengan baik, karena masih terdapat kendala”.</li> </ol>	Wawancara dilaksanakan di kantor TPI Prigi, Pada tanggal 13 Maret 2012

<p>6. SKI (49 th), pegawai TPI “Pegawai TPI sudah paham betul dengan tugas-tugas pokok yang harus di kerjakan dari masing-masing bagian. Walaupun pegawai TPI belum pernah mendapatkan pelatihan kerja penyelenggaraan pelelangan ikan baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun dari Dinas lain. Kita belajar itu melalui otodidak baca dari buku, dll”.</p>	
---	--



Tema	Wawancara	Catatan
Pelaksanaan tupoksi yang sudah dilakukan oleh pegawai TPI Prigi	<p>1. EY (50 th), pegawai TPI “..... tugas pegawai TPI bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karena kita harus melakukan penyadaran terhadap nelayan dalam pembayaran retribusi dan agar target PAD (pendapatan asli daerah) tercapai, sedangkan nelayan menganggap bahwa penarikan retribusi di TPI itu adalah ilegal itu yang membuat kita belum optimal dalam menjalankan tupoksi. Insentif juga sebenarnya berpengaruh dalam bekerja kita bekerja selama 24 jam, sedangkan gaji yang diterima pegawai TPI Prigi masih di bawah UMR Kabupaten Trenggalek yaitu sekitar Rp 280.000,00”.</p> <p>2. RHI (35 th), pegawai TPI “Di TPI itu pekerjaannya tidak mudah, apalagi kita harus stand by selama 24 jam di kantor. Kita juga sudah berusaha melayani nelayan dan pedagang dengan pelayanan yang extra tapi tetap saja masih dianggap kurang memuaskan. Di sini kita bekerja dengan harus mencapai target pendapatan retribusi, sedangkan kesadaran dari pihak nelayan maupun pedagang masih kurang.. Mereka masih seandainya kalo bayar retribusi. Padahal gaji pegawai TPI ini dari hasil retribusi itu, kalo retribusinya sedikit ya gaji yang kita terima jga sedikit”.</p> <p>3. SJW (40 th), pegawai TPI “Saya tidak pernah memegang uang, karena menurut tradisi kami istri yang mengurus hasil ikan suami dan memegang uang hasil penjualannya. Walaupun begitu istri tidak akan membelanjakan uang tanpa ijin suami, karena bias merusak rumah tangga”.</p>	Wawancara ini dilaksanakan di Kantor TPI dan rumah nelayan/pedagang, Pada tanggal 16-18 Maret 2012

4. TS (45 th), pegawai TPI  
“Memang terus terang saja, pekerjaan di TPI ini sulit.. Sebenarnya kita paham tupoksi kita masing-masing kalo juru timbang ya berarti harus nimbang, juru loket berarti nanti yang mintain uang retribusi. Tapi pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karna nelayan dan pedagang saja susah kalo dimintain uang retribusi. Terus kalo masalah lelang murni itu ya bagaimana ya memang dari awal berdirinya sudah bukan lelang murni jadi sudah sekian tahun berjalan terus tiba-tiba harus diadakan perubahan itu ga gampang...”.

5. STN (43 th) pegawai TPI  
“Pegawai TPI sebenarnya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun karena sempat dikeluarkannya Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan tentang pembebasan penarikan retribusi di bidang perikanan semenjak saat itu banyak nelayan yang tidak membayarkan kewajiban retribusinya. Padahal peraturan penyelenggaraan TPI berdasarkan otonomi daerah masing-masing dan menurut Peraturan Bupati Trenggalek penarikan retribusi di bidang perikanan tetap dilaksanakan. Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Prigi memang belum lelang murni, karena sejak berdirinya TPI Prigi sistem yang berlaku bukan melalui lelang murni, biasanya transaksi berdasarkan harga yang disepakati pihak nelayan dan pedagang”.

6. JI (51 th), nelayan  
“Sebenarnya nelayan tidak keberatan memebayar retribusi kalo pelayanan yang diberikan juga

baik. Kasus pencurian ikan saja masih marak terjadi, dan itu sangat merugikan nelayan tapi pihak TPI seakan tidak peduli dengan keadaan seperti ini”.



Lampiran 9

1. Denah Kabupaten Trenggalek



## 2. Denah Desa Tasikmadu

